



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Umum

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal harus memiliki lima Kabupaten/Kota, maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah, diamanatkan bagi setiap Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di hadapan rapat paripurna DPRD. Penyusunan (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 ini berpedoman kepada pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2011 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ



Bupati Bone Bolango Tahun 2011 disusun secara komprehensif, integratif dan informatif yang bertujuan agar informasi yang disampaikan dalam LKPJ dapat menjadi instrument pertanggungjawaban Kepala Daerah serta bahan evaluasi kedepan dalam memenuhi target RPJMD 2011-2015.

Laporan ini juga merupakan *progress report* tahun 2011, tahun kedua (periode 2010– 2015) dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati Bone Bolango kepada rakyat melalui DPRD. Dalam laporan ini dijabarkan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2011.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2011 adalah Untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam bidang administrasi Pemerintahan, penyelenggara pembangunan di daerah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKPJ adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam (SDA) berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

3. Landasan Penyusunan

Di samping itu, penyusunan LKPJ ini juga berpedoman pada peraturan perundangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

❖ Letak Geografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km² berada pada ketinggian 0 – 1500 meter dari permukaan laut, terletak antara 0,27' – 1.01' Lintang Utara dan antara 121.23' – 122.44' Bujur Timur.

Gambar: 1

Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011



❖ **Batas Wilayah**

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkar dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

Tabel 1.1
Gambaran Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Bone Bolango

BATAS WILAYAH	BERBATASAN
Sebelah Utara	Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulut
Sebelah Timur	Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulut
Sebelah Selatan	Kec. Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo
Sebelah Barat	Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

❖ **Luas Wilayah**

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1.984,58 Km² yang tersebar pada 17 kecamatan dan 1 Kecamatan Persiapan. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Propinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut ini.

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Menurut Kecamatan

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1. Tapa	64,41	3,26
2. Bulango Utara	176,09	8,87
3. Bulango Selatan	9,87	0,50
4. Bulango Timur	10,82	0,55
5. Bulango Ulu	78,41	3,95
6. Kabila	193,45	9,75
7. Botupingge	47,11	2,37
8. Tilongkabila	79,74	4,02
9. Suwawa	33,51	1,69
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28
11. Suwawa Timur *)	489,20	24,55
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26
13. Kabila Bone	143,51	7,23
14. Bonepantai	161,82	8,15
15. Bulawa	111,01	5,59
16. Bone Raya	64,12	3,23
17. Bone	72,71	3,66
JUMLAH	1984,58	100

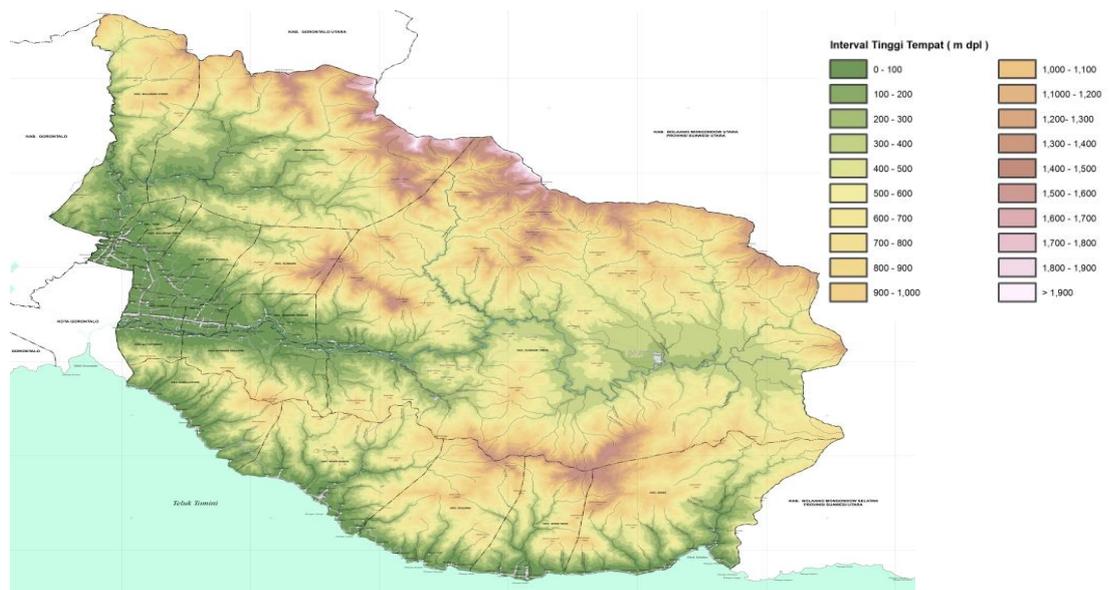
Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango

*) Masih termasuk Kecamatan Persiapan Pinogu

❖ Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan).

Gambar: 2 Topografi Kabupaten Bone Bolango



Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Dilihat dari ketinggian wilayah dari permukaan laut, umumnya Kabupaten Bone Bolango merupakan dataran tinggi dan pegunungan seperti pada **Tabel 1.3** berikut :

Tabel 1.3
Ketinggian Daerah Kabupaten Bone Bolango
dari Permukaan Laut

KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT	LUAS (Ha)
25 – 100 meter	14,41
100 – 500 meter	48,65
500 – 1000 meter	27,85
> 1000 meter	9,09

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).

Gambar : 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango



DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah \pm 265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

❖ Pola Penggunaan Lahan

Gambar: 4 Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Bone Bolango



Pola Penggunaan Tanah pada hakekatnya adalah merupakan gambaran didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 –2011

No	Penggunaan Lahan (Tanah)	LUAS (Ha)		
		2009	2010	2011
1.	Sawah yang diolah :			
	a. Sawah Teririgasi	1.897,28	1.897,28	1.897,28
	b. Sawah Tadah Hujan	38,50	38,50	38,50
	c. Sawah Pasang Surut	-	-	-
	d. Sawah Lainnya/Irigasi Desa	111,15	111,15	111,15
2.	Sawah yang belum diolah	-	-	-

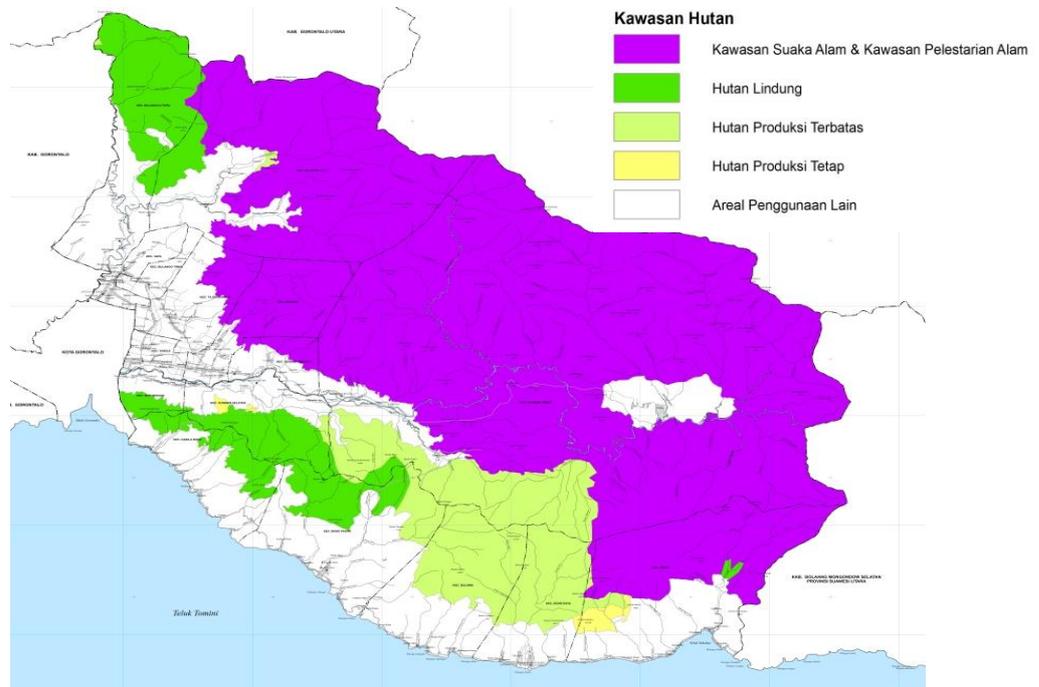
3.	Kebun	12.396	12.361	12.361
4.	Ladang/Huma	6.345	6.444	6.444
5.	Pekarangan tanah bangunan halaman sekitar	6.897	7.842	7.842
6.	Pengembalaan Padang rumput	2.936	2.936	2.936
7.	Rawa-rawa yang tdk di tanam	4	4	4
8.	Tambak	-	-	-
9.	Kolam/lobak/Empang	70	70	70
10.	Lahan Kering sementara tidak diusahakan	7.092	6.448	6.448
11.	Tanaman Kayu-kayuan	7.938	6.477	6.477
12.	Hutan Negara	60.939	61.373	61.373
13.	Perkebunan	15.760	15.758	15.758
14.	Lainnya	28.101	28.101	28.101

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

❖ Potensi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

Gambar 5 : Peta Potensi Hutan di Kabupaten Bone Bolango



Walaupun belum sampai tingkat yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan dimana dapat membawa bencana alam bagi daerah lain. Pada beberapa tahun



terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango, yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi.

Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango 140.098,40 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.5
Potensi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 s/d 2011

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)		
		2009	2010	2011
1	Hutan Lindung	20.898	15.718,25	15.718,25
2	Hutan Produksi Terbatas	8.913	18.803,29	18.803,29
3	Hutan Produksi Tetap	3470	836,45	836,45
4	Hutan Produksi Konversi	-	-	-
5	Hutan Taman Nasional	110.000	104.740,15	104.740,15

Sumber Data : BPKH Wil XVI Gorontalo, (SK Mentri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010)

Tabel 1.6
Produksi Hasil Hutan Non HPH di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 s/d 2011

Produksi Hasil Hutan	Satuan	Tahun		
		2009	2010	2011
1. Kayu Bulat	M ³	432,28	432,28	134,13
2. Kayu Gergajian	M ³	584,87	584,87	-
3. Kayu Olahan	-	-	-	-
4. Hasil Hutan Ikutan	-	-	-	-
5. Damar	-	-	-	-
6. Rotan	TON	257,098	257,098	58,05
7. Gondorukem	-	-	-	-
8. Kayu Jati	-	-	-	-
9. Terpentin	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango

❖ Potensi Pertambangan dan Energi

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem

dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan dimana masih seringnya terjadi penggunaan bahan-bahan radioaktif yang tidak direkomendasikan dalam usaha pertambangan rakyat. Untuk itu diperlukan kearifan lokal dalam pengambilan kebijakan pemberian izin pengolahan hasil pertambangan dengan mempertimbangkan nilai hayati serta potensi yang tersedia.

Gambar: 6 Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango



Potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.46 dan Tabel 1.7, 1. 8 dan 1. 9 berikut ini.

Tabel 1.7
Potensi Pertambangan Non Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Tambang	Potensi Pertambangan Non Logam
		2011
1.	Granit (Ton)	
2.	Andesit (Ton)	62.500.000
3.	Batu Gamping ((Ton)	67.000.000
4.	Sirtu (Ton)	24.600.880

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango



Tabel 1.8
Potensi Pertambangan Logam
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

No.	Jenis Tambang	Lokasi (Kec/ Desa)	Potensi (Ton)
1.	Emas	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	3.2
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Tulabolo	119.310
		Kecamatan Bone Raya Desa Tombulilato Kiri	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	119.310
2.	Tembaga	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	232,200
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Kayubulan	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	1891,500
		Kecamatan Bonepantai Cabang Kiri	1891,500

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

Sedangkan perkembangan potensi sumber energi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.9

Tabel 1.9
Perkembangan Potensi Sumber Energi
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Sumber Daya Energi	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Jumlah Sumber Daya Energi (unit)
1.	PLTA	Suwawa Timur	-
2.	PLTU	Kecamatan Kabila Bone	
3.	GEOTERMAL	Suwawa Tengah Suwawa Selatan	
4.	PLTD	-	-
5.	PLTS	Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo Barat, - Desa Tulabolo Timur, - Desa Pinogu - Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Selatan - Desa Molintogupo - Desa Bulontala	100 Unit 145 Unit 450 Unit 71 Unit 1 Unit 45 Unit



		Kecamatan Suwawa Tengah - Desa Tapadaa Kecamatan Kabila Bone - Desa Biluango - Desa Olele Kecamatan Tilongkabila - Desa Tunggulo Kecamatan Bone Pantai -Desa Pelita Hijau	71 Unit 50 Unit 50 Unit 48 Unit -
6.	PLTMH	Kecamatan Bulango Ulu - Desa Owata Kecamatan Bulango Timur - Desa Kopi Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo (Piko Hydro)	1 Unit 1 Unit 15 Unit

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

❖ **Potensi Pariwisata**

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dilapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah pantai selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram / Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

❖ **Kawasan Strategis Wisata Alam**

Kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman dalam



Tabel 1.10
Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 - 2011

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata				Jumlah Sanggar Seni dan Budaya
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah	
2009	1	1	1	3	6
2010	1	1	3	3	8
2011	1	1	3	3	8

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

perspektif ekologis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penentuan kawasan ini di Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan dalam dua tipe yaitu :

- (1). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata bahari yaitu Pantai Olele
- (2). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata daratan yaitu :
 - Kawasan Air Panas Lombongo, di perbukitan Lombongo, Desa Lombongo, Kec. Suwawa Tengah
 - Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kec. Suwawa Selatan ;
 - Air Terjun Ilohuwa Desa Ilohuwa, Kec. Bone ;
 - Kawasan Danau Perintis, Kec. Suwawa ;
 - Kawasan Taman Laut Olele ,Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Botutonuo, Desa Botutonuo, Kec. Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Molotabu, Desa Molotabu, Kec. Kabila Bone) ;
 - Kawasan Pantai Bulawa, Kec. Bulawa)

Kawasan wisata telah banyak menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah misalnya Bali. Oleh karena kawasan wisata alam di Kabupaten Bone Bolango harus mendapat perhatian serius karena memiliki nilai potensi dikembangkan. Kawasan ini bisa menjadi sumber utama PDRB Hijau. Pengembangan wisata alam perlu dilakukan melalui suatu rencana dan strategi, sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan disesuaikan dengan kapasitas ekologis;
- Pemberdayaan masyarakat lokal melalui *management of colaboration*;
- Pembangunan infrastruktur penunjang;
- Pengendalian dampak antropogenis;
- Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha wisata;



- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan;
- Pembuatan payung hukum;

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dilapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah Pantai Selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *Out Bond* (*Hiking, Tracking* dan *climbing* serta *arung jeram/susur sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang disepanjang pesisir perairan Pantai Selatan (Teluk Tomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan local maupun manca Negara.

2. Kondisi Demografis

❖ Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 sebanyak 153.639 jiwa (angka sementara) berdasarkan data BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bone Bolango yang tersebar pada 17 Kecamatan.

Tabel 1.11
Perkembangan Penduduk dan Kepadatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2011

TAHUN	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (KM ²)
2009	131.797	67
2010	141.915	71
2011	153.639	77

Sumber Data : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bone Bolango

❖ Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk di setiap kecamatan dari Tahun 2010 serta tahun 2011 (Data Adminduk) dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.12
Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desa Per-Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Tapa	6.575	6.871	7.618
2.	Bulango Utara	6.537	6.933	7.319
3.	Bulango Selatan	8.775	9.711	10.255
4.	Bulango Timur	5.325	4.995	5.238
5.	Bulango Ulu	3.046	3.612	3.881
6.	Kabila	18.795	21.004	22.569
7.	Botupingge	5.462	5.598	6.139
8.	Tilongkabila	15.370	16.569	17.162
9.	Suwawa	9.881	10.688	11.975
10.	Suwawa Selatan	45.10	4.796	5.176
11.	Suwawa Timur	5.815	6.578	7.229
12.	Suwawa Tengah	5.201	5.716	6.219
13.	Kabila Bone	9.176	9.755	10.848
14.	Bonepantai	9.331	9.776	10.798
15.	Bulawa	4.707	4.763	5.333
16.	Bone Raya	4.979	5.876	6.492
17.	Bone	8.307	8.674	9.388
Jumlah Total		131.797	141.915	153.639

Sumber Data :BPS dan Dinas Capil dan Kependudukan Kabupaten Bone Bolango

Sedangkan rata-rata Luas Wilayah dan penduduk per-desa, dan per-Km² berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

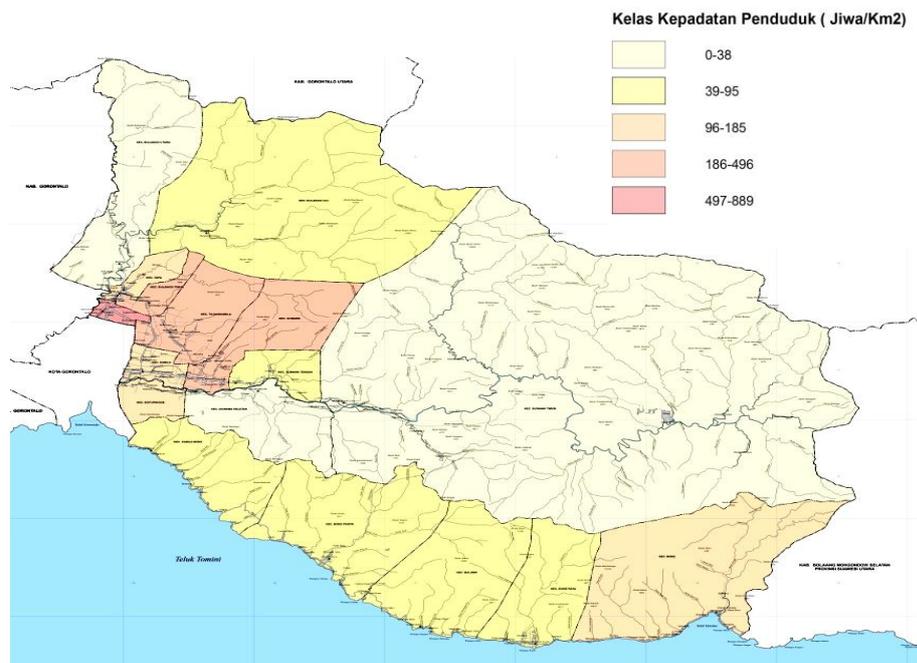
Tabel 1.13
Rata-rata Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
	km ²	%	Jumlah (Orang)	%	
1. Tapa	64,41	3,25	7,618	4,96	107
2. Bulango Utara	176,10	8,87	7,319	4,76	39
3. Bulango Selatan	9,87	0,50	10,255	6,67	984
4. Bulango Timur	10,82	0,55	5,238	3,41	462
5. Bulango Ulu	78,41	3,95	3,881	2,53	46
6. Kabila	193,45	9,75	22,569	14,69	109

7. Botupingge	47,11	2,37	6,139	4,00	119
8. Tilongkabila	79,74	4,02	17,162	11,17	208
9. Suwawa	33,51	1,69	11,975	7,79	319
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28	5,176	3,37	26
11. Suwawa Timur	489,20	24,65	7,229	4,71	13
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26	6,219	4,05	88
13. Bonepantai	161,82	8,15	10,848	7,06	60
14. Kabila Bone	143,51	7,23	10,798	7,03	68
15. Bone Raya	64,12	3,23	5,333	3,47	92
16. Bone	72,71	3,66	6,492	4,23	119
17. Bulawa	111,01	5,59	9,388	6,11	43
Jumlah Total	1.984,58	100,00	153,639	100,00	72

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Gambar: 7 Peta Kepadatan Penduduk (jiwa/KM2)



❖ Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Tahun 2011 sebesar 153.639 jiwa, jika dilihat laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah kecamatan Bulango Ulu dan Kecamatan Bone Raya yakni sebesar 1,72 dan 1,67 persen sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah kecamatan Bulango Timur yakni sebesar -0,64 persen



Tabel 1.16
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 –2010

Kecamatan	Laju Pertumbuhan	
	2010	2011
1. Tapa	0,44	1,04
2. Bulango Utara	0,59	0,54
3. Bulango Selatan	1,02	0,55
4. Bulango Timur	- 0,64	0,48
5. Bulango Ulu	1,72	0,72
6. Kabila	1,12	0,72
7. Botupingge	0,25	0,93
8. Tilongkabila	0,75	0,35
9. Suwawa	0,79	1,14
10.Suwawa Selatan	0,62	0,77
11.Suwawa Timur	1,24	0,95
12.Suwawa Tengah	0,95	0,85
13.Kabila Bone	0,61	1,07
14.Bonepantai	0,47	1,00
15.Bulawa	0,12	1,14
16.Bone Raya	1,67	1,00
17.Bone	0,43	0,79
Rata-rata	0,71	0,83

3. Kondisi Sosial Ekonomi

a. *Kondisi Sosial Masyarakat*

Kinerja macro ekonomi daerah Kabupaten Bone Bolango tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan regional. Berbagai langkah strategis yang di lakukan dalam rangka penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat difokuskan pada kebijakan alokasi dan distribusi fiskal daerah serta mendorong tumbuhnya investasi daerah disamping merekomendasikan strategi kebijakan ekonomi lainnya yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, membangun basis-basis ekonomi daerah, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor sekunder dan tersier.

Secara agregat, perekonomian kabupaten Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik



walaupun diakui bahwa pertumbuhan tersebut masih ada di bawah tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Dalam selang waktu tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango mencapai 5,88% tahun 2007, naik 6,34% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 mencapai 6,88%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 6,66% dan tahun 2011 6,91%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Gorontalo mencapai 7,51% pada tahun 2007, 7,73% pada tahun 2008 dan 7,54% pada tahun 2009. Demikian pula angka pengangguran pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 8,28% dibandingkan tahun 2009 sebesar 10,08%, angka pengangguran tahun 2011 3,9%

Dilihat dari aspek kinerja peningkatan kualitas hidup penduduk berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan presentase penduduk miskin, kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2009 menunjukkan trend yang cukup baik, presentase penduduk miskin 19,93% pada tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar 17,65%, sedangkan untuk rata-rata propinsi Gorontalo yakni pada tahun 2009 IPM mencapai 69,71 dan presentase penduduk miskin pada tahun 2009 25,01%, pada tahun 2010 menurun 23,19. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir trend kinerja Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan, dengan IPM 65 pada tahun 2004 meningkat menjadi 71,7 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya aspek peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta perbaikan pendapatan masyarakat.

b. Kondisi Perekonomian Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Struktur perekonomian Bone Bolango didominasi oleh tiga sektor utama Tabel 1.17, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.



Tabel 1.17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)		
		2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	326.890	356.620	376.067
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.897	5.941	6.964
3.	Industri Pengolahan	106.583	113.618	122.223
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.872	2.922	3.268
5.	Bangunan	39.831	43.767	49.160
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	104.333	114.236	118.261
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	32.501	36.221	37.589
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	89.223	102.779	108.767
9.	Jasa-Jasa	124.375	146.583	152.427
PDRB		831.504	922.685	974.726
PDRB TANPA MIGAS		831.504	922.685	974.726

Sumber Data : Kantor BPS Kabupaten Bone Bolango
*Data 2011 masih dalam proses pengolahan

Tabel 1.18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Atas dasar harga Konstan
Tahun 2009 - 2011 (Jutaan Rupiah)

No.	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)		
		2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	80.644	87.262	92.912
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.369	3.659	3.875
3.	Industri Pengolahan	35.644	37.200	38.942
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.039	1.045	1.118
5.	Bangunan	21.020	22.037	24.971
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	26.622	27.859	29.991
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	23.557	24.345	25.178
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	39.692	44.017	47.891
9.	Jasa-Jasa	31.474	33.144	35.064
PDRB		263.061	280.568	299.942
PDRB TANPA MIGAS		263.061	280.568	299.942

*Data 2011 masih dalam proses pengolahan



Tabel 1.19
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Berlaku (%)
Tahun 2009- 2011

No	Sektor	PDRB Harga Berlaku Per-Tahun (Jutaan Rupiah)		
		2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	39,31	39,63	38,58
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,59	0,63	0,71
3.	Industri Pengolahan	12,82	12,12	12,54
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,35	0,31	0,34
5.	Bangunan	4,79	4,67	5,04
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,55	12,18	12,13
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,91	3,86	3,86
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,73	10,96	11,16
9.	Jasa-Jasa	14,96	15,63	15,64
PDRB		100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS		100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Kantor BPS Kabupaten Bone Bolango
*Data 2011 masih dalam proses pengolahan

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dari tahun 2009-2011 didominasi oleh tiga sektor utama (Tabel 1.20), yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; listrik, gas dan air bersih, dan sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 1.20
LAJU PERTUMBUHAN PDRB BONE BOLANGO
PERSEKTOR TAHUN 2009 – 2011

No.	Sektor	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	7,12	8,21	6,47
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,18	8,62	5,90
3.	Industri Pengolahan	3,62	4,36	4,68
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,53	0,56	7,03
5.	Bangunan	4,61	4,84	13,31
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,42	4,64	7,65
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,56	3,34	3,42
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,41	10,90	8,80
9.	Jasa-Jasa	5,66	5,31	5,79
PDRB		6,49	6,66	6,91
PDRB TANPA MIGAS		6,49	6,66	6,91

*Data 2011 masih dalam proses pengolahan



Tabel 1.21
BEBERAPA AGREGAT
PDRB KABUPATEN BONE BOLANGO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2009-2011

No.	Rincian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	PDRB atas dasar harga berlaku (Jutaan Rupiah)	831.504	937.685	974.726
2.	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	131.797	141.915	145.015
3.	PDRB Perkapita (Rupiah)	6.308.974	6.607.372	6.721.552

**Data 2011 masih dalam proses pengolahan*

Tabel 1.22
BEBERAPA AGREGAT
PDRB KABUPATEN BONE BOLANGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2009-2011

No.	Rincian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	PDRB atas dasar harga Konstan (Jutaan Rupiah)	263.061	280.568	299.942
2.	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	131.797	141.915	145.015
3.	PDRB Perkapita (Rupiah)	1.995.954	1.977.013	2.068.354

**Data 2011 masih dalam proses pengolahan*



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Periode 2010–2015, berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap kualitas dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Komitmen besar ini tumbuh atas dasar keinginan kuat seluruh komponen masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan daerah serta tantangan dan ekspektasi bersama dimasa datang. Oleh karena itu melalui inspiras realistik, terukur, terjangkau dan berwawasan masa depan tentang Kabupaten Bone Bolango maka direfleksikan dalam sebuah Visi Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2011-2015, yakni:

“Terwujudnya pemerintahan amanah, demi terciptanya masyarakat madani”

Visi ini mengandung arti :

- **Pemerintahan Yang Amanah**, yang hendak di wujudkan adalah praktek penyelenggaraan pemerintahan yang secara melembaga tercegah dan terjaga dari keinginan dan kehendak bekerja hanya untuk merauk keuntungan secara individu, kelompok atau golongan tertentu. Pemerintahan amanah merupakan bentuk pemerintahan yang senantiasa terpanggil mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme.
- **Masyarakat madani (civil society)**, adalah bentuk masyarakat demokratis, dimana anggotanya menyadari akan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan kepentingannya. Masyarakat madani tidak terbentuk secara sepihak hanya berupa masyarakat atau rakyatnya, melainkan dipersyaratkan harus memiliki bentuk pemerintahan yang demokratis (*democratic government*), masyarakat yang memiliki karakteristik kehidupan yang bermartabat, memiliki kepekaan social yang tinggi, menjunjung tinggi nilai dan norma adat, norma hukum, hidup bermasyarakat dan bersahaja,



budaya gotong royong, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan sendi – sendi keimanan serta memiliki toleransi hidup beragama.

Untuk mencapai visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bone Bolango 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, taat hukum dan demokratis**
- 2. Menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan.**

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah

Strategi pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2010-2015 yang diharapkan mampu menjembatani upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan; (2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; (3) Mewujudkan pengembangan potensi ekonomi lokal dan sumber daya alam; serta (4) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana serta penataan ruang wilayah.

❖ Mewujudkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi ini ditujukan untuk reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui penataan kelembagaan pemerintah agar menjadi lebih proporsional, efektif dan efisien dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih, peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan aparatur serta penataan system ketatalaksanaan untuk mendukung kinerja pemerintah. Pada intinya, pemerintah daerah di dalam melaksanakan reformasi birokrasi, terfokus pada penataan organisasi, penataan proses bisnis dan penataan sumberdaya manusia.

Strategi ini juga diarahkan untuk mendorong pelaksanaan penegakkan supremasi hukum yang lebih baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan public. Penegakkan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menghindari adanya diskriminasi merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan akhir dari pembenahan hukum adalah menciptakan kondisi sosial politik masyarakat yang kondusif, terkristalisasi dalam tersedianya produk hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, berkembangnya kehidupan politik yang demokratis, serta mengupayakan keamanan dan ketertiban umum.

Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan hasilnya pun telah mulai dirasakan, Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Sebagai contoh, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,



meskipun semakin menunjukkan kemajuan, namun kualitasnya masih perlu pembenahan, termasuk penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Disamping itu, budaya kerja produktif belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi public (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN.

Kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan pelayanan terpadu satu pintu, pembentukan badan layanan umum, pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik serta peningkatan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan.

❖ **Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir dan daya ciptanya. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan, menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, serta bergizi. Adapun pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan menekankan pada masyarakat yang mempunyai etos kerja produktif, ketrampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen.

Strategi pemenuhan **kebutuhan dasar masyarakat**, meliputi:

1. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan gizi yang baik;
2. Kebutuhan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Kebutuhan kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan;
4. Kebutuhan perlindungan hukum dan HAM;
5. Kebutuhan memperoleh rasa keadilan;
6. Kebutuhan untuk hidup beragama dan berbudaya;
7. Kebutuhan untuk berpartisipasi dalam politik;
8. Kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkeadilan;
9. Kebutuhan berkreasi dan berinovasi.



Rencana tindak pemenuhan hak dasar memuat tujuan dan target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan target terukur sejauh data dan informasi tersedia, dan target kualitatif, langkah kebijakan, dan pelaksana rencana tindak menegaskan adanya kewajiban pokok bagi pemerintah daerah sebagai pemegang mandat untuk menggunakan sumberdaya secara maksimal dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dan progresif. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkajian terhadap hambatan dalam pemenuhan hak dasar. Dalam menjalankan rencana tindak, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola anggaran, menerbitkan peraturan dan melakukan tindakan yang didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga menjamin pemenuhan hak dasar, tidak menciptakan hambatan dan beban bagi masyarakat miskin, dan tidak mematikan inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pemerintah daerah dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak terutama pihak investor dalam mengembangkan ekonomi lokal.

❖ **Mewujudkan pengembangan potensi ekonomi lokal dan SDA**

Strategi pembangunan ekonomi lokal Kabupaten Bone Bolango untuk lima tahun kedepan, diarahkan untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri kecil dan menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata. Pembangunan pertanian tetap dianggap sektor terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Beberapa alasan mendasar pentingnya pembangunan pertanian adalah : (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam; (2) pangsa terhadap pendapatan daerah cukup besar; (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini; (4) peranannya dalam penyediaan pangan masyarakat; (5) menjadi basis pertumbuhan di perdesaan, disamping itu fakta menunjukkan bahwa walaupun potensi pertanian di Kabupaten Bone Bolango sangat besar, namun sampai saat ini, sebagian besar pelaku ekonomi yang terlibat dalam sektor pertanian yakni petani, merupakan golongan masyarakat sangat miskin.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan pembangunan sektor pertanian pada lima tahun kedepan, maka sasaran pembangunan pertanian diarahkan untuk: (1) Penajaman pelaksanaan “Panca Usaha Tani” yang meliputi, pemaknaan dan perbaikan irigasi, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, pemberantasan hama dan penyakit, serta perbaikan cara bercocok tanam (teknologi); (2) investasi proyek-proyek padat karya di perdesaan; (3) mengembangkan ciri khas komoditi daerah dengan mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan; (4) peningkatan hak akses petani untuk memperoleh kredit pertanian; (5) pembangunan sistem agribisnis



dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistik.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai nilai strategis dan sangat prospektif disamping sebagai sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah sekarang ini, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi utama dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Disamping memiliki potensi yang begitu besar, sektor perikanan memiliki permasalahan klasik yang sering dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, seperti *illegal fishing*; belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan pesisir yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, masih rendahnya penguasaan teknologi perikanan berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kawasan serta belum lengkapnya kebijakan dan aturan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penegakan supremasi hukum.

Dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun peran swasta pun sangat diperlukan. Pemerintah berperan dalam hal pengaturan, pengawasan maupun pembinaan, sedangkan yang bersifat pengelolaan usaha diharapkan peran swasta dan masyarakat perikanan pada umumnya untuk dapat memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia secara berkesinambungan serta tetap menjaga kelestariannya.

Sama halnya dengan pertanian dan perikanan, walaupun memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan penggemukan sapi dan rumput unggul untuk pakan ternak namun sektor peternakan pun belum memberikan hasil yang optimal, antara lain banyak lahan yang belum dimanfaatkan serta masih banyak peternak yang memelihara ternaknya dengan cara yang tradisional, rendahnya kualitas SDM peternak, kurangnya sarana dan prasarana peternakan, penguasaan teknologi budidaya ternak masih rendah serta keterbatasan modal. Oleh karena itu pembangunan sektor peternakan diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas peternakan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk peternakan serta peningkatan kapasitas masyarakat veteriner.

Potensi wisata diwilayah Bone Bolango cukup prospektif khususnya untuk wisata bahari dan wisata alam, namun demikian dari banyaknya potensi wisata tersebut belum dimanfaatkan secara optimal baik oleh masyarakat, pemerintah maupun investor. Pengembangan wisata tidak hanya tergantung



dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya, seperti penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan sifat masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjungnya. Oleh karena itu strategi pembangunan pariwisata daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah peningkatan kesiapan tujuan pariwisata daerah agar mampu bersaing di pasar regional dan global, meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata, meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemasaran pariwisata, meningkatkan kualitas kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan standar internasional, meningkatkan kerjasama dan kemitraan yang efektif dan efisien antara pemerintah, swasta dan masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perwujudan konkrit dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi “*buffer*” saat perekonomian dilanda krisis. Keragaman usaha UMKM seperti petani dan peternak kecil, nelayan tanpa perahu, industri kecil, industri rumah tangga, usaha kerajinan, pedagang kecil/eceran, tukang sayur, abang bentor, sopir angkot, tukang kredit, pengecer koran dan seterusnya adalah pelaku ekonomi yang memberi andil cukup besar dalam menggerakkan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Sebagai kelompok kecil, UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi. Oleh karena itu, untuk menguatkan perekonomian daerah, upaya pemberdayaan ekonomi diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya para pelaku ekonomi di kelompok usaha ini. Sementara itu, dalam penguatan kelembagaan koperasi, upaya pengembangan diarahkan agar dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, terutama untuk usaha mikro dan kecil yang berkoperasi. Disamping itu pula, untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam rangka memperluas peranannya di dalam perekonomian daerah, diperlukan serangkaian pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan.

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi.



Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini disebabkan oleh adanya permasalahan iklim investasi, dari proses perizinan investasi, stabilitas keamanan daerah sampai dengan pelaksanaan realisasi investasi. Hal ini telah menyebabkan menurunnya minat untuk melakukan investasi, baik untuk perluasan usaha yang sudah ada maupun untuk investasi baru. Untuk itu dengan adanya penciptaan lingkungan usaha yang kondusif serta penyederhanaan berbagai perangkat peraturan, diharapkan pengembangan investasi kedepan bisa lebih meningkat untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, memberikan peran lebih besar kepada daerah, namun belum diikuti dengan peningkatan kemampuan teknis/managerial aparat pemerintah daerah. Karakteristik industri pertambangan yang unik dan khusus memerlukan pemahaman yang mendalam, baik dari segi teknis penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/lingkungan dari kegiatan penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi. Rendahnya kemampuan aparatur daerah dalam pengelolaan pertambangan serta kurang harmonisnya peraturan perundangan lintas sektor, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam perizinan, pengawasan eksploitasi, produksi, serta pengendalian dampak lingkungan dan konflik lahan.

Permasalahan pembangunan pertambangan di Kabupaten Bone adalah potensi pertambangan (khusus emas) yang terletak dalam kawasan taman nasional yang pemanfaatan maupun konsep pengelolaannya memerlukan kajian yang lebih mendalam. Disamping itu, pembangunan pertambangan di Bone Bolango sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya alam belum dilaksanakan, ditata dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka strategi pembangunan pertambangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan managerial aparatur daerah terutama dalam pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan, menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan, mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembinaan serta melaksanakan rehabilitasi kawasan bekas tambang.

Sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi



prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2010-2015). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

❖ **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana serta penataan wilayah**

Sektor sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial budaya serta persatuan dan kesatuan, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti air minum, pembangkit listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sarana dan prasarana lainnya, seperti jalan, jembatan dan pemukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi, baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian maupun sosial.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana jalan diarahkan untuk meningkatkan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan, meningkatkan aksesibilitas wilayah di perdesaan, kantong-kantong produktif serta wilayah pelosok dan terpencil, serta meningkatnya partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana air diarahkan untuk meningkatkan jumlah cakupan masyarakat yang terlayani air bersih, meningkatkan upaya menjaga kelestarian sumberdaya air, mengendalikan bahaya banjir, meningkatkan layanan jaringan irigasi, meningkatkan kinerja pengelolaan sumberdaya air serta meningkatkan sistem data dan informasi sumberdaya air.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman diarahkan untuk penyediaan akses bagi masyarakat miskin, masyarakat pesisir dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya termasuk PNS terhadap perumahan yang layak, pengembangan dan penataan



lingkungan perumahan, mengembangkan KASIBA dan LISIBA serta menyiapkan perangkat peraturannya dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan perumahan.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika diarahkan untuk meningkatkan upaya ketersediaan sarana prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika diseluruh desa khususnya desa terpencil, dan meningkatkan upaya penyediaan akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern.

Strategi pembangunan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mengoptimalkan kapasitas dan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang dalam rangka optimalisasi pertumbuhan wilayah.

C. Prioritas Daerah Tahun 2011-2015

Berdasarkan Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan langkah pembangunan sesuai Prioritas Daerah yang disusun, meliputi :

- 1). Mewujudkan pemerintahan yang bersih, taat hukum dan demokratis
 - a. Reformasi borikrasi
 - b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
 - c. Peningkatan mutu pelayanan publik
 - d. Penegakkan supremasi hukum
- 2). Menciptakan Masyarakat mandiri dan berkeadilan
 - a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - c. Pemerataan pelayanan kesehatan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas
 - e. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan lokal
 - f. Penyetaraan gender, perlindungan anak dan manula
 - g. Pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkesinambungan
 - h. Pengembangan objek wisata

D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2011

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2011 dilakukan secara sinergis dengan arah kebijakan ekonomi makro dalam jangka menengah yang diharapkan akan memberikan dukungan pada (1) peningkatan kinerja sektor-sektor riil, (2) penyehatan APBD dengan meningkatkan secara bertahap



kapasitas fiskal daerah serta memperbaiki kinerja anggaran untuk peningkatan pelayanan publik, (3) pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran secara terpadu dengan kebijakan lainnya, (4) pengembangan ekonomi kerakyatan (5) serta pengintegrasian perekonomian daerah dengan perekonomian yang lebih luas.

Kebijakan ekonomi makro dalam periode 2011 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan produktifitas daerah serta peningkatan ketahanan ekonomi dengan memperkokoh basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Pengembangan sektor-sektor ekonomi diarahkan untuk menjadi pendorong peningkatan produktifitas ekonomi dimasa datang dengan memberikan perhatian khusus pada sektor yang berperan strategis dalam memenuhi konsumsi masyarakat, sektor yang mempunyai kandungan dan nilai tambah lokal serta berpotensi ekspor, sektor yang memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta memberikan '*multiplier effect*' yang cukup besar terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya. Beberapa sektor tersebut antara lain sektor pertanian, peternakan dan perikanan kelautan, pertambangan, industri dan jasa perdagangan.

Tantangan pokok yang dihadapi daerah dalam jangka pendek dan menengah masih tertumpu pada ketergantungan ekonomi daerah pada sektor fiskal. Oleh karena itu dalam jangka pendek kebijakan ekonomi daerah harus didukung oleh tumbuhnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor investasi masyarakat melalui perbaikan stabilitas politik daerah, peningkatan kepastian hukum, berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*) untuk (1) mengurangi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang menghambat tumbuhnya iklim usaha yang sehat, (2) mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat (3) perbaikan citra daerah sebagai satu kesatuan utuh untuk membangun daya saing dan promosi daerah.

Sebagai bagian integral dari pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan ekonomi 2011 diharapkan juga dapat memperkuat kelembagaan ekonomi yang akan tercermin pada:

1. Peningkatan kualitas pertumbuhan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik pada tahun 2011 diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin.

2. Peningkatan produktifitas daerah



Sumber pertumbuhan harus diarahkan tidak hanya bertumpu pada akumulasi modal tetapi juga harus merupakan kontribusi produktifitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan produktifitas daerah yang meningkat akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*).

3. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah.

Pada sisi produksi, penguatan sektor-sektor ekonomi akan merupakan sumber pertumbuhan yang beragam dan memperkuat basis perekonomian daerah. Pada sisi pembiayaan, kekuatan ekonomi daerah harus didukung oleh berkembangnya diversifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangun. Stimulus fiskal melalui APBD/APBN harus berkembang seiring dengan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya. Peranan investasi swasta dan masyarakat serta peranan lembaga-lembaga keuangan harus juga ditumbuhkembangkan sebagai pilar penting bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam periode mendatang, kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu elemen strategis kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk lebih dapat memberikan stimulus fiskal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan pengelolaan anggaran diarahkan pada upaya pencapaian pengelolaan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*). Fiscal sustainability harus dapat menjamin terwujudnya ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang serta tumbuhnya produktifitas sektor-sektor riil yang dapat menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan (*economic sustainability*).

Kebijakan anggaran sedapat mungkin dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan menghindari terjadinya defisit anggaran dengan mengedepankan keseimbangan rasio pendapatan dan belanja atau menargetkan surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan bagi pembentukan dana cadangan untuk membiayai program-program strategis multi years. Pengalaman tahun 2010 dengan terjadinya defisit anggaran melebihi batas defisit yang rasional atau mencapai kurang lebih 12% merupakan kinerja terburuk dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango sejak dibentuk tahun 2003.

E. Prioritas Pembangunan Tahun 2011

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 diarahkan pada 3 sektor strategis sesuai dengan kerangka pembangunan jangka menengah pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, pemerataan pelayanan kesehatan serta



penyediaan prasarana sarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Sedangkan Konsep Program Unggulan Kabupaten Bone Bolango ke depan lebih mempertimbangkan kondisi potensi wilayah dan dan zona yang bersifat produktif, memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) kepada optimalisasi dan peningkatan produktifitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Proyeksi program Unggulan Daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Pengembangan Pariwisata Daerah;
3. Pengembangan Usaha Pertanian dan Perikanan;
4. Pengembangan Usaha Industri Berbasis Kawasan (Produk Unggulan Kabupaten)

Keempat program unggulan ini diharapkan mampu merubah kondisi perekonomian daerah, penguatan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan potensi sumber daya alam yang tersedia. Disamping itu pula program unggulan tersebut memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja melalui penyediaan lapangan kerja yang berkesesuaian dengan kompetensi sumber daya yang ada. Satu hal yang sangat penting dan perlu perhatian kita adalah bagaimana peran sektor – sekteoor tersebut melalui program unggulan ini, mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat Pendapat Asli Daerah. Sehingga secara bertahap peningkatan produktivitas masyarakat akan merubah kondisi dari sifat ketergantungan menjadi masyarakat yang produktif mandiri.

Berdasarkan pertimbangan pencapaian tujuan nasional dalam RKP Tahun 2011 dan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD serta isu-isu strategis, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Tahun 2011, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas dan aksesibilitas wilayah
3. Peningkatan dan penciptaan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata dan sektor unggulan lainnya
4. Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah.
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
7. Penataan struktur, manajemen, ketatalaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
8. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam kerangka penegakkan supremasi hukum.



Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir dan daya ciptanya. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan, menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, serta bergizi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah merupakan salah satu prioritas pembangunan tahun 2011 dan merupakan agenda kedua pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 – 2015. Prioritas ini lebih diarahkan kepada sektor pendidikan yakni peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu dengan strategi Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan dan Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Sedangkan untuk bidang kesehatan lebih diarahkan pada pemerataan pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara adil dan merata sampai kedaerah terpencil dan melaksanakan program penyelenggaraan Kabupaten / Kota sehat sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas dan aksesibilitas wilayah

Sektor sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial budaya serta persatuan dan kesatuan, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti air minum, pembangkit listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sarana dan prasarana lainnya, seperti jalan, jembatan dan pemukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi, baik untuk



mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian maupun sosial. Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas dan aksesibilitas wilayah adalah diprioritaskan pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar yang Berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian, Dengan melihat beberapa sasaran tersebut diatas, maka diambil beberapa strategi diantaranya adalah Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan, dan Penataan pusat-pusat kawasan sebagai basis pertumbuhan wilayah. Pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat dengan memperhatikan pola pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya air yang berkelanjutan

Peningkatan dan penciptaan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata dan sektor unggulan lainnya

Sektor Parawisata adalah merupakan salah satu unggulan dari kabupaten Bone Bolango dan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang pendapatan asli daerah olehnya itu penataan sektor parawisata sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk pengembangannya, kedepan dibutuhkan satu masterplan parawisata Bone Bolango secara menyeluruh yang menggambarkan seluruh potensi yang dapat dikembangkan sehingga memperoleh hasil dan pengelolaan yang lebih baik dari sebelumnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan dampak sosial budaya yang ditimbulkan oleh pengembangan sektor parawisata tersebut, disamping itu penataan sektor unggulan lainnya dengan membentuk suatu kawasan sektor unggulan seperti kerajinan dengan membentuk suatu kawasan produksi sebagai ciri khas potensi daerah. Adapun sasaran Pembangunan Kabupaten Bone Bolango adalah Meningkatnya peran dan fungsi wilayah kawasan guna pengembangan pariwisata daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah serta pelestarian budaya daerah dengan strategi Pengembangan objek-objek wisata daerah dan Pengembangan manajemen kepariwisataan daerah.



Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang rata-rata masih hidup dibawah garis kemiskinan menimbulkan berbagai aspek dan permasalahan social lainnya yang membutuhkan peranan yang penting bagi pemerintah daerah, olehnya itu sangat dibutuhkan suatu program perlindungan social dalam peningkatan taraf hidup masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai tindaklanjut dari INPRES nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka dilaksanakan program perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender dengan sasaran Penyetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Manula serta Meningkatnya kualitas hidup, peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan anak dan manula. Strategi yang dilakukan adalah Mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan dan Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan anak dan manula

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan lokal adalah merupakan salah satu prioritas pembanguan daerah Kabupaten Bone Bolango dengan mengacu pada beberapa sasaran diantaranya adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan dengan menetapkan strategi berupa pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui strategi pembangunan tidak seimbang dan pengembangan desa mandiri, produktif dan berdaya saing. Strategis pembangunan ekonomi lokal Kabupaten Bone Bolango untuk lima tahun kedepan, diarahkan untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri kecil dan menengah, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata. Strategi ini dilaksanakan berdasarkan karakteristik wilayah sehingga pengembangan ekonomi kerakyatan lebih terfokus dan terarah pada suatu kawasan produksi sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah.



Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber daya alam adalah merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung pada keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan SDA ini pemerintah daerah menentukan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, dengan strategi Pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan dan Peningkatan manajemen Penanggulangan Bencana Alam

Penataan struktur, manajemen, ketatalaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Prioritas ini ditujukan untuk mengevaluasi fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka penataan organisasi pemerintah daerah guna menciptakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran dan fungsi yang tepat, responsive, berkompoten dan profesional dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, prioritas ini juga bertujuan untuk melaksanakan restrukturisasi secara bertahap. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan koordinasi, kinerja, efisiensi serta menajamkan gerak SKPD guna mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif untuk kejelasan tugas dan fungsi tiap instansi tanpa adanya tumpang tindih. Restrukturisasi ini dapat berupa pemecahan atau penggabungan unit kerja serta pengurangan atau penambahan posisi-posisi struktural.

Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah ditujukan pada pembangunan tatanan pemerintahan yang semakin bersih dan makin berwibawa (*clean government and good governance*), dengan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah melalui transparansi, partisipasi dan memperkuat akuntabilitas, membangun profesionalisme aparatur, serta meminimalisir campur tangan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menindaklanjuti secara cepat dan tepat permasalahan penetapan dan penataan tapal batas wilayah kabupaten, baik dalam wilayah Provinsi Gorontalo maupun wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara.



Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, maka prioritas ini juga diarahkan untuk menciptakan penguatan dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan kelembagaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai langkah awal pelimpahan kewenangan tersebut, maka pemerintahan desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang didahului dengan penyusunan rencana pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan desa dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang ketentuan dan pengelolaannya di atur dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007.

Secara umum kualitas SDM aparatur belum dapat menunjang kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh praktek manajemen kepegawaian yang sepenuhnya belum menerapkan sistem merit, mulai dari rekrutmen, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Oleh karena itu, prioritas ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem yang selama ini digunakan melalui penerapan sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan kompetitif, serta berbasis kompetensi; penyusunan kebijakan tentang standar kompetensi; sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat; serta penyempurnaan sistem penggajian dan sistem pensiun yang layak, adil dan berbasis kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, prioritas ini diarahkan untuk pengembangan layanan publik yang tidak diskriminatif serta berorientasi kebutuhan masyarakat (*customer oriented*) dan tidak semata-mata untuk kepentingan kelompok tertentu.

Disamping itu, guna meningkatkan transparansi dan mutu pelayanan, dilaksanakan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi, penerapan e-government serta penataan dokumen/arsip daerah. Melalui prioritas ini, peningkatan pelayanan public dilakukan melalui penciptaan regulasi daerah yang mendukung berlangsungnya efektifitas dan efisiensi layanan public serta menstimulir



tumbuhnya berbagai aktivitas social ekonomi masyarakat, serta penyediaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana layanan publik, pengembangan pelayanan terpadu satu pintu dan pembentukan Badan Layanan Umum. Peningkatan kualitas layanan public dapat dilaksanakan juga melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik pada semua unit penyelenggaraan pemerintahan.

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam kerangka penegakkan supremasi hukum

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dicapai melalui upaya penindakan atas praktik KKN secara tegas dan tidak pandang bulu melalui jalur hukum dan pencegahan terjadinya praktik KKN melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke penjara saja, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta negara dan aset negara yang dikorupsikan misalnya tuntutan ganti rugi (TGR). Selain upaya penegakkan hukum, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Upaya pencegahan ini akan dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan penegakkan sistem integritas aparatur melalui: pemantapan kebijakan pengawasan, peningkatan efektivitas sistem pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan daerah, pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas, dan pembatasan konflik kepentingan. Upaya ini harus disertai dengan penerapan mekanisme *reward and punishment* yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah efektivitas pengawasan aparatur daerah, baik melalui pengawasan internal, eksternal dan lebih khusus lagi adalah pengawasan masyarakat.

Dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif, melakukan penataan kembali sistem dan manajemen pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, memperbaiki sistem evaluasi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan proses penyediaan barang/jasa



secara transparan, terbuka dan akuntabel, menjalin kerjasama pembangunan serta pengembangan jaringan informasi antar daerah, menciptakan Aparatur Daerah yang profesional, memiliki kemampuan inovatif, kreatif dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier, menginternalisasikan norma dan etika pemerintahan serta penegakan disiplin aparatur berdasarkan prestasi kerja, serta mengembangkan penelitian dan IPTEK daerah.

Dalam kerangka penegakkan supremasi hukum, prioritas ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran hukum dan penanaman nilai nilai demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, persamaan hak, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi dengan mengembangkan budaya hukum pada semua jajaran aparatur pemerintahan dan semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam penegakan supremasi hukum.

Upaya penegakkan supremasi hokum dilaksanakan juga melalui pelaksanaan penegakan regulasi daerah dan praktek yang bersifat tidak diskriminatif secara konsisten dengan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan KKN serta pemberian sanksi bagi aparatur daerah yang melakukan tindakan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk lebih menjamin kepastian hukum, serta keadilan dan kebenaran dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, dilaksanakan melalui pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum baik kepada aparatur daerah maupun kepada masyarakat dalam rangka penciptaan kondisi sosial politik yang kondusif serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011
Kabupaten Bone Bolango

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Nama Program	SKPD Penanggungjawab
	Penataan struktur, manajemen, ketatalaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Terlaksananya Restrukturi-sasi organisasi pemerintah daerah secara bertahap	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Sekretariat Daerah
		Terciptanya penguatan dan peningkatan kapasitas ser-ta pemberdayaan kelembagaan pemerintah kecamatan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	



		tan dan desa/kelurahan	Dalam Membangun Desa		
		Tertatanya system rekrutmen, promosi dan mutasi, diklat, penilaian kinerja serta penggajian dan pensiun	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Badan Kepegawaian dan Diklat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Daerah	Sekertariat Daerah	
			Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
			Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		
			Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		
				KPPT	
				Sekertariat DPRD	
	Penataan struktur, manajemen, ketatalaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat	Program Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	KPPT	
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekertariat DPRD
				Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa	BAKOMINFO
				Prog. Perbaikan sistem administrasi kearsipan	
				Program kerjasama informasi dengan mas media	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh SKPD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
					Program Peningkatan



			Disiplin Aparatur	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			Program Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparat	
				Badan Kepegawaian dan Diklat
Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam kerangka penegakkan supremasi hukum	Meningkatnya efektivitas pengawasan aparatur daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Daerah	
	Prosentase tingkat validitas dan keakuratan data dan informasi sebesar 50%	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Inspektorat Daerah BAPPEDA	
		Program Pengembangan Data dan Informasi		
	Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebesar 50%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	
	Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang ekonomi sebesar 60%	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
	Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang social budaya sebesar 60%	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		
	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan yang tepat waktu sebesar 50%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Tercapainya prosentase	Program Pengembangan	BAPPEDA		



ketersediaan dokumen gambaran data dan informasi spesifik daerah dan kecamatan sebesar 100%	Data/Informasi Statistik Daerah	
Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah sebesar 25%	Program Kerjasama Pembangunan	BAPPEDA
Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah sebesar 25% Terlaksananya penataan kembali sistem dan manajemen pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Terlaksananya upaya pengembangan kesadaran hukum dan penanaman nilai nilai demokratis	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Kesbangpol dan Linmas
Terlaksananya upaya pengembangan kesadaran hukum dan penanaman nilai nilai demokratis	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kantor SATPOL PP
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol dan Linmas
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bagian Kesra Setda
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesbangpol dan Linmas
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kantor SATPOL PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Badan Kesbangpol dan Linmas



	Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka penegakan supremasi hukum	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kantor SATPOL PP
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	BNK
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kantor SATPOL PP
		Program Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Badan Narkotika Kabupaten
		Program Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	
		Program Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	BNK
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	
		Program Penetaan Peraturan Perundang – undangan	
		Program Upaya Pencegahan	Bagian Hukum Setda



			Penyalahgunaan Narkoba Program Penetaan Peratur-an Perundang - undangan Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Bagian Hukum Setda Dinas Pendidikan
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan	Tercapainya APM SD 100%, SMP 75%, SMA 50% serta APK SD 110%, SMP 90% dan SMA 75%	Program Pendidikan anak Usia Dini	Program Pendidikan Menengah	Bagian Hukum Setda Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
			Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD Tota Kabila
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
	Penurunan angka	Program Pengawasan	Dinas	



		kematian bayi 20/1000 KLH, Penurunan Kematian Ibu Melahirkan 300/ 100.000 KLH serta penurunan angka gizi buruk balita 1,05%	dan Obat Dan Makanan	Kesehatan
			Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Toto Kabila
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
			Program Standarisasi Pelayanan kesehatan	RSUD Toto Kabila
			Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan RSUD Toto Kabila RSUD Tombulilato
	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan	Penurunan angka kematian bayi 20/1000 KLH, Penurunan Kematian Ibu Melahirkan 300/ 100.000 KLH serta penurunan angka gizi buruk balita 1,05%	Program Pengadaan,Peningkatan Kesehatan Anak Balita	Dinas Kesehatan RSUD Toto Kabila
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	RSUD Tombulilato
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Toto Kabila



			<p>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p>	
			<p>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata</p>	
			<p>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata</p> <p>Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda</p>	
			<p>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit</p>	<p>RSUD Tombulilato</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p>



		Meningkatnya upaya pembinaan pemuda sebanyak 12 kelompok dan peningkatan prestasi olahraga di 6 cabang olahraga	<p>Mata</p> <p>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata</p> <p>Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda</p> <p>Program Peningkatan peran serta kepemudaan</p>	
		Meningkatkan minat baca masyarakat 3 %	<p>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</p> <p>Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga</p>	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Kantor Perpustakaan dan Arsip</p>
	<p>Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan</p> <p>Peningkatan upaya</p>	<p>Meningkatnya upaya pembinaan pemuda sebanyak 12 kelompok dan peningkatan prestasi olahraga di 6 cabang olahraga</p> <p>Meningkatkan minat baca masyarakat 3 %</p>	<p>Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga</p> <p>Program Pengembangan Budaya Baca Dana Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</p>	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Kantor Perpustakaan dan Arsip</p>



<p>perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender</p>		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utama gender dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	Tercapainya Persentase Peran Perempuan dalam Jabatan Publik sebesar 7%	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	<p>Tercapainya Persentase Peran Perempuan dalam Jabatan Publik sebesar 7%</p> <p>Tercapainya Persentase Peran Perempuan dalam Jabatan Publik sebesar 7%</p> <p>Tercapainya Persentase Peran Perempuan dalam Jabatan Publik sebesar 7%</p>	Program Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB



			Program kesehatan reproduksi remaja	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender	Tercapainya Persentase Peran Perempuan dalam Jabatan Publik sebesar 7%		Program pelayanan alat kontrasepsi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri	
			Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling RR	
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
Peningkatan upaya perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya persentase pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 10%		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Dinas Sosial
			Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
			Program Pembinaan Para Penyandang Trauma	
			Program Pembinaan eks penyakit social	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang mobilitas dan aksesibilitas wilayah.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PU
			Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Dinas PU



		Meningkatnya upaya pemanfaatan sumberdaya air secara lestari dan berkelanjutan	Program Pengembangan Kinerja Air Minum Perkuatan Tebing dan Normalisasi Sungai		
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang mobilitas dan aksesibilitas wilayah.		Meningkatnya upaya pemanfaatan sumberdaya air secara lestari dan berkelanjutan	Pembangunan / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas PU	
		Meningkatnya kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	
			Program Pengendalian Dan Pengamanan lalu Lintas		
		Tertatanya pusat-pusat pemukiman dan kawasan sebagai basis pertumbuhan wilayah	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Cepat Tumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		BAPPEDA
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Dinas PU			
	Program Pengelolaan Lingkungan				
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah.	Menurunnya angka pengangguran dan terciptanya kesempatan kerja	Program Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
	Meningkatnya mutu	Program Peningkatan	Dinas Pertanian,		



		penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Kesejahteraan Petani	Perkebunan dan KP
			Program Pemberdayaan penyuluhan pertanian/Perkebunan lapangan	BP4K
		Terbentuknya desa mandiri pangan di 1 lokasi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan KP
		Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
		Meningkatnya produktivitas lahan pertanian dan prasarana Jalan Usaha Tani serta meningkatnya kualitas dan cakupan layanan irigasi	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah		Peningkatan inovasi teknologi Pertanian Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah pertanian dan Perkebunan dan Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan KP
			Program Peningkatan Penerapan Tek. Peternakan	Dinas Peternakan dan Keswan
			Program Kegiatan penyuluhan penerapan tek. Pertanian/perkebunan tepat guna	BP4K
		Meningkatnya sarana pembibitan ternak	Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Keswan
		Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
		Meningkatnya pemasaran hasil peternakan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
		Meningkatnya pembangunan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran	Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mampu mengawasi dan mengendalikan sumberdaya perikanan	Program Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	



	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat yang ditunjang oleh keterampilan pembudidaya	Program pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah	Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Koperindag dan PM
	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah	Terlaksananya pengawasan distribusi barang dan jasa	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Koperindag dan PM
		Terbangunnya sarana perdagangan masyarakat	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperindag dan PM
		Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan pembinaan di bidang perdagangan	Program Peningkatan Kerja sama Perdagangan Internasional	Dinas Koperindag dan PM
		Meningkatnya koordinasi, kerjasama dan pembinaan di bidang perdagangan	Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor	
		Tersedianya dukungan penguatan sentra sentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil	Program pembinaan kaki lima dan asongan	
			Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	
	Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya dukungan penguatan sentra sentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Koperindag dan PM
	Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	Dinas Kehutanan
			Program penataan struktur industri	
			Program Pengembangan sentra - sentra Industri	
			Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	
		Memperbaiki system	Program Pemanfaatan	



		pengelolaan hutan	Potensi Sumber Daya Hutan		
<p>Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</p>		Memperbaiki system pengelolaan hutan	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Kehutanan	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan	Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam	Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan	Peningkatan Pengendalian Polusi	Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota	
<p>Pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>Peningkatan dan penciptaan upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata dan sektor unggulan lainnya</p>		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Tata Kota	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan dan energi	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup		Dinas Pertambangan dan Energi
			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan dan energi	Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi BAPPEDA
			Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	
			Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	Badan Kesbangpol dan Linmas
			Berkembangnya objek-objek wisata daerah	Program Peningkatan Pengembangan Daerah Rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pengembangan	Dinas



			Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
	Peningkatan dan penciptaan upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pariwisata dan sektor unggulan lainnya	Berkembangnya objek-objek wisata daerah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Berkembangnya objek wisata budaya	Program Peningkatan Kemitraan Pariwisata	
			Program pengelolaan keragaman Budaya	



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan Salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan atas dasar asas desentralisasi fiskal. Kebijakan pengalokasian pembiayaan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan secara umum di tetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) sesuai dengan urutan prioritas berdasarkan arah kebijakan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bone Bolango pada hakekatnya dikelola berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2011 pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat/ekonomi daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah karena merupakan motor penggerak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Setiap pendapatan daerah harus tercatat dalam dokumen APBD dimana anggaran ini setiap tahunnya akan menjadi pokok pembahasan pertama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Untuk itu, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango tahun 2011 perlu ditampilkan kondisi kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2011.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa "Penerimaan Daerah dalam rangka Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan". Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih



perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jadi, didasarkan pada penjelasan di atas, ada 3 (tiga) sumber pendapatan daerah: (1) PAD yang merupakan pencerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya, seperti pajak dan retribusi daerah, dll, (2) dana perimbangan, yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK); dan (3) lain-lain pendapatan, berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengambil beberapa kebijakan dalam meningkatkan penerimaan daerah antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi. Akan tetapi kebijakan eksetensifikasi berupa penciptaan sumber pajak dan retribusi daerah baru dilaksanakan dalam kerangka mencegah timbulnya distorsi ekonomi. Oleh karena itu evaluasi terhadap pungutan retribusi daerah yang menghambat perkembangan ekonomi masih relevan. Hal ini sebagai upaya peningkatan mobilitas ekonomi masyarakat dan mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi dengan harapan agar dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bone Bolango. Selain itu pembenahan sarana dan prasarana terus diupayakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan masyarakat antara lain penerapan sistem komputerisasi dan lain-lain.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar pertumbuhan ekonomi seluruh daerah sangat ditopang oleh sisi konsumsi dan belanja pemerintah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah melalui instrument APBD. Karena itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pencerminan hasil pelaksanaan pembangunan, maka peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian penting dari APBD merupakan hal yang harus dikedepankan. Upaya peningkatan pendapatan dimaksud dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah Wajib Pajak, penyesuaian tarif, penyempurnaan terhadap aturan-aturan pelaksanaan, perhitungan dan pemungutan pajak, dan sosialisasi tentang peraturan pajak dan retribusi. Sedangkan ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan penambahan jenis pajak, retribusi dan sumber PAD lainnya.



Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan proyeksi pendapatan dengan memperhatikan pos-pos sumber penerimaan baik itu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dari berbagai macam sumber penerimaan yang setiap tahun. Sumber penerimaan yang memiliki trend kenaikan setiap tahunnya dapat menjadi sumber utama pendapatan, sedangkan terhadap sumber pendapatan daerah yang berfluktuasi harus dilakukan evaluasi dan pemecahannya serta penetapan langkah-langkah strategis untuk penciptaan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk merealisasikan pencapaian target pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Melaksanakan intensifikasi Pendapatan Daerah dengan :
 - ❖ Memfasilitasi penyesuaian Perda-Perda Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - ❖ Meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan pemungutan sumber-sumber PAD.
- b. Melaksanakan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan :
 - ❖ Mengidentifikasi dan mengkaji obyek-obyek yang berpotensi pendapatan daerah.
 - ❖ Melakukan pendataan subyek dan obyek baru Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - ❖ Membangun prasarana dan sarana sebagai wadah pemerolehan pendapatan, antara lain maksimalisasi obyek wisata, pengembangan kawasan wisata daerah, pembangunan terminal dan sebagainya.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan perhitungan akhir Tahun Anggaran 2011, realisasi pendapatan daerah yakni sebesar Rp. 445.257.281.656,33 atau 101,28% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 439.647.975.952,00. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 15.645.914.574,33 yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 1.368.706.120,00, hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.802.705.101,00. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 4.474.503.353,33.
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 318.637.523.275,00 yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak / bukan pajak sebesar Rp. 23.921.816.275,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 267.662.207.000,00. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 27.053.500.000,00.



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 110.973.843.807,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 80.520.000,00, Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan bagi hasil dari daerah lainnya sebesar Rp. 6.044.287.367,00, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp. 104.849.036.440,00.

Selengkapnya target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011

N O	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,074,161,153.00	15,645,914,574.33	141.28
a	Pendapatan Pajak Daerah	1,593,479,264.00	1,368,706,120.00	85.89
b	Hasil Retribusi Daerah	4,167,860,002.00	2,770,503,810.00	66.47
c	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,312,821,887.00	11,506,704,644.00	216.58
2	DANA PERIMBANGAN	318,644,357,609.00	318,637,523,275.00	100.00
a	Dana bagi Hasil Pajak	23,504,669,384.00	23,507,907,669.00	100.01
b	Dana bagi hasil Sumber daya alam	228,234,225.00	413,908,606.00	181.35
b	Dana Alokasi Umum	267,849,954,000.00	267,662,207,000.00	99.93
c	Dana Alokasi Khusus	27,061,500,000.00	27,053,500,000.00	99.97
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109,929,457,190.00	110,973,843,807.00	100.95
a	Pendapatan Hibah	80,520,000.00	80,520,000.00	100.00
b	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,000,000,000.00	6,044,287,367.00	120.89
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104,848,937,190.00	104,849,036,440.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN	439,647,975,952.00	438,224,893,398.00	99.68

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 (Unaudited)

3. Permasalahan dan Solusi.

Dari **Tabel 3.1** diketahui bahwa total realisasi pendapatan melampaui mencapai 101,28 %, namun ada beberapa pos yang tidak mencapai target, walaupun tertutupi oleh beberapa pos yang mengalami pelampauan penerimaan. Rendahnya persentase realisasi pendapatan dipengaruhi oleh pos pendapatan pajak daerah yang masih rendah dengan realisasi hanya mencapai



85,89 %. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurang tepatnya kajian terhadap obyek-obyek potensi pendapatan daerah, kurangnya prasarana dan sarana penunjang dalam hal pemerolehan pendapatan, masih rendahnya nilai transaksi tanah dan bangunan sehingga tidak dapat diperhitungkan pada pengenaan biaya BPHTB, serta masih rendahnya pemahaman pengguna jasa terhadap pajak daerah.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pendapatan tersebut khususnya pajak daerah, hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi serta menentukan langkah-langkah strategis pemecahan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara bertahap juga berupaya untuk meningkatkan target penerimaan PAD dan merealisasikan semua target yang telah ditetapkan. Namun seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerimaan pendapatan dari sektor PAD jika dibandingkan dengan daerah lain.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran membayar pajak sebagian masyarakat.
- c. Adanya beberapa unit usaha yang untuk sementara tidak berproduksi karena perbaikan manajemen, renovasi, dan lain-lain.
- d. Masih rendahnya kinerja aparat pemungut/penagih pajak/retribusi.
- e. Keengganan para pengusaha/obyek pajak untuk dinaikan pajaknya dengan alasan biaya operasional perusahaan sangat tinggi.
- f. Kurang efektifnya pemberlakuan sistim bill pada obyek pajak.
- g. Masih adanya obyek pajak/pelaku usaha yang mengeluarkan biaya-biaya lain sehingga menimbulkan biaya tinggi.
- h. Adanya aturan-aturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan utamanya mengenai tarif pengenaan pajak dan retribusi, sehingga perlu dilakukan revisi atau penyesuaian.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah pemecahan antara lain :

- a. Perlu dilakukan kaji ulang potensi dan target pendapatan asli daerah. Kajian tersebut dibutuhkan untuk mendata potensi pendapatan daerah, menyusun payung hukumnya dan menetapkan target realistis pendapatan sesuai dengan kondisi faktual ekonomi daerah.
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus terus melakukan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan dengan mengundang



- stakeholders* yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan maupun sosialisasi yang dilaksanakan melalui media cetak.
- c. Bagi usaha yang tutup atau berhenti sementara aktifitas produksinya, terus dilakukan pemantauan dan pembinaan serta memberikan alternatif usaha baru.
 - d. Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada aparat pemungut pajak/retribusi secara terus menerus dalam rangka menciptakan sumber daya pelayanan yang berkualitas.
 - e. Melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak yang dikenakan dengan peningkatan tarif pajak / retribusi, bahkan sebelum dinaikkan, pihak BKAD seyogianya melakukan uji petik selama sebulan bahkan lebih agar dapat diketahui secara pasti omset produksi yang terjual dan wajib dikenakan pajak.
 - f. Karena tidak efektifnya penggunaan bill, maka DPPKAD perlu menetapkan target pembayaran rata-rata setiap bulannya berdasar hasil uji petik.
 - g. Untuk pungutan tidak resmi yang dapat menimbulkan biaya tinggi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya.
 - h. Melakukan penyesuaian atau revisi terhadap pengenaan tarif pajak/retribusi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi.
 - i. Memberikan keringanan denda pajak bagi wajib pajak.
 - j. Pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan masyarakat baik sektor perhubungan, peternakan, perikanan, perdagangan, kesehatan, pariwisata dan sektor ekonomi lainnya yang berpotensi menunjang peningkatan PAD.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, perbaikan kinerja organisasi pemerintahan, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya aparatur termasuk penerimaan pegawai baru serta pembangunan atau rehabilitasi prasarana wilayah. Peningkatan jumlah belanja pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango.

Belanja daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan,



urusan yang penanganannya dalam bagian bidang tertentu dan dikelompokkan pada belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Untuk tahun 2011 kebijakan anggaran yang ditempuh dalam pembiayaan belanja daerah yakni 51,19 % untuk belanja tidak langsung dan 48,81% belanja langsung. Tingginya presentase belanja tidak langsung tersebut disebabkan oleh tingginya belanja untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sejumlah 4.335 pegawai negeri sipil. Besaran anggaran untuk belanja langsung diarahkan untuk mendukung komitmen Pemerintah Daerah pada beberapa program prioritas Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2011 yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pengembangan Usaha Pertanian, Pengembangan Usaha Perikanan, Peternakan, dan Pengembangan Sektor Pariwisata serta Pembangunan Infrastruktur wilayah terutama dalam membuka keterisolasian daerah dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkuat perekonomian daerah guna tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akselerasi pembangunan daerah yang berbasis komoditas unggulan daerah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa belanja pengurusan urusan wajib diprioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum, yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam rangka pencapaian program dan prioritas pembangunan maka target belanja daerah (APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011) ditetapkan sebesar Rp.393.558.893.086,61, kemudian mengalami perubahan (APBD-P 2011) sebesar Rp.451.209.385.079,61. Perubahan belanja ini dipengaruhi oleh tingkat capaian realisasi pendapatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan khususnya realisasi pendapatan asli Daerah. Untuk lebih jelasnya, target dan realisasi belanja pada tahun 2011 dapat dilihat pada **tabel 3.2** berikut ini.



Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011

No.	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	237,574,564,925.00	230,671,822,348.00	97.09
1	Belanja Pegawai	209,515,419,925.00	203,319,766,917.00	97.04
	a. Gaji Dan Tunjangan	176,305,506,033.00	171,460,048,043.00	97.25
	b. Tambahan Penghasilan PNS	31,770,896,844.00	30,603,337,760.00	96.33
	c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	855,000,000.00	738,000,000.00	86.32
	d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	584,017,048.00	518,381,114.00	88.76
2	Belanja Hibah	11,864,125,000.00	11,540,000,000.00	97.27
	a. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2,714,125,000.00	2,390,000,000.00	88.06
	b. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	9,150,000,000.00	9,150,000,000.00	100
3	Belanja Bantuan Sosial	5,782,500,000.00	5,719,732,750.00	98.91
	a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	2,170,000,000.00	2,107,450,000.00	97.12
	b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	3,125,000,000.00	3,124,800,000.00	99.99
	c. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	487,500,000.00	487,482,750.00	100
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,882,000,000.00	9,766,369,506.00	98.83
	a. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	9,882,000,000.00	9,766,369,506.00	98.83
5	Belanja Tidak Terduga	530,520,000.00	325,953,175.00	61.44
	a. Belanja Tidak Terduga	530,520,000.00	325,953,175.00	61.44
B.	BELANJA LANGSUNG	213,634,820,154.61	180,969,825,963.00	84.71
		21,476,877,277.00	21,156,254,647.00	98.51
	a. Honorarium PNS	8,982,594,600.00	9,479,144,985.00	105.5
	b. Honorarium Non PNS	12,189,985,677.00	11,377,955,662.00	93.34
	c. Uang Lembur	304,297,000.00	299,154,000.00	98.31
	Belanja Barang dan Jasa	68,626,254,283.00	67,708,823,353.00	98.66
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2,971,084,769.00	2,835,951,717.00	95.45
	b. Belanja Bahan/Material	5,525,141,487.00	6,331,153,782.00	114.6
	c. Belanja Jasa Kantor	19,204,584,907.00	17,052,750,170.00	88.8
	d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,830,516,628.00	3,546,412,427.00	92.58
	e. Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,328,936,750.00	1,976,774,703.00	84.88
	f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	539,050,000.00	499,690,000.00	92.7
	g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	770,500,000.00	683,824,400.00	88.75
	h. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	354,384,000.00	262,183,000.00	73.98
	i. Belanja Makanan Dan Minuman	4,715,453,750.00	4,172,291,175.00	88.48
	j. Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	512,300,000.00	499,802,600.00	97.56
	k. Belanja Pakaian Kerja	223,664,142.00	222,968,500.00	99.69
	l. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	614,260,000.00	602,718,400.00	98.12
	m. Belanja Perjalanan Dinas	24,997,802,850.00	24,099,544,440.00	96.41
	n. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	724,007,000.00	724,002,000.00	100



	o. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	551,882,000.00	485,111,000.00	87.9
	p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	25,910,000.00	25,910,000.00	100
	q. Belanja Jasa Konsultansi	736,776,000.00	402,311,000.00	54.6
	r. Belanja Jamkesmas	0.00	3,285,424,039.00	-
	Belanja Modal	123,531,688,594.61	92,104,747,963.00	74.56
	a. Belanja Modal Pengadaan Tanah	6,407,704,000.00	2,353,213,000.00	36.72
	b. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	1,995,000,000.00	1,970,374,000.00	98.77
	c. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	6,581,690,160.00	6,468,262,800.00	98.28
	d. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	675,000,000.00	674,335,000.00	99.9
	e. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor	45,000,000.00	44,837,000.00	99.64
	f. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	175,000,000.00	0.00	0
	g. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	1,216,057,000.00	1,204,699,500.00	99.07
	h. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	712,674,750.00	706,257,250.00	99.1
	i. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	974,974,859.00	921,164,955.00	94.48
	j. Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,070,985,371.00	2,927,111,862.00	95.32
	k. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,415,324,900.00	1,393,966,010.00	98.49
	l. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	63,125,000.00	60,380,750.00	95.65
	m. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,450,000.00	1,450,000.00	100
	n. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	378,812,500.00	328,748,000.00	86.78
	o. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	468,959,110.00	446,737,000.00	95.26
	p. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	75,529,000.00	60,804,000.00	80.5
	q. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	4,428,117,260.00	4,073,549,450.00	91.99
	r. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6,814,261,217.39	6,564,504,389.00	96.33
	s. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25,732,830,370.96	22,521,859,276.00	87.52
	t. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3,399,537,031.00	2,682,413,350.00	78.91
	u. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20,719,002,489.00	16,382,385,946.00	79.07
	v. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	766,750,715.00	516,949,609.00	67.42
	w. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	31,553,576,749.00	13,977,412,684.00	44.3
	x. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4,731,876,162.26	4,713,708,182.00	99.62
	y. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	364,540,000.00	350,214,000.00	96.07
	z. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	763,909,950.00	759,409,950.00	99.41
	SURPLUS / DEFISIT	(11,561,409,127.61)	33,615,633,345.33	290.8

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 (Unaudited)



3. Permasalahan dan Solusi.

Kenyataan menunjukkan bahwa capaian target belanja terhadap realisasi belanja hanya mencapai 91,23 % yang mencerminkan kinerja penggunaan anggaran yang kurang efisien. Dari keseluruhan rencana kegiatan telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang capaian realisasi tidak mencapai target, antara lain Belanja Modal Pengadaan Tanah dengan realisasi 36.72%, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan dengan realisasi 44.30%, Belanja Jasa Konsultansi dengan realisasi 54.60%, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon dengan realisasi 67.42, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur dengan realisasi 80.50%, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH dengan realisasi 86.32%, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS dengan realisasi 87.90 % dan Belanja Jasa Kantor dengan realisasi 88.80 %.

Adanya beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di Tahun anggaran 2011 disamping adanya capaian upaya penghematan anggaran pada item-item kegiatan/program tanpa mengurangi sasaran dan tujuan dari kegiatan yang direncanakan. Realisasi beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan utamanya disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, serta adanya beberapa kegiatan pengadaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan yang diluncurkan pada tahun 2012.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

NO.	U R A I A N	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	PENDAPATAN	439,647,975,952.00	445,257,281,656.33	101.28
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,074,161,153.00	15,645,914,574.33	141.28
	a. Pendapatan Pajak Daerah	1,593,479,264.00	1,368,706,120.00	85.89
	b. Hasil Retribusi Daerah	4,167,860,002.00	9,802,705,101.00	235.20
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,312,821,887.00	4,474,503,353.33	84.22
2	DANA PERIMBANGAN	318,644,357,609.00	318,637,523,275.00	100.00
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,732,903,609.00	23,921,816,275.00	100.80
	b. Dana Alokasi Umum	267,849,954,000.00	267,662,207,000.00	99.93
	c. Dana Alokasi Khusus	27,061,500,000.00	27,053,500,000.00	99.97
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109,929,457,190.00	110,973,843,807.00	100.95
	a. Pendapatan Hibah	80,520,000.00	80,520,000.00	100.00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,000,000,000.00	6,044,287,367.00	120.89
	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104,848,937,190.00	104,849,036,440.00	100.00
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	237,574,564,925.00	230,671,822,348.00	97.09
1	Belanja Pegawai	209,515,419,925.00	203,319,766,917.00	97.04
	a. Gaji Dan Tunjangan	176,305,506,033.00	171,460,048,043.00	97.25



	b. Tambahan Penghasilan PNS	31,770,896,844.00	30,603,337,760.00	96.33
	c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	855,000,000.00	738,000,000.00	86.32
	d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	584,017,048.00	518,381,114.00	88.76
	2 Belanja Hibah	11,864,125,000.00	11,540,000,000.00	97.27
	a. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2,714,125,000.00	2,390,000,000.00	88.06
	b. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	9,150,000,000.00	9,150,000,000.00	100.00
	3 Belanja Bantuan Sosial	5,782,500,000.00	5,719,732,750.00	98.91
	a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	2,170,000,000.00	2,107,450,000.00	97.12
	b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	3,125,000,000.00	3,124,800,000.00	99.99
	c. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	487,500,000.00	487,482,750.00	100.00
	4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9,882,000,000.00	9,766,369,506.00	98.83
	a. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	9,882,000,000.00	9,766,369,506.00	98.83
	5 Belanja Tidak Terduga	530,520,000.00	325,953,175.00	61.44
	a. Belanja Tidak Terduga	530,520,000.00	325,953,175.00	61.44
	C. BELANJA LANGSUNG	213,634,820,154.61	180,969,825,963.00	84.71
	Belanja Pegawai	21,476,877,277.00	21,156,254,647.00	98.51
	a. Honorarium PNS	8,982,594,600.00	9,479,144,985.00	105.53
	b. Honorarium Non PNS	12,189,985,677.00	11,377,955,662.00	93.34
	c. Uang Lembur	304,297,000.00	299,154,000.00	98.31
	Belanja Barang dan Jasa	68,626,254,283.00	67,708,823,353.00	98.66
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2,971,084,769.00	2,835,951,717.00	95.45
	b. Belanja Bahan/Material	5,525,141,487.00	6,331,153,782.00	114.59
	c. Belanja Jasa Kantor	19,204,584,907.00	17,052,750,170.00	88.80
	d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,830,516,628.00	3,546,412,427.00	92.58
	e. Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,328,936,750.00	1,976,774,703.00	84.88
	f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	539,050,000.00	499,690,000.00	92.70
	g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	770,500,000.00	683,824,400.00	88.75
	h. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	354,384,000.00	262,183,000.00	73.98
	i. Belanja Makanan Dan Minuman	4,715,453,750.00	4,172,291,175.00	88.48
	j. Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	512,300,000.00	499,802,600.00	97.56
	k. Belanja Pakaian Kerja	223,664,142.00	222,968,500.00	99.69
	l. Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	614,260,000.00	602,718,400.00	98.12
	m. Belanja Perjalanan Dinas	24,997,802,850.00	24,099,544,440.00	96.41
	n. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	724,007,000.00	724,002,000.00	100.00
	o. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	551,882,000.00	485,111,000.00	87.90
	p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	25,910,000.00	25,910,000.00	100.00
	q. Belanja Jasa Konsultansi	736,776,000.00	402,311,000.00	54.60
	r. Belanja Jamkesmas	0.00	3,285,424,039.00	-
	Belanja Modal	123,531,688,594.61	92,104,747,963.00	74.56
	a. Belanja Modal Pengadaan Tanah	6,407,704,000.00	2,353,213,000.00	36.72
	b. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	1,995,000,000.00	1,970,374,000.00	98.77



c.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	6,581,690,160.00	6,468,262,800.00	98.28
d.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	675,000,000.00	674,335,000.00	99.90
e.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor	45,000,000.00	44,837,000.00	99.64
f.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	175,000,000.00	0.00	0.00
g.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	1,216,057,000.00	1,204,699,500.00	99.07
h.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	712,674,750.00	706,257,250.00	99.10
i.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	974,974,859.00	921,164,955.00	94.48
j.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,070,985,371.00	2,927,111,862.00	95.32
k.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,415,324,900.00	1,393,966,010.00	98.49
l.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	63,125,000.00	60,380,750.00	95.65
m.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00
n.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	378,812,500.00	328,748,000.00	86.78
o.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	468,959,110.00	446,737,000.00	95.26
p.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	75,529,000.00	60,804,000.00	80.50
q.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	4,428,117,260.00	4,073,549,450.00	91.99
r.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6,814,261,217.39	6,564,504,389.00	96.33
s.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	25,732,830,370.96	22,521,859,276.00	87.52
t.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3,399,537,031.00	2,682,413,350.00	78.91
u.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	20,719,002,489.00	16,382,385,946.00	79.07
v.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	766,750,715.00	516,949,609.00	67.42
w.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	31,553,576,749.00	13,977,412,684.00	44.30
x.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4,731,876,162.26	4,713,708,182.00	99.62
y.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	364,540,000.00	350,214,000.00	96.07
z.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	763,909,950.00	759,409,950.00	99.41
	SURPLUS / DEFISIT	(11,561,409,127.61)	33,615,633,345.33	-290.76
D.	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	19,499,059,071.61	19,499,059,071.61	100.00
a.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	3,264,526,270.96	3,264,526,270.96	100.00
b.	Kegiatan Lanjutan	16,234,532,800.65	16,234,532,800.65	100.00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,843,149,944.00	4,199,601,387.00	86.71
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,200,000,000.00	2,000,000,000.00	90.91
b.	Pembayaran Pokok Utang	2,643,149,944.00	2,199,601,387.00	83.22
	PEMBIAYAAN NETTO	14,655,909,127.61	15,299,457,684.61	104.39
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	3,094,500,000.00	48,915,091,029.94	1580.71

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bone Bolang Tahun 2011 (Unaudited)



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan:

1. Urusan Wajib Pendidikan

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Pada urusan wajib pendidikan mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 39.092.643.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 32.087.653.747,- atau 82,1%.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Dinas Pendidikan adalah:

Jumlah Program : 6 Program

Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 14 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 8 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 4 Keluaran

Jumlah keluaran yang melebihi target : 2 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TAR-GET	REALI SASI
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun a. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP b. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	- Jumlah Orang yang Mengikuti Prog.Paket B - Jumlah Keg yang diikuti dalam Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas	663 org 5 Keg.	406 org 5 Keg.
2.	Program Pendidikan Menengah			



3.	a. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	- Jumlah Orang yang mengikuti Prog. Paket C	250 Orang	188 Orang
	Program Pendidikan Non Formal			
	a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	- Terlaksananya Pembayaran Honor Pendidik Non Formal	1500 Orang	1225 Orang

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Terlayannya pendidikan anak usia dini melalui kegiatan Hari Anak Nasional.

2. Pendidikan wajib belajar sembilan tahun

- a. Tersedianya Ruang Kelas Baru 28 ruang untuk SD dan 3 ruang untuk SMP.
- b. Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah ruang. Terdiri dari 36 Ruang untuk SD dan 2 untuk SMP.
- c. Tersalurnya dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2011 untuk 23.986 siswa di 162 sekolah (SD, SDLB, dan SMP).
- d. Terlayannya penduduk usia sekolah mengikuti pendidikan paket A dan mengikuti ujian paket A.
- e. Terlayannya penduduk usia dalam mengikuti pendidikan paket B dan mengikuti ujian paket B.
- f. Terselenggaranya Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa.
- g. Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk 2.892 siswa SD/SDLB dan 1.947SMP.
- h. Terbangunnya perpustakaan sekolah 4 unit yang terdiri dari Perpustakaan SD 3 unit dan SMP 1 unit.
- i. Terbangunnya Ruang Lab. IPA/IPS/MAT dll untuk SMP sejumlah 6 unit yang tersebar pada 6 sekolah.
- j. Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 3 paket pada sekolah:
 - Alat praktek untuk 39 SD yang terdiri dari 3 Set



- Alat praktek untuk 26 SMP yang terdiri dari 3 Set

- k. Tersedianya buku pelajaran untuk siswa SD dan SMP, yang terdiri dari:
- 39 SD dengan jumlah 1 Paket atau 4.449 judul/buah
 - 26 SMP dengan jumlah 1 Paket atau 2650 judul/buah

3. Pendidikan Menengah

- a. Tersedianya ruang kelas baru 2 ruang
- b. Tersedianya perlengkapan sekolah 2 set/buah
- c. Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah 1 ruang
- d. Terlayannya penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan paket C dan mengikuti ujian paket C sebanyak 560 siswa
- e. Tersalurnya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- f. Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah (Ujian Nasional dan Ujian Semester) sebanyak 1024 siswa

4. Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya kegiatan Hari Aksara Internasional tingkat Kabupaten

5. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- a. Terlaksananya sosialisasi sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Terseleksinya Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Terlayannya Operasional Pengawas
- c. Terlaksananya kegiatan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 600 orang

6. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya pengembangan ICT di bidang Pendidikan.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pendidikan antara lain:

1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD dan SMP tetap dipertahankan diatas 100%, sedangkan untuk APK tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2011 mencapai 48,68% sehingga masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Menurunnya Angka Putus Sekolah



- a) Untuk tingkat SD pada tahun 2010 siswa putus sekolah sejumlah 165 siswa, sedangkan untuk tahun 2011 menjadi 114 siswa.
 - b) Untuk tingkat SMP di tahun 2010 siswa putus sekolah sejumlah 36 siswa, sedangkan ditahun 2011 menjadi 28 siswa.
3. Meningkatnya angka kelulusan tingkat SD dari 88,55% ditahun 2010 menjadi 95,20%, tingkat SMP dari 72, 05% ditahun 2010 menjadi 99,40% ditahun 2011, tingkat SMA dari 92,64% ditahun 2010 menjadi 97,4% ditahun 2011, dan untuk tingkat SMK dari 99% dari tahun 2010 menjadi 100% ditahun 2011.
 4. Meningkatnya jumlah sertifikat ISO 9001:2008 untuk 2 SMK, sedangkan untuk 2 SMA mendapat sertifikat untuk kategori SKM dan PBKL.

Tabel 4.1
Perkembangan APK dan APM tingkat SD s/d SLTA
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

URAIAN	TAHUN 2011
Angka Partisipasi Murni (APM)	
1. Tingkat SD	95,34
2. Tingkat SMP	40,84
3. Tingkat SMA	30,71
Angka Partisipasi Kasar (APK)	
1. Tingkat SD	106,56
2. Tingkat SMP	51,94
3. Tingkat SMA	48,68
Angka Putus Sekolah (APS)	
1. Tingkat SD	1,3
2. Tingkat SMP	1,66
3. Tingkat SMA	0,52
Angka Buta Huruf 15-44 Thn	0,85
Angka Melek Huruf	99,15
Angka mengulang	
1. Tingkat SD/Mi	7,6
2. Tingkat SMP/Mts	1,39
3. Tingkat SMA/MA/SMK	0,31
Angka Lulusan 2011	
1. Tingkat SD/Mi	95,4
2. Tingkat SMP/Mts	99,45
3. Tingkat SMA/MA/SMK	93,68

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango



Adapun capaian perkembangan kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango hingga tahun 2011, dapat dilihat pada table 4.1.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat juga dari perkembangan jumlah anak didik, jumlah pendidik, kualitas pendidik dan sarana prasarana pendukung.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan potensi anak didik di Kabupaten Bone Bolango tahun 2010 sampai dengan 2011 Tabel 4.2

Tabel 4.2
Jumlah Murid Tingkat TK s/d SMA/MA/SMK
Kabupaten Bone Bolango Tahun Pelajaran 2010 –2011

TAHUN	Jumlah Murid pada Tingkat Pendidikan (orang)			
	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2010/2011	3,453	19,073	5,848	3,565

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Sebagian besar tenaga pendidik sudah memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk mendukung kesejahteraan pendidik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kondisi tenaga pendidik yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

Tabel 4.3
Jumlah Guru Pada Tingkat TK s/d SMA/MA/SMK
Kabupaten Bone Bolango Tahun Pelajaran 2010 –2011

TAHUN	Guru pada Tingkat Pendidikan (orang)			
	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2010-2011	351	1299	608	422

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Perkembangan indikator ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan antara tahun 2010 sampai dengan 2011 menunjukkan adanya peningkatan dari setiap jenis prasarana pendidikan. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango memang masih jauh dari memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam rangka memenuhi standar pelayanan pendidikan yang paripurna kepada anak didik, keterbatasan tersebut bukanlah merupakan suatu hambatan dalam operasionalnya.



Tabel 4.4
Kondisi Tingkat Pendidikan Guru
Pada Tingkat SD s/d SMA/MA/SMK
Kabupaten Bone Bolango Tahun Pelajaran 2009– 2011

TAHUN PELAJARAN	Tingkat Pendidikan Guru SD/MI (orang)							
	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
2010-2011	21	477	-	-	-	445	15	-
TAHUN PELAJARAN	Tingkat Pendidikan Guru SMP/MTs (orang)							
	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
2010-2011	-	35	-	-	-	480	13	-
TAHUN PELAJARAN	Tingkat Pendidikan Guru SMA/MA/SMK (orang)							
	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
2010-2011	-	-	-	-	-	357	42	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada berikut ini Tabel 4.6.

Tabel 4.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kabupaten Bone Bolango Tahun Pelajaran 2010-2011

TAHUNPELAJARAN	SARANA PENDIDIKAN (Unit)			
	TK	SD/MI	SMP/M.Ts	SMA/MA/SMK
2010/2011	124	138	39	16

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.6
Daftar Kondisi Sarana Pendidikan
Kabupaten Bone Bolango Tahun Pelajaran 2010 – 2011

No.	Sarana Pendidikan	B	RR	RB
1.	TK	252	10	6
2.	SD	746	142	17
3.	Madrasah Ibtidaiyah	32	3	3
4.	SMP	220	13	4
5.	Madrasah Tsanawiyah	26	-	-
6.	SMA	85	6	-
7.	Madrasah Aliyah	33	3	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango



Keterangan :

- B = Baik (satuan unit)
RR = Rusak Ringan (satuan unit)
RB = Rusak Berat (satuan unit)

Salah satu isu global dalam konteks otonomi daerah yang seharusnya mendapat porsi penting adalah kesiapan dan kualitas SDM di daerah. Peningkatan mutu pendidikan itu sendiri tentunya tidak lepas dari perencanaan yang matang di sektor pendidikan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah meningkatkan minat baca baik terhadap anak didik maupun masyarakat. Berikut ini perkembangan jumlah perpustakaan dan jumlah buku di Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8

Tabel 4.7
Jumlah Pembangunan Perpustakaan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Umum
Kabupaten Bone Bolango Tahun Pelajaran 2009 – 2011

TAHUN	SD (unit)	SMP (unit)	SMA (unit)	Perpus. Umum	Perpus. Keliling	Jlh
2010-2011	109	15	3	1	1	129

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Bone Bolango

Tabel 4.8
Jumlah Pengadaan Buku yang Peruntukannya
Dipisahkan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Umum
Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 – 2011

TAHUN	Untuk TingkatSD (buah)	Untuk Tingkat SMP (buah)	Untuk Tingkat SMA (buah)	Pengetahuan Umum	Lain-lain	Jumlah
2009	-	7	7	2028	-	2042
2010	-	-	-	710	-	710
2011	900	-	-	-	-	900

Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Bone Bolango

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada urusan pendidikan dilihat dari segi tiga pilar strategi pendidikan adalah :

1. Di bidang sarana dan prasarana masih terdapatnya gedung sekolah yang perlu di rehab.
2. Di bidang tenaga pendidik dan kependidikan masih ada guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan belum bersertifikasi.



3. Di bidang manajemen dan kebijakan, implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) belum terlaksana dengan baik dan peran Komite Sekolah belum maksimal.

Permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, tetapi yang lebih menonjol adalah rendahnya kualitas sumber daya pendidikan, sarana prasarana pendidikan belum memadai khususnya pada lembaga sekolah dasar, termasuk kurangnya fasilitas penunjang proses pembelajaran berupa perpustakaan, laboratorium, buku paket dan alat peraga serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang relatif rendah.

Permasalahan lainnya yang lebih Riil adalah kurangnya anggaran pendidikan yang layak untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam hal ini Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah tetap akan mengusahakan anggaran untuk pemenuhan SPM tersebut. Standar pelayanan minimal pendidikan yaitu: (1). Standar Kurikulum/Isi (2). Standar Proses Belajar Mengajar (PBM) (3). Standar Kompetensi Lulusan (4). Standar Pengelolaan Pendidikan (5). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (6). Standar Sarana Prasarana (7). Standar Pembiayaan Pendidikan (8). Standar Penilaian Pendidikan.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Melanjutkan rehabilitasi total gedung sekolah, pemenuhan peralatan laboratorium SD/SMP/SMA berbasis multimedia dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK.
2. Peningkatan kualifikasi pendidikan serta program sertifikasi guru.
3. Melakukan pelatihan kompetensi manajemen sekolah bagi para Kepala Sekolah
4. Melakukan pembinaan kepada komite sekolah dalam rangka peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Perlu adanya tindak lanjut pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat melalui perluasan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
6. Pemberian bantuan beasiswa bagi keluarga tak mampu, dan subsidi operasional pendidikan bagi siswa miskin khususnya bagi siswa Sekolah Menengah Atas.
7. Peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penerapan kurikulum berbasis kawasan.



8. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Sertifikasi guru.
9. Pembangunan Gedung Sekolah semua jenjang Pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA/SMK.
10. Rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan khususnya di daerah terpencil dan terisolir melalui subsidi Guru daerah terpencil.
12. Pelibatan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam pengelolaan pendidikan.
13. Penyelenggaraan Pendidikan gratis di SD dan SMP.
14. Penguatan Pengelolaan Pendidikan melalui Regulasi daerah yang mengatur Pendidikan khususnya SPM.
15. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dicapai melalui Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional (FLS2N) sampai ke Tingkat Nasional.

2. Urusan Wajib Kesehatan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Belanja langsung Dinas Kesehatan yang semula dianggarkan dalam DPA-SKPD T.A 2011 dengan jumlah Rp. 6.548.418.000,- setelah mengalami Perubahan Anggaran menjadi Rp. 6.741.913.402,-. Maka realisasi untuk belanja langsung sebesar Rp. 6.712.800.052,- atau sebesar 99%. Tidak tercapainya realisasi anggaran sebesar 100%, disebabkan adanya Proyek pengadaan Alat Kesehatan yang masih di dana luncuran di tahun 2012, juga disebabkan adanya proyek Pembangunan Poskesdes Ilomata dan Poskesdes Bilungala Utara yang biaya pemeliharaan 5% masuk di dana luncuran tahun 2012.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Dinas Kesehatan adalah:

Jumlah Program : 10 Program

Jumlah Kegiatan : 30 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 42 Keluaran



Jumlah keluaran yang memenuhi target : 40 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 2 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Perbaikan Gizi Masy: a. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	- Jumlah Keg. Penunjang	1 Kegiatan	1 Keg.
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	- Jumlah Keg. Penunjang	1 Kegiatan	1 Keg.

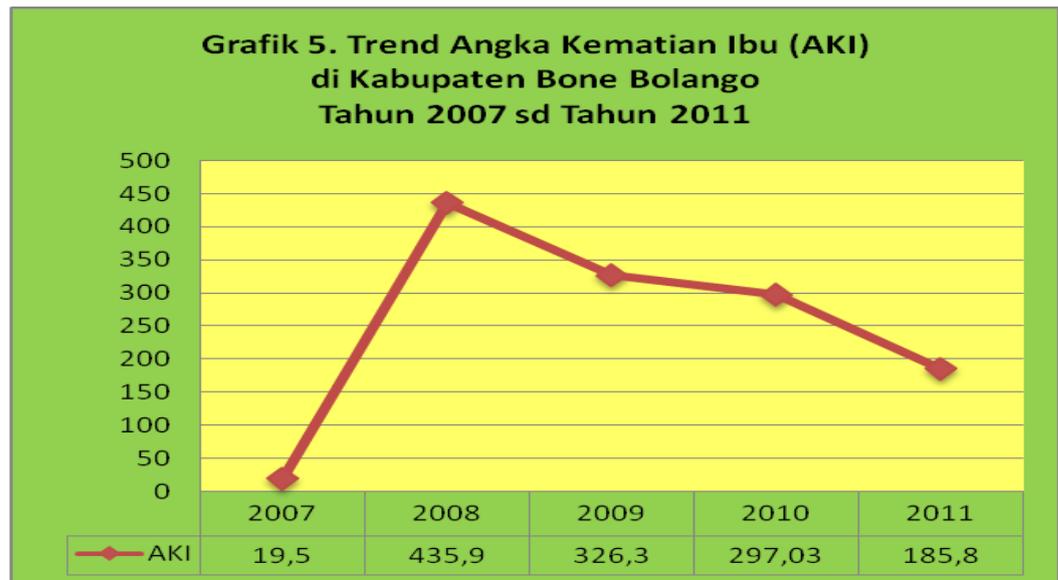
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan dapat dikatakan cukup berhasil sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai beberapa masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang optimal dapat dilihat dari unsure kualitas hidup serta unsure mortalitas dan yang mempengaruhinya yaitu morbiditas dan status gizi masyarakat.

Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat di Bone Bolango adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Umur Harapan Hidup (UHH) dan Status Gizi. Indikator tersebut ditentukan dengan 4 faktor utama yaitu Perilaku Masyarakat, Lingkungan, Pelayanan Kesehatan dan Faktor Genetika. Keempat faktor utama ini diintervensi melalui beberapa kegiatan pokok yang mempunyai dampak unkit besar terhadap upaya-upaya percepatan penurunan AKI, AKB, AKABA dan Peningkatan Status Gizi Masyarakat serta status Angka Kesakitan dan Kondisi Penyakit Menular. Keberhasilan upaya-upaya kesehatan yang dilakukan dapat dinilai sebagai indikator output yang cukup signifikan.

1. ANGKA KEMATIAN IBU

Kematian Ibu di Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2005 sampai saat ini masih fluktuatif, tetapi telah menunjukkan trend penurunan dari tahun ke tahun. AKI Kabupaten Bone Bolango tahun 2009 adalah 326,3 per 100.000 KLH, atau 9 kematian dari 2.758 KLH. Angka ini mengalami penurunan dari



tahun sebelumnya yakni 435,9 per 100.000 kelahiran hidup atau 12 kasus kematian dari 2.753 KLH. Angka ini masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target 2010 yaitu 150 per 100.000 KLH. Kematian ibu terjadi pada masa bersalin dan nifas. Kasus terdapat di 9 wilayah kerja Puskesmas yakni Puskesmas Bone, Bonepantai, Kabila Bone, Bulango, Bulango Selatan, Suwawa Tengah, Tilongkabila, Tapa dan Kabila masing-masing satu kasus. Tahun 2011 angka AKI di Kab. Bone Bolango adalah 185 per 100.000 KLH atau 5 kematian dari 2.690 KLH. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 297 per 100.000 KLH, atau 9 kematian dari 3.030 KLH.

Namun angka ini masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan AKI yang ditargetkan untuk 2011 yaitu 150 per 100.000 KLH. Kematian ibu terjadi pada masa bersalin 3 kasus dan hamil 2 kasus. Kasus terdapat di 4 wilayah kerja Puskesmas yakni Puskesmas Bulango Timur 2 kasus, Bulango Ulu 1 kasus, Suwawa Timur 1 kasus dan Puskesmas Bone 1 kasus.

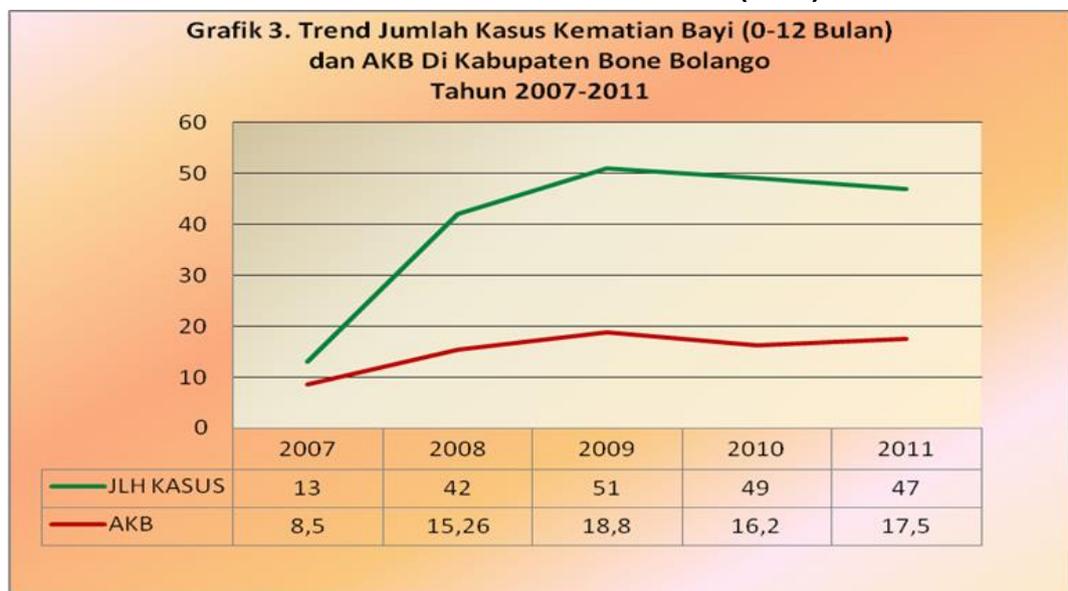


KASUS KEMATIAN IBU

TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYEBAB
2007	3	Perdarahan, Partus Lama, Resiko Tinggi Akibat Umur
2008	12	Suspect Ruptura Uteri, Perdarahan, Partus lama, Resiko Tinggi akibat umur, eklamsi, serta Post Sectio
2009	9	Infeksi, Dcc / Asma, IMA, help syndrome, hiploklemia dan eklamsia, Resiko Tinggi akibat umur
2010	9	Perdarahan, Partus lama, HPP, Infeksi, DCC/asma, IMA, help syndrome, hiploklemia dan eklamsi
2011	5	HPP, dan Infeksi

Untuk mengantisipasi masalah ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan. Perlunya pembenahan Puskesmas PONEB, penambahan tenaga bidan, pelatihan dan fasilitasi P4K, adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor.

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)



Sehingga harapan kita agar Bidan di Desa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB (IMR) dan AKI (MMR) dapat terwujud. Selain itu melalui pengembangan Desa Siaga dengan pembangunan



POSKESDES yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menurunkan AKI.

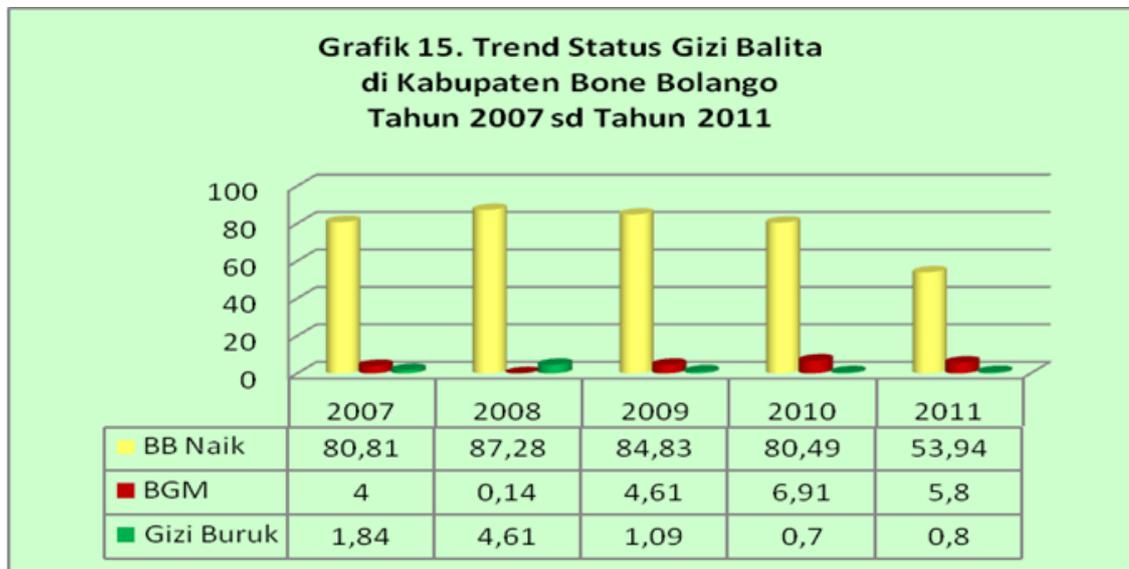
2. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Kabupaten Bone Bolango masih masih tinggi . Tahun 2009 sebesar 18,8 per 1.000 KLH atau 51 orang per 2.716 KLH. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2008.

3. Status Gizi

Prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan penurunan yang cukup berarti dari tahun ke tahun walaupun masih fluktuatif. Penurunan prevalensi ini karena berbagai upaya penanggulangan yang dimulai dari deteksi dini, hingga rujukan ke Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan pemberian makanan tambahan kepada balita gizi kurang dan gizi buruk.

STATUS GIZI BALITA



Perkembangan indikator ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan antara tahun 2009 sampai dengan awal 2010 menunjukkan adanya peningkatan dari setiap jenis prasarana kesehatan. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango memang masih jauh dari memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun dalam rangka



memenuhi standar pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat, keterbatasan tersebut bukanlah merupakan suatu hambatan dalam operasionalnya.

Sarana kesehatan di dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 19 unit, Puskesmas Pembantu 33 unit, Puskesmas Keliling sebanyak 18 unit, yang meningkat dari tahun sebelumnya 14 unit di tahun 2008, Polindes 27 unit, Posyandu 218 unit, Poskesdes 49 unit.

Tabel 1.18
Trend Perkembangan Sarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango tahun 2006-2011

No	Sarana	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rumah Sakit	1	1	2	2	2	2
2	Puskesmas (PKM)	11	11	14	18	19	19
3	PKM Perawatan	3	3	2	2	2	2
4	PONED	-	-	2	2	3	3
5	PKM Pembantu	38	38	36	36	33	33
6	Polindes	52	50	48	48	27	27
7	Posyandu	168	156	197	204	218	218
8	Poskesdes	-	-	16	24	49	68
9	TFC	-	-	-	1	1	1
10	Pusling (R4)	7	9	14	18	18	18

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Salah satu faktor yang menunjang perbaikan derajat kesehatan penduduk Bone Bolango juga adalah kualitas maupun kuantitas SDM kesehatan. Kondisi Kabupaten Bone Bolango yang memiliki 2 (dua) buah Rumah Sakit Umum Daerah, menuntut daerah untuk menyediakan tenaga kesehatan dalam menunjang operasional rumah sakit tersebut sehingga dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Kondisi tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 1.19.



Perkembangan indikator kesehatan reproduksi masyarakat Bone Bolango antara tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan adanya perbaikan, baik dari indikator keikutsertaan pada program KB maupun pada jumlah penggunaan alat KB oleh masyarakat sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.20, Tabel 1.21 dan Tabel 1.22.

Tabel 1.19
Daftar Potensi Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2011

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Per -Tahun (orang) 2009 – 2011		
	2009	2010	2011
1. Dokter Spesialis	2	5	2
2. Dokter Umum	11	24	21
3. Dokter Gigi	1	1	2
4. Perawat	58	133	162
5. Bidan	51	73	131
6. Dukun Anak	-	58	115
7. Ahli Kesehatan Masyarakat	38	49	77
8. Apoteker	1	1	2
9. Ahli Gizi	16	28	35
10. Analis Laboratorium	0	0	5
11. Penata Rontgen	0	0	5
12. Ahli Penyehatan Lingkungan	24	21	23
13. Bidan Desa	51	48	104

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 1.20
Indikator Keberhasilan Kesehatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2011

INDIKATOR	2009	2010	2011
1. Angka Kematian Bayi (mortalitas)	54	49	46
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan	9	9	4
3. Angka Kematian Balita	22	11	3
4. Prevalensi Gizi Buruk	1,09%	0,7 %	0,8 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango



Tabel 1.21
Keikutsertaan dalam Program KB
di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 – 2011

TAHUN	IKUT KB	TIDAK KB	JUMLAH
2009	21.053	5.412	26.465
2010	26.170	2.450	28.575
2011	27.204	1.353	28.557

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Bone Bolango

Tabel 1.22
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peserta KB Baru
dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan
di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 – 2011

TAHUN	Peserta KB Baru								Jumlah	%
	IUD	PIL	KDM	OV	OPR	STK	IMPL			
2009	568	1.478	210	-	25	3.111	941	6.333	131,86	
2010	868	2.651	1.076	-	70	3.265	2.469	10.399	162,28	
2011	831	2.753	772	-	161	2.885	1.212	8.652	179,25	

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bone Bolango

Out put yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan Tahun Anggaran 2011 antara lain :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan:

- Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan (DAU)
- Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
- Terlaksananya Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan (DAK)

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat:

- Terlaksananya Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat
- Terlaksananya Revitalisasi Sistem Kesehatan
- Tersedianya Biaya Operasional dan pemeliharaan
- Terlaksananya Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
- Terselenggaranya Penyehatan Lingkungan

3. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat:



- a. Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - b. Terselenggaranya Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan.
 - c. Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 4. Program Perbaikan gizi masyarakat:**
- a. Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin.
 - b. Terlaksananya penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY kurang Vit.A, Kekurangan zat gizi mikro lainnya.
 - c. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
 - d. Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan pengalokasian anggaran Rp. 12.580.000,00.
- 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat:**
- a. Terselenggaranya Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - b. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Lingkungan.
 - c. Terselenggaranya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 6. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular:**
- a. Terselenggaranya penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
 - b. Meningkatnya Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.
 - c. Meningkatnya Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah.
 - d. Terlaksananya Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- 7. Program Penyusunan Standarisasi pelayanan kesehatan:**
- a. Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan.
 - b. Terlaksananya penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan.
 - c. Terlaksananya penyusunan Standar analisis belanja, pelayanan kesehatan.
 - d. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 8. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya:**



- a. Terselenggaranya Pembangunan Poskesdes.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas.
- c. Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita:

- a. Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

10. Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan:

- a. Terselenggaranya pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri.
- b. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi.

11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak:

- a. Meningkatnya pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesehatan antara lain:

1. Diketuainya jumlah ketersediaan obat generik berlogo menurut jenis obat.
2. Diketuainya kebutuhan, pengadaan dan ketersediaan obat esensial dan obat generik.
3. Meningkatnya cakupan penanganan kasus filariasis dan elephantiasis.
4. Meningkatnya persentasi penderita kusta yang selesai berobat.
5. Meningkatnya cakupan penanganan kasus HIV-AIDS, infeksi menular seksual dan kasus DBD.
6. Meningkatnya cakupan persentasi TB Paru yang sembuh yakni 98%.
7. Meningkatnya cakupan penanganan penyakit diare yakni 94%.
8. Meningkatnya cakupan penanganan penyakit Malaria.
9. Meningkatnya cakupan penanganan penyakit ISPA.
10. Mengetahui jumlah persentase Desa / Kelurahan yang terkena KLB yang ditangani kurang dari 24 jam yakni 80%.
11. Mengetahui jumlah penderita dan kematian, CFR, KLB menurut jenis KLB, jumlah kecamatan serta Desa yang terserang.
12. Mengetahui jumlah kasus PD3I yakni 100%.



13. Meningkatnya jumlah dan persentasi Posyandu di masing-masing kecamatan.
14. Meningkatnya persentasi rumah tangga yang ber-PHBS.
15. Meningkatnya persentasi rumah sehat menurut kecamatan.
16. Menurunnya jumlah kelahiran dan angka kematian bayi dan balita menurut kecamatan yakni 20/1000 KLH.
17. Menurunnya jumlah kematian maternal menurut kecamatan.
18. Menurunnya angka kematian ibu yang mencapai 300/100.000 KLH.
19. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil, K4, Bumil risti, dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yakni 87%. Meningkatnya cakupan jumlah ibu hamil yang mendapat tablet Fe, Fe3, serta imunisasi TT1 dan TT2 menurut kecamatan dan Puskesmas.
20. Meningkatnya cakupan kunjungan Neonatus, bayi, dan bayi BBLR yang ditangani oleh tenaga kesehatan yakni 92%.
21. Mengetahui jumlah dan persentasi ibu hamil dan neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani menurut kecamatan dan Puskesmas yakni 90%.
22. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Pra Usila dan Usila.
23. Meningkatkan cakupan jumlah bayi yang diberikan ASI Eksklusif.
24. Menurunkan angka gizi buruk balita mencapai 1,07%.
25. Meningkatnya cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan yakni 100%.
26. Meningkatkan cakupan deteksi tumbuh kembang anak balita, pemeriksaan siswa SD, dan pelayanan kesehatan remaja.
27. Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga miskin dan JPKM Gakin.
28. Meningkatnya deteksi jumlah kecamatan yang rawan gizi.
29. Meningkatkan persentasi Desa atau kelurahan dengan garam boryodium yang baik.
30. Meningkatkan cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium.
31. Meningkatkan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan NAPZA.
32. Meningkatkan persentasi institusi yang dibina kesehatan lingkungannya.
33. Meningkatkan persentasi keluarga yang memiliki akses air bersih yakni 62,5%.



34. Mengetahui persentasi rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides serta meningkatkan persentasi rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides.
35. Meningkatkan jumlah keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar.
36. Meningkatkan persentasi tempat umum dan pengelolaan makanan (TUPM) sehat.
37. Meningkatkan persentasi cakupan desa/kelurahan UCI yakni 40%.
38. Meningkatkan persentasi cakupan imunisasi bayi.
39. Mengetahui jumlah penduduk peserta pemeliharaan kesehatan.
40. Mengetahui persentasi penduduk laki-laki dan perempuan berusia sepuluh tahun ke atas dirinci menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.
41. Meningkatkan cakupan keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
42. Mengetahui luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah RT dan kepadatan penduduk.
43. Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tiap Puskesmas.
44. Mengetahui persentasi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf.
45. Mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, ratio beban tanggungan, ratio jenis kelamin.
46. Meningkatkan jumlah sarana pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan rujukan yakni 70%.
47. Meningkatkan cakupan desa siaga aktif yakni 68%.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada urusan kesehatan antara lain :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan sweeping ibu hamil pada daerah terpencil
2. Pelayanan bidan yang belum maksimal karena jumlah tenaga bidan yang belum memenuhi rasio jumlah penduduk
3. Kesadaran ibu hamil untuk memanfaatkan atau memeriksakan diri ke Puskesmas.
4. Banyaknya Bidan yang merangkap program.
5. Belum berjalannya kemitraan Bidan dan Dukun.



6. Kurangnya akses pelayanan kesehatan untuk persalinan pada daerah terpencil.
7. Puskesmas Poned yang belum jalan disebabkan tenaga yang dilatih Poned berpindah-pindah.
8. Belum semua gakin memanfaatkan layanan kesehatan.
9. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan cara penularan penyakit.
10. Sarana komunikasi yang belum lancar antar wilayah kerja serta factor geografis.
11. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang belum berjalan dengan baik sehingga kurang terdeksinya Pneumonia dan Diare.
12. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat Posyandu.
13. Kurangnya ketenagaan yang menyebabkan adanya petugas gizi yang rangkap.
14. Belum semua kader terlatih disebabkan sering berganti-gantinya kader karena kader merupakan tenaga sukarela.
15. Kurangnya kesadaran orang tua untuk merujuk anaknya yang menderita gizi buruk di Puskesmas perawatan maupun di TFC.
16. Intervensi gizi melalui pemberian makanan tambahan pemulihan yang membutuhkan biaya yang besar.
17. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS.
18. Pemeriksaan rumah dan jamban sehat yang rendah disebabkan karena kurangnya tenaga survey dan sanitasi di Puskesmas serta petugas sanitasi yang memiliki tugas yang rangkap.
19. Pelaksanaan penyuluhan jamban sehat yang belum berjalan dengan baik yang disebabkan karena kurangnya kemauan masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.
20. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan NAPZA yang belum maksimal.
21. Ketersediaan obat essensial dan generik belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk.

Upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :



1. Melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak.
2. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan sweeping bumil.
3. Melakukan bimbingan Teknis kepada petugas tentang PONED.
4. Memberikan jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dan jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) dimana semua masyarakat terutama masyarakat miskin memperoleh layanan kesehatan gratis.
5. Meningkatkan kerjasama antar program dalam penanganan KLB, menyediakan alat komunikasi yang dapat memudahkan pelaporan keadaan tiap daerah yang mengalami KLB, serta alat transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah KLB yang sulit dijangkau.
6. Mengefektifkan MTBS, dan meningkatkan deteksi dini pneumonia, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang pneumonia dan diare serta sosialisasi bagi masyarakat tentang penyakit Pneumonia dan Diare.
7. Memberikan pengetahuan pada ibu yang memiliki anak balita tentang manfaat penimbangan balita dan melakukan kunjungan di Posyandu .
8. Memaksimalkan peran lintas program dan lintas sector.
9. Penyuluhan tentang makanan yang bergizi.
10. Melakukan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) bagi balita gizi buruk.
11. Penyuluhan tentang pentingnya PHBS.
12. Penyuluhan/sosialisai pada masyarakat tentang sanitasi.
13. Melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk untuk pemeriksaan jamban bersih.
14. Menyediakan tenaga-tenaga sanitasi yang sesuai dengan keilmuannya sehingga meningkatkan profesionalitas kinerja petugas sanitasi.
15. Melakukan pendataan secara lengkap dan berkesinambungan.
16. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas sanitasi.
17. Menyediakan dana untuk pengadaan obat serta koordinasi dengan buffer stock yang ada di provinsi dapat membantu penyediaan obat sesuai kebutuhan.



3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah guna mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka menempatkan sektor pekerjaan umum sebagai sektor yang strategis. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah Tahun 2011, melalui Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran pada APBD sebesar Rp. 101.115.225.344,70 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.950.567.854,15 atau 46 %.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari Program dan Kegiatan untuk urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan pada tahun 2011 ini terdiri dari :

1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan (DAU):

Peningkatan Jalan (DAU)

- Desa Dumbayabulan ; 230 M (Lapen)
- Desa Tilangobula (Pangi) ; 123,5 M (Awcess)
- Peningkatan Jalan Ruas SP Ulantha - Ulantha Dalam ; 1400 M (AC/BC)
- Desa Inogaluma ; 250 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Ruas Ponele- Boidu-Sejahtera ; 250 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Lingkar Desa Modelomo Kec.Kabila Bone ; 286 M (Rabat Beton)
- Peningkatan Jalan Akses (samping Polres) ; 250 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Bintalahe ; 277 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Ruas Talulobutu Bandungan ; 250 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Boludawa (jalan sukun) ; 416 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Panggulo ; 414 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Tulabolo Barat ; 850 M (Jalan Tanah)

Pembangunan Jembatan (DAU)

- Mobilisasi / Pembongkaran Jembatan Baile
- Pembangunan Jembatan Jln. Lingkar Ds Bunuo
- Pembangunan Plat Duicker Ds Boidu



Rehab / Pemeliharaan Jalan (DAU)

- Rehabilitasi Pemeliharaan Ruas jalan Ds Bube Bulotalangi ; 8494 M (AC/BC)

Perencanaan Dan Pengawasan (DAU)

- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan / Peningkatan Jalan (DAU)

- Peningkatan Jalan Ruas Ulantha - Ulantha Dalam ; 275 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati ; 580 M (AC/BC)
- Peningkatan Jalan Desa Poowo Barat Dsn II ; 337 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Toto Utara Dalam ; 352 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Helumo - Danau Perintis (KPU) ; 356 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Pauwo - Pauwo Dalam ; 309 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Bonedaa – Bondauna ; 850 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Duano Dsn III / IV ; 309 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Lingkar Desa Bunuo ; 418 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Tapadaa ; 474 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Ruas Desa Toto Utara (Tk Mawar) ; 447 M (Rabat Beton)
- Peningkatan Jalan Akses Kantor Camat Botupingge ; 460 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Sejahtera Kec Bulango Selatan ; 378 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Ayula Tilango ; 300 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Ilohuwo ; 408 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Tunas Jaya ; 226 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Tihu ; 233 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Bilungala ; 319 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Ruas Padengo – Poowo ; 310 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Buata-Luwohu ; 492 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Kopi ; 305 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan ruas bube baru-Moutong ; 455 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Tanah Putih ; 527 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Molotabu ; 178,7 M (Rabat Beton)
- Peningkatan Jalan Desa Bulotalangi Timur ; 317 M (Lapen)
- Peningkatan jalan Desa Tuloa ; 292 M (Lapen)
- Peningkatan jalan Lingkar Ktr Camat Suwawa Timur ; 230,80 M (Lapen)
- Peningkatan jalan Desa Kaidundu Kec.Bulawa ; 132 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa mopuya ; 240 M (Lapen)



- Peningkatan jalan akses SMP 5 Suwawa ; 200 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Duano-Alale ; 900 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Desa Boludawa ; 162,70 M (Lapen)
- Peningkatan jalan Desa Tingkohubu ; 263 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Bongopini ; 300 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Desa Tumbihe-Pauwo ; 373 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Bongopini-Tunggulo ; 468 M (Jalan Tanah)
- Pemeliharaan Jalan Desa Olele ; 98,5 M (Talud)

2. Program Pengendalian Banjir/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (DAU):

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (DAU)

- Normalisasi Sungai Panggulo Kec.Botupingge ; 60 M (Bronjong)
- Normalisasi Sungai Meranti dan Pasangan Bronjong Kec.Tilongkabila ; 109 M (Bronjong)
- Normalisasi Sungai Meranti dan Pasangan Bronjong Kec.Tilongkabila (lanjutan) ; 10 M (Bronjong)

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (DAU)

- Rehabilitasi Akibat Abrasi Pantai Tolotio ; 75 M (Bronjong)
- Pembuatan Bronjong Pengaman Jembatan Desa Poowo Barat ; M (Bronjong)
- Rehabilitasi Akibat Abrasi Pantai Tolotio (lanjutan) ; 14 M (Bronjong)

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (DAU)

- Pembangunan Bronjong Jembatan Sungai Buata
- Pembangunan Bronjong Sungai ulantha

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAU):

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (DAU)

- Penataan Kompleks Kantor Bupati dan Kantor Gabungan Dinas-Dinas ; 1 Unit
- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PU Kab.Bone Bolango ; 1 Unit
- Rehabilitasi BPU Botupingge ; 1 Unit
- Rehab Kantor Camat Tapa ; (Putus Kontrak)
- Pembangunan Panggung Bulango Utara ; 1 Unit
- Penataan Lapangan Olahraga Timbuolo Timur ; (Putus Kontrak)
- Pembuatan Pagar Gedung DPRD ; 1 Unit

4. Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong (DAU)

Kegiatan Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong (DAU)



- Pembangunan Drainase Ayula Tilango ; 238,90 M
- Pembangunan drainase Desa Toto Utara segmen I ; 213 M
- Pembangunan drainase Desa Toto Utara segmen II ; 240 M
- Pembangunan drainase Desa Toto Utara segmen III ; 138,18 M
- Pembangunan drainase Desa Moutong ; 160 M
- Pembangunan drainase Desa Tupa ; 168,68 M
- Pembangunan drainase Desa Huangobotu ; 112 M
- Pembangunan drainase Desa Timbuolo Induk ; 171 M
- Pembangunan drainase dan Talud Kompleks Poligon ; 130,5 M (Drainase), 49 M (Talud)
- Pembangunan Drainase Kantor Camat Bulango Utara ; 152,85 M
- Pembangunan Drainase Desa Tilangobula Kec.Suwawa Timur ; 123 M
- Pembangunan Drainase Desa Timbuolo Tengah ; 200 M
- Pembangunan Drainase Desa Panggulo ; 200 M
- Pembangunan Drainase Desa Bulontala ; 189,70 M

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah:

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (DAU)

- Pembuatan SPAM Pedesaan Bonedaa ; 1 Unit
- Pembuatan Pagar SPL, Intake dan Bronjong Pengaman Intake SPAM Bonedaa ; 1 Unit

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (DAU): Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop (DAU)

- Bangunan Gedung Workhsop ; 1 Unit

Pembangunan/Peningkatan Jalan (DAK)

- Peningkatan Jalan Ruas Ulantha - Ulantha Dalam ; 275 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Kompleks Kantor Bupati ; 580 M (AC/BC)
- Peningkatan Jalan Desa Poowo Barat Dsn II ; 337 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Toto Utara Dalam ; 352 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Helumo - Danau Perintis (KPU) ; 356 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Pauwo - Pauwo Dalam ; 309 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Bonedaa – Bondauna ; 850 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Duano Dsn III / IV ; 309 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Lingkar Desa Bunuo ; 418 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Tapadaa ; 474 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Ruas Desa Toto Utara (Tk Mawar) ; 447 M (Rabat)



- Beton)
- Peningkatan Jalan Akses Kantor Camat Botupingge ; 460 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Sejahtera Kec Bulango Selatan ; 378 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Ayula Tilango ; 300 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Ilohuwo ; 408 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Tunas Jaya ; 226 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Tihu ; 233 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Bilungala ; 319 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Ruas Padengo – Poowo ; 310 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Buata-Luwohu ; 492 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Kopi ; 305 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan ruas bube baru-Moutong ; 455 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Tanah Putih ; 527 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Molotabu ; 178,7 M (Rabat Beton)
 - Peningkatan Jalan Desa Bulotalangi Timur ; 317 M (Lapen)
 - Peningkatan jalan Desa Tuloa ; 292 M (Lapen)
 - Peningkatan jalan Lingkar Ktr Camat Suwawa Timur ; 230,80 M (Lapen)
 - Peningkatan jalan Desa Kaidundu Kec.Bulawa ; 132 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa mopuya ; 240 M (Lapen)
 - Peningkatan jalan akses SMP 5 Suwawa ; 200 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Duano-Alale ; 900 M (Jalan Tanah)
 - Peningkatan Jalan Desa Boludawa ; 162,70 M (Lapen)
 - Peningkatan jalan Desa Tingkohubu ; 263 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Desa Bongopini ; 300 M (Jalan Tanah)
 - Peningkatan Jalan Desa Tumbihe-Pauwo ; 373 M (Lapen)
 - Peningkatan Jalan Bongopini-Tunggulo ; 468 M (Jalan Tanah)
 - Pemeliharaan Jalan Desa Olele ; 98,5 M (Talud)

Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

- Rehab Jaringan Irigasi Desa Huntu Selatan Kec.Bulango Selatan Tahap III ; 204 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Ayula Sejahtera Kec.Bulango Selatan ; 171,70M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Bulotalangi Tahap II ; 177 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Bulotalangi Barat Tahap III ; 131 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Irigasi Toto Utara Kec.Tilongkabila Tahap III ; 147 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Toto Selatan Tahap III ; 190 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Lamahu Kec.Bulango Selatan Tahap II ; 178,20M



- Rehab Jaringan Irigasi Desa Talango Kec.Kabila Tahap II ; 168 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Oluhuta Kec. Kabila Tahap II ; 167 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Dutohe Kec.Kabila Tahap II ; 151,50 M
- Rehab Jaringan Irigasi Lomaya Desa Ayula Sejahtera Kec.Bulango Selatan Tahap IV ; 164,40 M
- Pembangunan Saluran Pembuangan Desa Tanggilingo ; 107 M (Putus Kontrak)
- Pembangunan Saluran Irigasi Kel.Tumbihe ; 313 M

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)

- Pembuatan SPAM Pedesaan Bonedaa ; 1 Unit
- Pembuatan Pagar SPL,Intake dan Bronjong Pengaman Intake SPAM Bonedaa ; 1 Unit

8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan:

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (APBN)

- Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Ayula Selatan- Talumopatu ; (Putus Kontrak)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bongoime-Poowo Barat ; 1495 M (AC/BC)

Pembangunan/Peningkatan Jalan (DPPID)

- Peningkatan Jalan Desa Bonedaa-Bondauna Tahap II ; 850 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Ruas Gorontalo-Suwawa-Tulabolo ; (Putus Kontrak)
- Peningkatan Jalan Ruas Ayula Selatan-Talumopatu ; 1228 M (AC/BC)
- Peningkatan Jalan Lingkar Kntr Camat Boneraya ; (Putus Kontrak)
- Peningkatan Jalan Ruas Oluhuta-Oluhuta Dalam ; 450 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Desa Timbuolo Tengah ; 850 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Mekar Jaya ; 630 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Tunas jaya ; 200 M (Lapen)
- Peningkatan jalan Akses Ktr Camat Suwawa Tengah ; 249,8 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Lomaya-kopi ; 300 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Bulotalangi Timur ; 350 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Kec.Tilongkabila ; 550 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Ruas Bondauna-Tulabolo Barat ; 285 (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Molotabu ; 255 M (Lapen)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Desa Bongoime ; 315 M (Jalan Tanah)



- Peningkatan Jalan Agropolitan Ruas Bube-Dutohe ; 550 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Agropolitan Ruas Moutong-Iloheluma ; 850 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Akses Ktr Camat Kabila Bone ; 130 M (Lapen)

Pembangunan Jembatan (DPPID)

- Pembangunan Jembatan Boludawa-Bulontala (lanjutan)
- Pembangunan Jembatan Akses SMK Tapa
- Pembangunan Jembatan Mongiilo-Pilolaheya
- Pembangunan Jembatan Akses Agropolitan Desa Taludaa
- Desa Biluango ; 110 M (Rabat Beton)
- Desa Mootilango ; 350 M (Jalan Tanah)
- Peningkatan Jalan Ruas Tilango (Ayula Selatan) ; 350 M (Lapen)
- Pembangunan Pengaman Jembatan DsTolomato; 86 M (Bronjong)
- Pembangunan Plat Duicker Ds Panggulo
- Pembangunan Jembatan Ruas Toto Utara -Danau Perintis

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa/ Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DPPID):

Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DPPID)

- Rehab Jaringan Irigasi Desa Huluduotamo Kec.Suwawa ; 275,30 M
- Rehab Jaringan Irigasi Lomaya Desa Ayula Timur Kec.Bulango Selatan Tahap IV ; 232,60 M
- Rehab Jaringan Irigasi Lomaya Desa Ayula Sejahtera Kec.Bulango Selatan Tahap III ; 225 M
- Rehab Jaringan Irigasi Saluran Alale Desa Boludawa Kec.Suwawa ; 239 M
- Rehab Jaringan Irigasi Lomaya saluran Desa Tamboo Kec.Tilongkabila ; 253M
- Rehab Jaringan Irigasi Lomaya Desa Poowo Kec.Kabila ; 324 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Tunggulo Kec.Tilongkabila tahap II ; 354 M
- Rehab Jaringan Irigasi Desa Oluhuta Utara Kec.Kabila ; 316,50 M
- Rehab Bangunan Syfon Saluran Irigasi Lomaya ; 204,66
- Pembangunan Chekdam Pengaman saluran Irigasi Lomaya Desa Tamboo Kec.Tilongkabila ; 31,90 M
- Rehab Bangunan Talang Pembuang Pada Saluran Irigasi Pilohayanga Desa Bandungan Kec.Bulango Utara ; 16 M

10. Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (DPPID)



- Rehabilitasi Intake Ulantha ; 1 Unit
- Pembangunan Intake Tulabolo ; 1 Unit
- Rehabilitasi Intake tunggulo ; 1 Unit
- Pembangunan Bronjong Pengaman Pipa Transmisi Langge ; 1 Unit
- Pembangunan Bronjong Pengaman Pipa Transmisi Langge (lanjutan) ; 1 Unit
- Pembangunan Rumah Jaga Intake (Langge,Ulantha,Tulabolo dan Lombongo) ; 1 Unit
- Pembangunan Bronjong/Talud Pengaman Intake Dumbaya Bulan ; 1 Unit
- Pembangunan Talud Pengaman Instalasi IPA Taludaa ; 1 Unit
- Pembangunan Talud Pengaman Instalasi IPA Taludaa (lanjutan) ; 1 Unit
- Pengembangan jaringan Distribusi Utama dan Pelayanan (Sharing RPIJM) ; 1 Unit
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Tilongkabila ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Bulango Selatan ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Tapa ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Suwawa ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Suwawa Tengah ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Kabila ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Bone Pantai ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Botupingge ; 250 SR
- Pengadaan/Pemasangan sambungan Rumah (SR) Kec.Bulango Timur ; 185 SR
- Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Botutonuo Kec.Kabila Bone ; 1 Unit
- Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Botubarani Kec.Kabila Bone ; 1 Unit
- Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Oluhuta Kec.Kabila Bone ; 1 Unit
- Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Olele Kec.Kabila Bone ; 1 Unit
- Pembangunan SPAM Perdesaan Lokasi Desa Timbuolo ; 1 Unit
- Pembangunan Pagar Pengaman Instalasi IPA dan Talud Penahan Desa Tulabolo ; 1 Unit
- Rehabilitasi Jembatan Pipa dan Pipa Transmisi ; 1 Unit



Adapun outcome atau hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2011 adalah telah dibangunnya jalan sepanjang 4.480 Km, dibangunnya dan direhabilitasinya jembatan sebanyak 9 unit, Saluran irigasi tahun 2010 yaitu 2539.325 m.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Masih terbatasnya akses transportasi darat ke kantong-kantong produksi yang akan membuka keterisolasian wilayah
- 2) Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan banjir
- 3) Masih banyak jaringan irigasi yang rusak
- 4) Masih terbatasnya sarana prasarana kebinamargaan
- 5) Belum tertatanya batas wilayah antar kabupaten maupun antar provinsi.
- 6) Masih terdapatnya beberapa desa yang sulit akan keterjangkauan terhadap sumber air maupun air bersih.

Solusi:

- 1) Membuka jalur akses bagi masyarakat di wilayah terisolir maupun wilayah yang menuju kantong produksi.
- 2) Meningkatkan frekuensi upaya penanggulangan bencana dengan membangun talud pengaman pantai, membangun bronjong maupun normalisasi sungai.
- 3) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi.
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan.
- 5) Melaksanakan survey dan penelitian untuk mencari sumber-sumber air baku, khususnya pada wilayah-wilayah yang sulit memperoleh sumber air.

4. Urusan Wajib Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk tahun 2011 Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.182.068.234,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.198.340.394,00 atau 69,09%. Pada tahun 2011,



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Bolango memiliki 14 program dengan 10 program strategis dan 4 program operasional, dengan jumlah kegiatan sebanyak 43 kegiatan dengan 25 kegiatan strategis dan 18 kegiatan operasional, sebagai berikut :

- ❖ 10 Program dan 25 kegiatan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 :
 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
 - b. Penyusunan Rancangan RPJPD
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
 - d. Penyusunan Rancangan RKPD
 - e. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - f. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
 - g. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
 - h. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 2. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan :
 - a. Pengumpulan, Updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
 - b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
 - c. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - d. Penyusunan profile daerah
 3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
 4. Program Penataan Tata Ruang, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW



5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
 - b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
 - c. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan kegiatan :
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
 10. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
- ❖ 4 Program dan 18 kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 :
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu
 - b. Pengadaan pakaian seragam kerja
 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor



- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetak dan pengandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan bahan logistik kantor
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

Jumlah Program : 10 Program

Jumlah Kegiatan : 25 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 51 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 45 Keluaran

Jumlah keluaran yang melebihi target : 1 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 5 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Guna Terjalannya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	2 Kali	1 Kali
2.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			



3.	a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan	200 Orang	100 Orang
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
4.	a. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	- Terlaksananya Musrenbang Penyusunan RPJPD Tahun 2005-2025	1 Kali	0
	b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 Kali	3 Kali
4.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
	a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	4 Kali	3 Kali

Tabel Program dan Kegiatan Strategis

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI	KET
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
	a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Terlaksananya MUSRENBANG tingkat Desa Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah	Kali	1	1	
	b. Penyusunan Rancangan RPJPD	Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah	Dok.	1	1	
	c. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	Terlaksananya MUSRENBANG penyusunan RPJPD tahun 2005-2025	Kali	1	0	
	d. Penyusunan Rancangan RKPDP	Tersusunnya perencanaan tahunan/ RKPDP	Dokumen	1	1	



	e. Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Terlaksananya uji kelayakan publik terhadap dokumen RKPd	Dokumen	1	1	
	f. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersusunnya dokumen LAKIP	Dokumen	1	1	
	g. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya dokumen media pertanggungjawaban jabatan kepala daerah tahunan	Dokumen	1	1	
	h. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Persentase konsistensi antara rencana dengan pencapaian hasil kinerja SKPD berdasarkan indikator kinerja	Persentase	75	75	
2	Program Pengembangan Data/Informasi					
	a. Pengumpulan, Updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Terlaksananya penyusunan dokumen indikator kinerja utama Kabupaten Bone Bolango	Dokumen	1	1	
	b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya penyusunan analisa statistik investasi	Dokumen	1	1	
	c. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terbangunnya pusat data perencanaan berbasis informasi geografis	Unit	1	1	
	d. Penyusunan profile daerah	Tersedianya dokumen informasi potensi daerah sebagai bahan promosi	Dokumen	1	1	
3	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
	a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tercapainya persentase ketersediaan dokumen gambaran data dan informasi spesifik daerah dan kecamatan	persen	100	100	
	b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB					
4	Program Penataan Tata Ruang					
	a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	Terlaksananya koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka penyempurnaan penyusunan RANPERDA RTRW	Kali	11	15	
5	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					
	a. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	Terlaksananya rapat koordinasi guna pembangunan perumahan dan penataan pemukiman	Kali	2	2	



	b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya rapat/lokakarya POKJA AMPL-BM tingkat Kabupaten Bone Bolango	Kali	2	2	
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat b. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi c. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data dan informasi pengembangan komoditas Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi Tersusunnya analisis kemiskinan dan pemetaan indikator kemiskinan Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan investasi	Dokumen Kali Dokumen Kali	2 2 1 4	2 2 1 4	
7	Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan	Kali Kali	2 4	2 4	
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program tata kelola lingkungan pembangunan berkelanjutan (PTLPB)	Kali	2	2	
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan	Orang	200	100	
10	Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi guna terjalin kerjasama pembangunan antar daerah	Kali	2	1	

B. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



- a. Kegiatan : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
 - ✓ Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan
 - ✓ Terselenggaranya musrenbang tingkat desa dan kecamatan
 - ✓ Tersedianya dokumen daftar usulan program kegiatan kecamatan berdasarkan bidang pembangunannya
 - ✓ Terlaksananya kegiatan forum gabungan SKPD
 - ✓ Terlaksananya survey usulan program dan kegiatan dari kecamatan
 - ✓ Terlaksananya pendampingan perencanaan pembangunan desa
- b. Kegiatan : Penyusunan Rancangan RPJPD
 - ✓ Tersedianya dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- c. Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
 - ✓ Terlaksananya uji kelayakan publik terhadap dokumen RPJPD
- d. Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD
 - ✓ Tersusunnya dokumen Perencanaan Tahunan atau RKPD
 - ✓ Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
 - ✓ Tersusunnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P
 - ✓ Terlaksananya Keikutsertaan pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional
- e. Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - ✓ Terlaksananya uji kelayakan publik terhadap dokumen RKPD
- f. Kegiatan : Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
 - ✓ Tingkat penyediaan media evaluasi kinerja dan pelaporan pemerintah daerah
 - ✓ Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- g. Kegiatan: Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
 - ✓ Tersedianya dokumen media pertanggungjawaban Jabatan Kepala Daerah tahunan
 - ✓ Tersedianya dokumen media pertanggungjawaban Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah selama 5 tahun
- h. Kegiatan : Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - ✓ Prosentase konsistensi antara rencana dengan pencapaian hasil kinerja SKPD berdasarkan indikator kinerja
 - ✓ Tingkat pencapaian pelaksanaan tugas pembantuan



- ✓ Tersedianya dokumen pelaporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terhadap pencapaian indikator makro pada RPJMD
 - ✓ Terbentuknya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terbentuknya Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK di Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program Pengembangan Data/Informasi
- a. Kegiatan : Pengumpulan, Updating, dan analisis data informasi capaian target kineja program dan kegiatan
- ✓ Tingkat penyediaan media penilaian akuntabilitas kinerja SKPD
 - ✓ Terlaksananya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terlaksananya penyusunan dokumen penetapan kinerja Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terlaksananya penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terlaksananya penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango
- b. Kegiatan: Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
- ✓ Prosentase upaya penyevaluasi informasi potensi serta peluang investasi sektor ekonomi
 - ✓ Rekomendasi serta inovasi teknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/prospektif
 - ✓ Terlaksananya penyusunan dokumen Analisa Statistik Investasi Daerah
 - ✓ Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE)
 - ✓ Terlaksananya penyusunan dokumen usulan rencana pengembangan investasi dan komoditas unggulan daerah
- c. Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- ✓ Prosentase tingkat validitas dan keakuratan penyajian data dan informasi daerah
 - ✓ Terbangunnya Pusat Data Perencanaan Berbasis Informasi Geografis
 - ✓ Terbangunnya website BAPPEDA Bone Bolango
 - ✓ Terlaksananya rapat koordinasi data
 - ✓ Terlaksananya koordinasi data tingkat provinsi
 - ✓ Terlaksananya pemutakhiran data perencanaan



- d. Kegiatan : Penyusunan profile daerah
 - ✓ Prosentase upaya promosi potensi daerah
 - ✓ Tersedianya dokumen informasi potensi daerah sebagai bahan promosi
3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a. Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - ✓ Tercapainya prosentase ketersediaan dokumen gambaran data dan informasi spesifik daerah dan kecamatan
 - ✓ Tersedianya data dan informasi Daerah Dalam Angka
 - ✓ Tersedianya data dan informasi Kecamatan Dalam Angka
 - ✓ Tersedianya data dan informasi ICOR
 - ✓ Tersedianya data dan informasi Gini Ratio
 - b. Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
 - ✓ Tersedianya data dan informasi pertumbuhan ekonomi daerah
4. Program Penataan Tata Ruang
 - a. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
 - ✓ Terbentuknya Tim BKPRD Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terlaksananya Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka Penyempurnaan Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Jumlah Dokumen Perencanaan RTRW
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - a. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
 - ✓ Terlaksananya rapat koordinasi guna pembangunan perumahan dan penataan pemukiman
 - ✓ Terlaksananya konsultasi guna pembangunan perumahan dan penataan pemukiman
 - ✓ Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D)
 - b. Kegiatan : Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
 - ✓ Terlaksananya Rapat/Lokakarya Pokja AMPL-BM Tingkat Kabupaten Bone Bolango
 - ✓ Terbentuknya Tim Koordinasi/Penyusun Dokumen AMPL-BM dan Badan Pengelola Air Bersih dan Sanitasi
 - ✓ Terlaksananya konsultasi perencanaan air minum tingkat pusat
 - ✓ Terlaksananya Koordinasi Pokja AMPL-BM Tingkat Kabupaten dan Pokja AMPL-BM Pusat
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - a. Kegiatan:Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - ✓ Tersedianya data dan informasi pengembangan komoditas



- b. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
 - ✓ Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang Ekonomi
 - ✓ Terlaksananya konsultasi, konsolidasi dan sinkronisasi program ekonomi
 - ✓ Terlaksananya forum SKPD Bidang Ekonomi
 - ✓ Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - c. Kegiatan : Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
 - ✓ Prosentase sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan
 - ✓ Tersedianya rencana strategi daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan
 - ✓ Tersusunnya Analisis Kemiskinan dan pemetaan indikator kemiskinan
 - d. Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - ✓ Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan investasi
 - ✓ Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan investasi
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- a. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - ✓ Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
 - ✓ Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - ✓ Terbentuknya Tim Koordinasi Program PKH
 - ✓ Terlaksananya Koordinasi Bidang Sosbud Tingkat Provinsi dan Kabupaten
 - ✓ Terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan
 - b. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - ✓ Terlaksananya monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan
 - ✓ Tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan program-program kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
- a. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - ✓ Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Tata Kelola Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan (PTLPB)
 - ✓ Terlaksananya monitoring pelaksanaan program air minum/air bersih
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ✓ Terlaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan
10. Program Kerjasama Pembangunan



- a. Kegiatan : Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
 - ✓ Terlaksananya rapat koordinasi guna terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah
 - ✓ Terlaksananya konsultasi guna terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - ✓ Tersedianya data dan informasi gambaran realisasi fisik dan keuangan pertriwulan yang akuntabel dari masing-masing program dan kegiatan BAPPEDA
 - b. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - ✓ Tersedianya data dan informasi gambaran realisasi fisik dan keuangan kurun waktu semesteran yang akuntabel dari masing-masing program dan kegiatan BAPPEDA
 - c. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - ✓ Tersedianya gambaran data dan informasi realisasi fisik dan keuangan yang akuntabel masing-masing program dan kegiatan BAPPEDA pada akhir tahun

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang terjadi pada proses perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, belum terlaksana dengan baik di karenakan kurangnya koordinasi dengan tenaga ahli yang lebih berkompeten dan sebagian besar SKPD, terlambat dalam memasukkan data penunjang dalam penyusunan RPJPD
2. Rendahnya kualitas data perencanaan dan pelaporan.
3. Belum efektifnya pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan
4. Dari aspek kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan belum memenuhi standar kebutuhan secara ideal

Berkenaan dengan permasalahan di atas dapat di ambil solusi sebagai berikut:



1. Karena pentingnya penyelenggaraan kegiatan Musrenbang RPJPD guna penyusunan dokumen RPJPD, maka kegiatan di maksud telah di anggarkan kembali pada tahun 2012
2. Pengembangan data base perencanaan daerah melalui pembangunan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan unit-unit perencanaan pada tingkat SKPD dan atau unit terkait lainnya.
3. Pembuatan regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman yang akan mengikat komitmen bersama serta mengarahkan konsistensi proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
4. Sinkronisasi dan pengintegrasian rencana sektoral serta rencana wilayah secara berkala dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana termasuk perencana dilingkungan SKPD melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan, magang, workshop, serta pembinaan kekhususan dibidang perencanaan.

5. Urusan Wajib Perhubungan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Urusan ini dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur perhubungan maupun perkembangan wilayah secara berkesinambungan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2011 Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.556.244.000 dengan realisasi anggaran Rp. 1.556.244.000 atau 100%.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari program dan kegiatan melalui Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi untuk urusan perhubungan yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan :
 - a. Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir dalam peningkatan keselamatan penumpang



- b. Meningkatkan kesadaran pengguna angkutan jalan akan pentingnya tertib administrasi dan keselamatan angkutan
 - c. Terdistribusinya bantuan sarana transportasi pedesaan
 - d. Terawasinya pelaksanaan penyaluran melalui pembentukan tim teknis.
 - e. Terjaminnya operasional dan pemeliharaan kendaraan bantuan
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas:
- a. Tersedianya rambu sebagai sarana agar tertib dalam berlalu lintas bagi pengguna jalan sebanyak 200 unit.
 - b. Terlaksananya pengecatan marka jalan dan zoss 1700 M.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perhubungan antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran para sopir dalam mengutamakan keselamatan penumpang.
- b. Meningkatnya tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
- c. Terbukanya keterisolasian masyarakat di desa dalam memasarkan hasil produksinya ke pasar setempat (5 desa dan 165 desa).
- d. Terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama pada urusan perhubungan di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

1. Belum adanya fasilitas perhubungan terutama terminal sebagai pengatur simpul.
2. Belum adanya fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan tertentu.
3. Belum adanya fasilitas penjamin keselamatan transportasi berupa fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
4. Kurangnya sumber daya aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan darat.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, beberapa solusi :



1. Mengupayakan pembangunan terminal tipe C, fasilitas keselamatan jalan, fasilitas penjamin keselamatan transportasi berupa balai pengujian kendaraan bermotor yang terstandarisasi.
2. Perlu adanya bimbingan pelatihan dibidang pengujian kendaraan bermotor tingkat pemula.
3. Perlu adanya pendistribusian pegawai PNS yang telah mengikuti pelatihan termasuk penyidik PNS khusus bidang perhubungan oleh BKD-diklat.

6. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup didukung dengan penganggaran dari APBD 2011 sebesar Rp. 2.046.448.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.722.143.450,00 atau 84,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, melalui kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, melalui kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).



c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Keterbatasan anggaran untuk APBD dan APBN.
2. Kurangnya teknisi Laboratorium.
3. Penempatan PNS tidak sesuai dengan latar belakang.
4. Belum ada kejelasan RTRWK Bone Bolango.
5. Kurangnya SDM penunjang kegiatan

Solusi:

1. Sangat diperlukan penambahan jumlah dan pelatihan aparat dinas teknis.
2. Perlu adanya sosialisasi yang intensif dan terpadu tentang penyelenggaraan proyek.
3. Adanya porsi anggaran yang lebih besar dari APBD.
4. Pengisian staf disesuaikan dengan latar pendidikan.
5. Perlu adanya RTRWK yang tetap.

7. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Adapun realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp. 1.243.023.754,00 atau 99.44%.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

Jumlah Program : 1 Program

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 16 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 10 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 6 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :



Implementasi sistem administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun *output* dari kegiatan melalui Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu
 - Terlaksananya penyediaan dana pengoperasian SIAK.
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan):
 - Terlaksananya Penggunaan dan Pemeliharaan jaringan dalam rangka implementasi SIAK.
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan:
 - Terlaksananya pengoperasian SIAK.
4. Pengembangan Data Base Kependudukan:
 - Terlaksananya pengembangan database kependudukan.
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan:
 - Terlaksananya penyediaan dana kebutuhan aparat pelayanan administrasi kependudukan.
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan:
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan KTP.

Adapun *outcome* dari kegiatan melalui Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu
 - Tersedianya dana Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan selama setahun.
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
 - Terpenuhinya dana implementasi SIAK.
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
 - Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan dalam setahun



4. Pengembangan Data Base Kependudukan
 - Tercapainya pelayanan dokumen kependudukan 18.654 lembar selama 1 tahun
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
 - Terpenuhinya dana kebutuhan aparat pelayanan administrasi kependudukan 2 kali selama 1 tahun

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
3. Rendahnya mutu pengendalian pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelayanan administrasi kependudukan masih terpusat di tingkat kabupaten.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Solusi :

1. Peningkatan kualitas tenaga pengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna pelayanan yang optimal antara lain pembangunan gedung yang representatif, kendaraan operasional, sistem informasi jaringan untuk kecamatan.
3. Perlu adanya penertiban dan ketentuan administrasi kependudukan dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan mobile.
5. Pelaksanaan Sosialisasi di 17 Kecamatan tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



8. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk urusan wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran APBD tahun 2011 sebesar Rp.1.890.217.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.828.794.635,00 atau 96,75%

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah:

Jumlah Program : 6 Program

Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 19 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 15 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 4 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
	a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	- Jumlah Honorarium Pegawai Tetap	4 Orang	0
	b. Pelatihan Bagi Palatihan (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	- Jumlah Peserta Pelatihan TOT SDM - Jumlah Kegiatan Penunjang	69 Orang	0 0
2.	Program Keluarga Berencana			
	a. Pembinaan Keluarga Berencana	- Jumlah Penyuluh KB dan PLKB dan PPKBD	1 Kegiatan	700 Orang



B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

1. Program Keluarga Berencana;

- a. Tersedianya dana kegiatan operasional harganas melalui Promosi Pelayanan KHIBA dengan peserta berjumlah 4476 orang.
- b. Tersedianya dan kegiatan operasional harganas dengan peserta berjumlah 4476 Orang.
- c. Tersedianya Sarana mobilitas Tim KB keliling dengan jumlah sarana mobilitas 1 unit.

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan:

- a. Tersedianya dana kependudukan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan selama 1 (satu) tahun.
- b. Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi data Kependudukan selama 1 (satu) tahun

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan, melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang IPTEK:

- a. Tersedianya dana kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) selama 1(satu) Tahun

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak:

- a. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- b. Tersedianya Dana Penyusunan Statistik dan Analisa Gender Selama 1(satu) tahun.

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- b. Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah dengan peserta 50 Orang.
- c. Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Korban KDRT selama 1 (satu) tahun



6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan:

- a. Terlaksananya Peyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
- b. Tersedianya dana sosialisasi program terpadu Peningkatan Perempuan Keluarga sehat sejahtera (P2WKSS dengan peserta berjumlah 102 Orang.
- c. Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha.
- d. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam mengelola Usaha bagi perempuan selama 1 (satu) tahun

Tabel 4.14
Keikutsertaan dalam Program KB
di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 – 2010

TAHUN	IKUT KB	TIDAK KB	JUMLAH
2009	21.053	5.412	26.465
2010	26.575	2.450	28.575
2011	27.204	1.975	29.179

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Bone Bolango

Tabel 4.15
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peserta KB Baru
dan Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan
di Wilayah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 – 2011

TAHUN	Peserta KB Baru								
	IUD	PIL	KDM	OV	OPR	STK	IMPL	Jumlah	%
2009	568	1.478	210	-	25	3.111	941	6.333	131,86
2010	868	2.651	1.076	-	70	3.265	2.469	10.399	162,28
2011	5370	7.143	1.078	70	333	8.331	4.879	27.204	132.30

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bone Bolango

Sedangkan *outcome* yang dihasilkan melalui urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah:



- a. Terlaksananya kegiatan harganas dan operasional PPKBD dengan peserta 4476 Orang.
- b. Terpenuhinya Pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera 1 Unit mobil.
- c. Tercapainya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Selama 1(Satu) tahun.
- d. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data kependudukan selama 1 (satu) Tahun.
- e. Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan melalui Perayaan Hari Ibu (PHI) Selama 1(Satu) Tahun.
- f. Terpenuhinya Data Statistik dan Analisa Gender Selama 1 (Satu) Tahun.
- g. Terpenuhinya Sosialisasi Perlindungan perempuan dan Anak dengan Peserta 50 Orang.
- h. Meningkatnya Pengetahuan tentang perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah selama 1 (satu) Tahun.
- i. Terpenuhinya Peran Serta Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera dengan peserta berjumlah 102 orang..
- j. Terlaksananya kegiatan dalam menunjang Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan selama 1 (satu) tahun

C. Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana terdapat beberapa permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan peran, kapasitas dan kapabilitas perempuan. Masalah itu antara lain adalah :

1. Belum adanya database statistik gender dan Anak.
2. Belum optimalnya peran perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
3. Belum adanya komitmen bersama yang kuat dari satuan kerja pemerintah daerah lainnya untuk mengedepankan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Masih rendahnya validitas data pasangan usia subur dan peserta akseptor KB.



5. Rendahnya animo masyarakat khususnya pasangan usia subur sebagai calon peserta akseptor KB dalam keikutsertaan ber-KB.
6. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana informasi program KB.
7. Kurangnya Petugas Lapangan KB/PPKBD dan Sub PPKBD di Tingkat Desa dan Dusun yang ada di Kecamatan.

Berkenaan dengan permasalahan diatas maka beberapa solusi yang ditempuh antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan potensi dan peran kaum perempuan.
2. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat serta aparatur dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi .
3. Pengembangan database akseptor KB termasuk labelisasi peserta KB.
4. Peningkatan intensitas dan efektivitas sosialisasi program KB dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana informasi KB.
5. Peningkatan ketersediaan sumber daya Petugas Lapangan KB/PPKBD dan Sub PPKBD.

9. Urusan Wajib Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk urusan wajib Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 dialokasikan anggaran APBD tahun 2011 sebesar Rp.1.150.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.260.000,00 atau 9,57%.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:

1. Bidang Sosial



1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - a) Tersedianya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS Lainnya.
 - b) Tersedianya bimbingan bantuan bagi keluarga miskin.
 - c) Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi PMKS.
 - d) Terlaksananya rehabilitasi social rumah tidak layak huni.
 - e) Terlaksananya pemberdayaan komunitas adat terpencil.
2. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a) Terlaksananya bimbingan dan bantuan KIE Konseling dan kampanye social bagi PMKS.
 - b) Terlaksananya bimbingan dan bantuan social bagi anak terlantar, termasuk anak cacat dan anak nakal.
 - c) Terlaksananya Penanganan Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tersedianya lembaga/Orsos yang menjalankan penyelenggaraan kesos.

2. Bidang Ketenagakerjaan

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tersedianya Fasilitasi Pelatihan Ketrampilan, Keahlian, Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, serta Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan, pengawasan serta peningkatan kesejahteraan pekerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

3. Bidang Transmigrasi

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tersedianya jumlah stimulan pendukung sarana dan prasarana Eksosbud di kawasan transmigrasi

**DATA JUMLAH RTLH DAN JUMLAH KAT
DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2009-2011**

TAHUN	RTLH	KAT
2009	6072 unit	460
2010	6072 unit	460
2011	6022+Brp dibangun Sos	460

**RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011**

NO	KECAMATAN	JUM- LAH DESA	KLASTER			KRONIS MISKIN	JUM- LAH
			HAM- PIR TIDAK MISKIN	HAMPIR MISKIN	MISKIN		
1	BONE	13	-	222	458	339	1019
2	BONE RAYA	8	-	92	212	240	544
3	BONE PANTAI	13	-	330	638	315	1283
4	BOTUPINGGE	8	-	133	192	93	418
5	BULANGO SELATAN	10	-	187	153	64	404
6	BULANGO TIMUR	5	-	128	123	59	310
7	BULANGO ULU	7	-	116	220	127	463
8	BULANGO UTARA	9	-	227	324	157	708
9	BULAWA	9	-	122	165	124	411
10	KABILA	12	-	397	580	266	1243
11	KABILA BONE	9	-	271	486	440	1197



12	SUWAWA SELATAN	8	-	239	260	116	615
13	SUWAWA TENGAH	6	-	239	331	144	714
14	SUWAWA TIMUR	11	-	265	405	190	860
15	SUWAWA	10	-	319	421	172	912
16	TAPA	7	-	204	210	83	497
17	TILONGKABILA	12	-	444	526	263	1233
JUMLAH		-	-	3935	5704	3192	12831

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango

**KONDISI KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2009-2011**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	Jumlah Angkatan Kerja (15-60 Tahun)	79.334	801	171
2	Jumlah Penduduk Bekerja	74.732	306	-
3	Jumlah Pengangguran Terbuka	3.064	1.634	171
4	Jumlah Pencari Kerja	4.491	1.634	171
5	Pencari Kerja Yang Terdaftar	-	801	171
6	Rata-Rata Upah MiN. (Rp,-)	700.000	762.500	

Sumber Data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Bone Bolango

Sedangkan *outcome* yang dihasilkan melalui urusan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1 Bidang Sosial

- a) Terlaksananya Tata Kelola Urusan Kesejahteraan Sosial
20 KBSP dari 61 KBSP



- b) Terciptanya sarana dan prasarana usaha yang memadai
250 RTM dari 12.721 RTM
- c) Terlaksananya ketrampilan bagi anak terlantar, cacat & nakal
30 Anak Terlantar (dari 711 AT)
20 Anak Cacat (dari 397 AC)
20 Anak Nakal (dari 219 AN)
- d) Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat
10 dari 93 KT dan Orsos

2 Bidang Ketenagakerjaan

Adanya perusahaan yang menerapkan K3 & Jamsostek, yakni 20 Perusahaan

3 Bidang Transmigrasi

Terwujudnya kawasan transmigrasi yang layak lingkungan, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat berdaya guna, yakni 4 Unit/Jenis

C. Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan program sosial tenaga kerja dan transmigrasi terdapat beberapa permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan peran, kapasitas dan kapabilitas. Masalah itu antara lain adalah:

- 1) Aspek ekonomi
 - a) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi
 - b) Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
 - c) Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - d) Tingkat pendapatan masyarakat yang tidak merata sehingga memberikan efek ketimpangan kehidupan sosial
 - e) Pendapatan masyarakat yang rendah pada umumnya, berefek negatif pada lemahnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 2) Aspek teknis dan pendanaan
 - a) Validitas data, data tidak terkini dan kadang subjektif menyebabkan kegiatan untuk pemberdayaan sosial tidak tepat sasaran.



- b) Keterbatasan anggaran setiap tahunnya untuk usaha pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c) Masih minimnya realisasi kegiatan untuk pemberian bantuan sosial kepada PMKS dan PSKS.
- 3) Aspek lingkungan, sosial, budaya
- a) Mental miskin yang ada pada masyarakat, Fenomena yang ada pada setiap pendataan Fakir Miskin (FM) angka FM meningkat.
 - b) Budaya malas dan kurangnya nilai inovasi dan kreasi pada masyarakat.
 - c) Budaya Konsumtif masyarakat yang cukup tinggi, bantuan sosial yang diberikan bukannya dimanfaatkan sesuai ketentuan berlaku tapi di jual untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - d) Kondisi alam yang tak lagi dapat di prediksi (musim hujan dan musim kering yang tidak beraturan dan berkepanjangan)
 - e) Kondisi Pasar kerja masih diwarnai dengan tidak seimbangnya jumlah penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan jumlah pengangguran masih sangat tinggi dan terus bertambah.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka beberapa solusi yang ditempuh antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- 2) Meningkatnya aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kepekaan sosial masyarakat terhadap pelayanan masalah sosial dasar secara melembaga dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan terselenggaranya bantuan dan jaminan sosial;
- 4) Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi, ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja serta terbinaanya hubungan industrial dan perlindungan sosial tenaga kerja;



- 5) Terwujudnya kawasan transmigrasi yang layak huni, berdaya guna dan berhasil guna.
- 6) Terwujudnya keberfungsian sosial.

10. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.415.389.200,- atau 99,41%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga antara lain:

- 1) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
 - a) Pendataan tentang potensi kepemudaan pada tahun 2011
- 2) Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - a) Terikut sertanya 100 orang masyarakat dalam Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda tahun 2011
 - b) Terpilihnya Siswa terbaik hasil seleksi peserta PASKIBRAKA tingkat Kab. Bone Bolango sebanyak 18 orang untuk mengikuti seleksi ditingkat Provinsi Gorontalo
 - c) Terpilihnya 9 orang pemuda untuk mengikuti seleksi Bhati Pemuda Antar Provinsi (BPAP) di tingkat Provinsi Gorontalo
- 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - a) Terlatihnya 50 orang pemuda dlm bidang Automotive dan keterampilan Menjahit
- 4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a) Terselenggaranya pembinaan prestasi 1 cabang olahraga pada tahun 2011



- b) Terselenggaranya pengiriman atlet pada event olahraga di tingkat daerah (PORPROV)
 - c) Terlaksananya senam aerobik selama 48 kali pada tahun 2011
 - d) Terselenggaranya pengiriman atlet dalam event olahraga tingkat Nasional (Kejurnas) pada 4 cabang olahraga.
 - e) Terselenggaranya pelaksanaan lomba 2 cabang olahraga memperingati HUT Proklamasi dan terikutsertanya 350 orang dalam upacara memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) pada tahun 2011
 - f) Terpilihnya 13 orang atlet olahraga tradisional yg untuk mengikuti seleksi ditingkat Provinsi
 - g) Terselenggaranya pelaksanaan lomba 4 cabang olahraga memperingati HUT Bone Bolango pada tahun 2011
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- a) terselesaikannya pembangunan/pembuatan total 2 prasarana olahraga milik Pemda Bone Bolango pada tahun 2011

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemuda dan olahraga

- 1) Tersedianya dokumen informasi tentang potensi kepemudaan yg up to date sebanyak 4 buku
- 2) meningkatnya jumlah pemuda/pemudi yang terpilih di tingkat provinsi sebagai peserta BPAP untuk mewakili Provinsi Gorontalo dari 2 orang (2010) menjadi 4 orang (2011)
- 3) Meningkatnya prosentasi keterampilan para pemuda dalam berwirausaha sebanyak 5%
- 4) Tercapainya prestasi pada event olahraga :
 - 1) Peringkat 2 Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) di Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo
 - 2) Peringkat 21 Kejuaraan Nasional tahun 2011
- 5) Meningkatnya kualitas 2 prasarana olahraga.



c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemuda dan Olahraga adalah :

- 1) Belum terealisasinya pembangunan GOR di Kabupaten Bone Bolango
- 2) Masih kurangnya prasarana pemuda dan olahraga di Kabupaten Bone Bolango
- 3) Belum optimalnya pembinaan olahraga secara berkesinambungan melalui penjenjangan, pemassalan dan pembibitan yang berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian prestasi olahraga.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan GOR
- 2) Pengalokasian anggaran untuk peningkatan prasarana Pemuda dan olahraga di Kabupaten Bone Bolango
- 3) Peningkatan pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan.

11. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk tahun 2011, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan anggaran sebesar Rp. 921.250.000,00.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 919.728.700,00 atau 99.83%.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun *output* dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan :



- a. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan, melalui Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lain)
5. Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental EKS Penyandang Penyakit Sosial
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurang optimalnya pelaksanaan Tupoksi Perlindungan Masyarakat
2. Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai nasionalisme.

Solusi dari permasalahan diatas yakni :

1. Perlu peningkatan pembinaan dan pengendalian Tupoksi Perlindungan Masyarakat.
2. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan secara terus menerus atau bentuk kegiatan lainnya kepada seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda dengan melibatkan peran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan.

12. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada urusan wajib ini terdiri dari beberapa SKPD, seperti Sekertariat Daerah yang terdiri dari beberapa Bagian, Sekertariat DPRD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah dan Kantor



Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

❖ **Sekretariat Daerah**

a. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2011, melalui Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Umum dan Kehumasan pada Sekretariat Daerah telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum dengan anggaran sebesar Rp. 17.449.322.212,00. Adapun Program yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan, melalui kegiatan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan;
- 2) Program Penataan Perundang-Undangan, melalui Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, melalui kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
- 5) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, melalui kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 15.751.797.434,00 atau 90%.

❖ **Sekretariat DPRD**

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk tahun 2011, melalui Sekretariat DPRD telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum dengan anggaran sebesar



Rp. 10.919.203.722,00. Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 10.347.518.227,00 atau 95%.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Sekretariat DPRD adalah:

Jumlah Program : 2 Program

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 16 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 13 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 3 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
	a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	- Jumlah Honorarium PNS	20 Orang	0
		- Jumlah Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/ Narasumber	6 Orang	0
		- Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	0

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output Program yang dilaksanakan adalah

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan:
 - i) Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna;
 - ii) Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
 - iii) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - iv) Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - v) Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah;
 - vi) Terlaksananya Kegiatan Reses;



- vii) Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
- 2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, melalui kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
- 3) Program peningkatan Kapasitas
- 4) Program Peningkatan disiplin Aparatur
- 5) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 6) Program optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi
- 7) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 8) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih kurang pemahaman akan tugas pokok dan fungsi aparat.
2. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas
3. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
4. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politik yang cukup kental dilingkungan kerja.
5. Kurang pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD, antara lain pada masalah perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah.

Solusi :

1. Adanya system organisasi yang ditinjau dari elemen penting organisasi
2. Membuka kesempatan mengikuti Bimtek atau Diklat bagi aparatur.
3. Penetapan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan pejabat pelaksana secara jelas dan sistematis.



4. Menjalin hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.
5. Menyusun kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

❖ **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan akhir Tahun Anggaran 2011, realisasi pendapatan daerah yakni sebesar Rp.445.257.281.656,33 atau 101,28 % dari target yang direncanakan sebesar Rp.439.647.975.952,00. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 15.645.914.574,33 yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.1.368.706.120,00, hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.802.705.101,00. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 4.474.503.353,33.
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 318.637.523.275,00 yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak / bukan pajak sebesar Rp. 23.921.816.275,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.267.662.207.000,00. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 27.053.500.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 110.973.843.807,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 80.520.000,00, Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan daerah lainnya sebesar Rp.6.044.287.367,00, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp.104.849.036.440,00.

Selengkapnya target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4.18.



Tabel 4.18
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11,074,161,153.00	15,645,914,574.33	141.28
	a. Pendapatan Pajak Daerah	1,593,479,264.00	1,368,706,120.00	85.89
	b. Hasil Retribusi Daerah	4,167,860,002.00	9,802,705,101.00	235.20
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,312,821,887.00	4,474,503,353.33	84.22
2	DANA PERIMBANGAN	428,493,294,799.00	429,530,847,082.00	100.24
	a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	318,644,357,609.00	318,637,523,275.00	100.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	23,504,669,384.00	23,507,907,669.00	100.01
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	228,234,225.00	413,908,606.00	181.35
	Dana Alokasi Umum (DAU)	267,849,954,000.00	267,662,207,000.00	99.93
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	27,061,500,000.00	27,053,500,000.00	99.97
	b. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Lainnya	104,848,937,190.00	104,849,036,440.00	100.00
	Dana Penyesuaian	104,848,937,190.00	104,849,036,440.00	100.00
	c. Transfer Pemerintah Provinsi	5,000,000,000.00	6,044,287,367.00	120.89
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5,000,000,000.00	6,044,287,367.00	120.89
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80,520,000.00	80,520,000.00	100.00
	Pendapatan Hibah	80,520,000.00	80,520,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN	439,647,975,952.00	445,257,281,656.33	101.28

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 (setelah perubahan)

B. Permasalahan dan Solusi.

Dari **Tabel 4.18** diketahui bahwa total realisasi pendapatan melampaui mencapai 101,28 %, namun ada beberapa pos yang tidak mencapai target, walaupun tertutupi oleh beberapa pos yang mengalami pelampauan penerimaan. Rendahnya persentase realisasi pendapatan dipengaruhi oleh pos pendapatan pajak daerah yang masih rendah dengan realisasi hanya mencapai 85,89 %. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurang tepatnya kajian terhadap obyek-obyek potensi



pendapatan daerah, kurangnya prasarana dan sarana penunjang dalam hal pemerolehan pendapatan, masih rendahnya nilai transaksi tanah dan bangunan sehingga tidak dapat diperhitungkan pada pengenaan biaya BPHTB, serta masih rendahnya pemahaman pengguna jasa terhadap pajak daerah.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan pendapatan tersebut khususnya pajak daerah, hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi serta menentukan langkah-langkah strategis pemecahan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara bertahap juga berupaya untuk meningkatkan target penerimaan PAD dan merealisasikan semua target yang telah ditetapkan. Namun seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerimaan pendapatan dari sektor PAD jika dibandingkan dengan daerah lain.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran membayar pajak sebagian masyarakat.
- c. Adanya beberapa unit usaha yang untuk sementara tidak berproduksi karena perbaikan manajemen, renovasi, dan lain-lain.
- d. Masih rendahnya kinerja aparat pemungut/penagih pajak/retribusi.
- e. Keengganan para pengusaha/obyek pajak untuk dinaikan pajaknya dengan alasan biaya operasional perusahaan sangat tinggi.
- f. Kurang efektifnya pemberlakuan sistim bill pada obyek pajak.
- g. Masih adanya obyek pajak/pelaku usaha yang mengeluarkan biaya-biaya lain sehingga menimbulkan biaya tinggi.
- h. Adanya aturan-aturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan utamanya mengenai tarif pengenaan pajak dan retribusi, sehingga perlu dilakukan revisi atau penyesuaian.



Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah pemecahan antara lain :

- a. Perlu dilakukan kaji ulang potensi dan target pendapatan asli daerah. Kajian tersebut dibutuhkan untuk mendata potensi pendapatan daerah, menyusun payung hukumnya dan menetapkan target realistis pendapatan sesuai dengan kondisi faktual ekonomi daerah.
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus terus melakukan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan dengan mengundang *stakeholders* yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan maupun sosialisasi yang dilaksanakan melalui media cetak.
- c. Bagi usaha yang tutup atau berhenti sementara aktifitas produksinya, terus dilakukan pemantauan dan pembinaan serta memberikan alternatif usaha baru.
- d. Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada aparat pemungut pajak/retribusi secara terus menerus dalam rangka menciptakan sumber daya pelayanan yang berkualitas.
- e. Melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak yang dikenakan dengan peningkatan tarif pajak / retribusi, bahkan sebelum dinaikkan, pihak BKAD seyogianya melakukan uji petik selama sebulan bahkan lebih agar dapat diketahui secara pasti omset produksi yang terjual dan wajib dikenakan pajak.
- f. Karena tidak efektifnya penggunaan bill, maka DPPKAD perlu menetapkan target pembayaran rata-rata setiap bulannya berdasar hasil uji petik.
- g. Untuk pungutan tidak resmi yang dapat menimbulkan biaya tinggi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya.
- h. Melakukan penyesuaian atau revisi terhadap pengenaan tarif pajak/retribusi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi.
- i. Memberikan keringanan denda pajak bagi wajib pajak.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan masyarakat baik sektor perhubungan, peternakan, perikanan,



perdagangan, kesehatan, pariwisata dan sektor ekonomi lainnya yang berpotensi menunjang peningkatan PAD.

❖ Inspektorat Daerah

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pemerintahan umum pada Inspektorat Daerah sebesar Rp. 4.545.301.791,00 atau 94,28%.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tahun 2011 melalui Inspektorat Daerah telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 4.821.263.559,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:
 - i) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - ii) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - iii) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - iv) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif;
- 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Inspektorat Daerah adalah:

Jumlah Program : 2 Program

Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 10 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 5 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 5 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :



N O	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TAR-GET	REALI SASI
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	139 LHP	136 LHP
	b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Jumlah Kasus yang Ditangani (Non Reguler) - Jumlah Kasus yang Ditangani (Khusus Kasus)	11 LHP 8 LHP	4 LHP 7 LHP
	c. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	- Jumlah Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti	913 Rekom	642 Rekom
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
	a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	- Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Diklat Luar Daerah	8 Orang	5 Orang

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2010 ini belum menemui permasalahan yang berarti.

❖ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kantor pelayanan terpadu sebesar Rp. 741.466.952,00 atau 99%.



b. Realisasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan urusan wajib di tahun 2010 melalui kantor pelayanan terpadu telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 750.000.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, melalui kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
- 2) Program penataan peraturan perundang-undangan, melalui kegiatan Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Tahun 2011 ini belum menemui permasalahan yang berarti.

❖ Badan Kepegawaian Daerah dan DIKLAT

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib kepegawaian melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 3.346.615.910,00 atau 99%.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat, tetapi lebih terarah kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan harapan Aparatur yang dibina dan dikembangkan sumber dayanya dapat meningkatkan kerjanya, hal tersebut juga berdampak pada peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk tahun 2011, melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 3.435.000.000,00. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:



- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah sebanyak 388 peserta;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah sebanyak 2 orang;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan:
 - a) Seleksi Penerimaan Calon PNS sebanyak 255 orang;
 - b) Penempatan PNS;
 - c) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
 - d) Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - e) Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas sebanyak 48 orang;

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah adalah:

Jumlah Program : 3 Program

Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 7 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 2 Keluaran

Jumlah keluaran yang melebihi target : 4 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 1 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Seleksi Penerimaan Calon PNS	- Jumlah Lulusan CPNS yang Diseleksi	255 Orang	31 Orang



c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Masih rendahnya kompetensi, kualitas dan profesionalisme aparatur daerah.
2. Proses pembinaan karir dan pengembangan aparatur daerah yang belum sepenuhnya mengacu pada proses prosedur dan mekanisme pembinaan pegawai negeri sipil.
3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian, sebagai akibat belum adanya standar pelayanan dan prosedur tetap pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Proses perekerutan pegawai belum mempertimbangkan kualifikasin dan kebutuhan formasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
5. Belum adanya sarana dan prasarana diklat dan dukungan pembaiyaannya yang belum memadai.
6. Belum adanya penerapan manajemen *reward dan punishment*.

Solusi :

1. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam bentuk pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan *assesment center* dalam proses seleksi penempatan dalam jabatan.
2. Pembuatan standar pelayanan minimal dan prosedur tetap pengelolaan administrasi kepegawaian dan didukung dengan system Informasi Manajemen Kepegawaian.
3. Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan PNS dalam rangka penataan dan penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan dan organisasi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
4. Mengoptimalkan system pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkesinambungan berdasarkan jenjang kediklatan yang didukung dengan pembiayaan dan sarana parasana yang memadai.



5. Penataan manajemen reward dan punishment aparatur melalui pembuatan legislasi daerah dan dilakukan proses Komisi Disiplin Pegawai.

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk tahun 2011, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa dengan anggaran APBD sebesar Rp.1.578.760.000, Realisasi sebesar Rp. 1.524.928.425 atau 96,85%. untuk Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp. 9.882.000.000 (pada pos belanja bantuan DPPKAD) Realisasi sebesar Rp. 9.771.219.506 atau 98,87% dan untuk anggaran APBN Urusan Bersama (UB) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebesar Rp. 32.335.855.000 dan Realisasi sebesar Rp. 32.128.521.400 atau 99,36%.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa antara lain :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

- a. Terlaksananya sosialisasi P2WKSS Tingkat Kabupaten sebanyak 150 orang.
- b. Terlaksananya pelatihan tenaga operator sistim informasi data profil desa/keurahan sebanyak 150 orang.
- c. Terlaksananya pelatihan tenaga operator sistim informasi posyandu (SIP) sebanyak 150 orang.
- d. Terlaksananya lomba inovasi TTG Tkt. Kabupaten sebanyak 100 orang
- e. Terlaksananya gelar TTG Tingkat Nasional sebanyak 1 kali.
- f. Terlaksananya Bulan bhakti gotong royong Tingkat Kabupaten di 17 Kecamatan dan 150 Desa/Kelurahan.



- 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**
 - a. Tersedianya dana pembinaan administrasi program (PAP) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) di 17 Kecamatan.
- 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**
 - a. Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Meningkatnya kualitas perempuan dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera sebanyak 150 orang.
2. Terlatihnya tenaga operator yang handal dan mampu mengoperasikan sistim informasi data profil desa/kelurahan yang akurat sebanyak 150 orang.
3. Terlatihnya tenaga operator yang handal dan mampu mengoperasikan sistim informasi posyandu (SIP) yang akurat sebanyak 150 orang.
4. Diraihnya penghargaan/Juara I Lomba inovasi TTG Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Gubernur Gorontalo kepada SMK Negeri Model Gorontalo Kecamatan Botupingge dengan hasil karya “ CUKA ORGANIK AIR KELAPA.” Dan berhak mewakili Provinsi Gorontalo pada Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2011 yang dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
5. Diraihnya penghargaan/Juara III Lomba inovasi TTG Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Gubernur Gorontalo kepada Pondok Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa dengan hasil karya “ FORMULA ANTI SERANGGA DARI LIMBAH DAPUR.” Dan berhak mewakili Provinsi Gorontalo pada Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2011 yang dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
6. Diraihnya penghargaan/Juara I Lomba inovasi TTG Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Bupati Bone Bolango kepada SMK Negeri Model Gorontalo Kecamatan Botupingge dengan hasil karya “ CUKA ORGANIK AIR KELAPA.”



7. Diraihnya penghargaan/Juara II Lomba inovasi TTG Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Bupati Bone Bolango kepada Pondok Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa dengan hasil karya “ FORMULA ANTI SERANGGA DARI LIMBAH DAPUR”.
8. Diraihnya penghargaan/Juara III Lomba inovasi TTG Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Bupati Bone Bolango kepada SMK Negeri Model Gorontalo Kecamatan Botupingge dengan hasil karya “ KECAP BONGO (AIR KELAPA)..
9. Diraihnya penghargaan/Juara III Lomba inovasi TTG Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Bupati Bone Bolango kepada SMK Negeri Model Gorontalo Kecamatan Botupingge dengan hasil karya “ KECAP BONGO (AIR KELAPA).”
10. Diraihnya penghargaan/Juara harapan I Lomba inovasi TTG Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 berupa bonus uang tunai dari Bupati Bone Bolango kepada SMA NEGERI I SUWAWA TIMUR Kecamatan Suwawa Timur dengan hasil karya “APLIKASI BEL SEKOLAH ELEKTRONIK.”
11. Tereksposnya hasil TTG di Tingkat Nasional (di Kota Kendari Sulawesi Tenggara) Tahun 2011 sebanyak 1 kali.
12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa di 17 Kecamatan dan 150 desa/kelurahan.
13. Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) melalui dana pembinaan administrasi program (PAP) di 17 Kecamatan.
14. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa sebanyak 150 orang.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :



- i) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat/keluarga khususnya untuk bisa mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki
- ii) Kurangnya modal usaha yang dimiliki sendiri maupun bantuan stimulan lainnya
- iii) Kurangnya fasilitas/keterampilan yang dimiliki oleh Aparatur pemerintah Desa/Kel dan Petugas lapangan dalam pengisian profil desa dan Sistem informasi posyandu (SIP)
- iv) Belum semua Desa yang ada memiliki jaringan listrik
- v) Belum tersedianya anggaran yang dialokasikan untuk Aparatur pemerintah Desa/Kel dan Petugas lapangan dalam pengisian profil Desa/Kel dan Sistem informasi posyandu (SIP)
- vi) Posyantekdes yang ada di Kecamatan belum optimal dalam peran dan fungsinya.
- vii) Terbatasnya anggaran dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- viii) Masih adanya sebagian Desa yang belum melaksanakan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005
- ix) Belum maksimalnya komitmen pemerintah melalui penyiapan dana pembinaan administrasi program (PAP) sebagai konsekuensi pelaksanaan program yang didanai oleh APBN
- x) Belum maksimalnya sistem koordinasi lintas sektor, antara pelaku ADD, dan pelaksana, baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa itu sendiri.
- xi) Belum maksimalnya sumber daya manusia (SDM) pengelola ADD

Solusi :

1. Mengadakan pelatihan keterampilan ibu rumah tangga/keluarga sesuai potensi yang dimiliki di desa.
2. Peningkatan SDM setiap tahunnya bagi Aparatur pemerintah desa/petugas lapangan tentang pengisian profil desa dan sistem informasi posyandu (SIP).
3. Mengalokasikan anggaran bagi aparatur pemerintah desa/petugas lapangan sebagai stimulan.



4. Menggiatkan Posyantekdes yang ada di Kecamatan sesuai peran dan fungsinya.
5. Perlu adanya penambahan anggaran dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
6. Perlunya dukungan yang lebih optimal dari pemerintah daerah dan kecamatan tentang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
7. Meningkatkan koordinasi dengan unsur tehknokrat dan politisi dalam penyiapan dana pembinaan administrasi program (PAP) pada program kegiatan yang didanai oleh APBN, guna untuk menunjang kelancaran operasional pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Bone Bolango.
8. Memaksimalkan fungsi koordinasi lintas sector, serta pemantapan secara terus menerus sumber daya manusia (SDM) pengelola alokasi dana desa dengan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa

14. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk tahun 2011, melalui Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika dengan anggaran sebesar Rp. 158.800.000 dan realisasi Rp. 158.800.000 atau 100% .

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :
 - a. Terlaksananya penetapan domain website Kabupaten Bone Bolango
 - b. Terlaksananya secara merata penggunaan internet sehat di dunia pendidikan
 - c. Terlaksananya pendataan warnet/tv kabel di wilayah kabupaten bone bolango



- d. Tersedianya Fasilitas Komunikasi Informasi
- e. Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Informasi

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada pengelolaan kekayaan budaya antara lain :

1. Terintegrasinya domain website kabupaten bone bolango kominfo.
2. Terinformasinya tata cara internet sehat bagi para pelajar.
3. Adanya database tentang warnet/tv kabel dari wilayah kabupaten bone bolango.
4. Terpenuhinya Fasilitas Komunikasi Informasi.

C. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

1. Berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika ditemui masalah-masalah belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan dalam mengakses, mengintegrasikan, mengintegrasikan dan mempublikasikan data/informasi termasuk dalam pengelolaan data informasi dan peningkatan layanan publik.

Solusi :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sistem informasi kemudian telah dilakukan peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika.

15. Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan anggaran Rp. 510.129.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 506.683.200,00 atau 96%.



B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari kegiatan dalam urusan perpustakaan dan kearsipan meliputi :

1. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur, melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, melalui Kegiatan Pengumpulan Data
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, melalui kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
 - b. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
 - c. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

C. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

1. Sarana dan Prasarana belum memadai.
2. Belum optimalnya sumber daya manusia khususnya tenaga pustakawan.
3. Masih kurangnya minat baca pada masyarakat.

Solusi :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sistem informasi perpustakaan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional.
3. Perlunya Diklat fungsional Pustakawan
4. Mengadakan sosialisasi minat baca ke desa-desa khususnya di daerah-daerah terpencil



II. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Urusan Pilihan Pertanian

❖ Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan.

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sebesar Rp. 1.032.850.000,00. Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan pilihan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah sebesar Rp. 860.996.000,00 atau 83%.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah:

Jumlah Program : 7 Program

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 24 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 17 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 7 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALISASI
1.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
2.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
3.	Program Pencegahan dan			



	Penanggulangan Penyakit Ternak			
	a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	- Jumlah Petugas Kesehatan Ternak	6 Spesialis	0
		- Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	1 Kegiatan	0
4.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
	a. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	- Jumlah Kegiatan Promosi	1 Kegiatan	0
		- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, melalui kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan:
 - a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - Tahun 2008, dilaksanakan di desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila dan Desa Olele Kecamatan Kabila Bone
 - Tahun 2009, dilaksanakan di Desa Dunggala Kecamatan Tapa
 - Tahun 2010, dilaksanakan di Desa Ilomata Kecamatan Bulango Ulu
 - Tahun 2011, dilaksanakan di Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah

Keterangan :

- Tahap mandiri : Desa Lonuo dan Desa Olele pada tahun 2012
- Tahap pengembangan : Desa Dunggala pada tahun 2011
- Tahap pemenuhan : Desa Ilomata pada tahun 2010



- *Tahap persiapan : Desa Tolomato pada tahun 2011*
- b. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
 - Bibit kelapa dalam 25 ha (3.575 pohon), di Kecamatan Bone Pantai
 - Bibit kakao 25 ha (12.500 pohon), di Kecamatan Bone Raya 10 ha, Kecamatan Suwawa Timur 5 ha, Kecamatan Suwawa Selatan 5 ha, Kecamatan Bone 5 ha
 - Bibit kemiri 5 ha (500 pohon), di Kecamatan Botupingge
- c. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan/pertanian
 - Benih jagung hibrida 76 ha (1.140 kg), di Kecamatan Suwawa, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Bone Raya
 - Benih padi non hibrida 10 ha (250 kg), di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila (kelompok tani Ampibi)
- 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - Pengadaan alat translator 2 unit
 - Kelompok tani Mootilango Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa, 1 unit
 - Kelompok tani Huyula II Desa Dutohe Kecamatan Kabila, 1 unit
- 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
 - Rehab jaringan irigasi Desa/Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila ± 156 M

Data perkembangan Tanaman Pangan di kabupaten Bone Bolango dari tahun 2009 samapi dengana 2011 dapa dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini.



Tabel 4.19
Data Perkembangan Tanaman Pangan
Tahun 2009– 2011

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010	2011
1	Padi			
	Luas Tanam (Ha)	4.880	4.353	3.965
	Luas Panen (Ha)	3.626	3.780	5.804
	Produktivitas (Ton/Ha)	6,5	5,2	5,2
	Produksi (Ton)	23.569	19.656	30.181
2	Jagung			
	Luas Tanam (Ha)	3.839	4.268	2.196
	Luas Panen (Ha)	3,487	3,513	4,511
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,0	5,2	4,2
	Produksi (Ton)	17,434	18,267	18,946
3	Kacang Tanah			
	Luas Tanam (Ha)	242	138	87
	Luas Panen (Ha)	243	191	113
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	1	1
	Produksi (Ton)	243	191	113
4	Kacang Hijau			
	Luas Tanam (Ha)	20	11	34
	Luas Panen (Ha)	14	16	20
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,95	0,95	0,95
	Produksi (Ton)	13,3	15,2	19
5	Kacang Kedelai			
	Luas Tanam (Ha)	8	-	-
	Luas Panen (Ha)	37	-	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	-	-
	Produksi (Ton)	37	-	-
6	Ubi Jalar			
	Luas Tanam (Ha)	120	114	39
	Luas Panen (Ha)	101	130	34
	Produktivitas (Ton/Ha)	7	7	7
	Produksi (Ton)	707	910	238
7	Ubi Kayu			
	Luas Tanam (Ha)	164	9	41
	Luas Panen (Ha)	140	17	60
	Produktivitas (Ton/Ha)	8	7	7
	Produksi (Ton)	1,120	135	420

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kab. Bone Bolango

- ❖ Padi ; Luas tanam padi pada tahun 2011 seluas 3.965 ha dan luas panen 5.804 ha merupakan tambahan sisa tanam yang tidak dipanen pada tahun 2010, artinya nanti dipanen pada tahun 2011 sehingga total panen pada tahun 2011 adalah 5.804 ha dengan produktivitas 5.2 ton/ha dengan total produksi 30.181 ton
- ❖ Jagung ; Menurunnya luas tanam jagung tahun 2011 yang seluas 2.196 ha dibandingkan tahun 2010, disebabkan berkurangnya bantuan benih jagung yang bersumber pada dana APBD/APBN



sedangkan luas panen tahun 2011 seluas 4.511 ha merupakan tambahan sisa tanam yang tidak dipanen pada tahun 2010, artinya nanti dipanen pada tahun 2011 sehingga total panen pada tahun 2011 adalah 4.511 ha, sedangkan produktivitas tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010, pada tahun 2011 produktivitas 4.2 ton/ha, hal ini di sebabkan oleh adanya musim kemarau

Tabel 4.20
Data Perkembangan Tanaman Holtikultura
Tahun 2009 – 2011

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010	2011
1	Bawang Merah			
	Luas Tanam (Ha)	6	N/A	-
	Luas Panen (Ha)	7	1	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	60	1	-
	Produksi (Ton)	420	1	-
2	Petsai/Sawi			
	Luas Tanam (Ha)	9	-	-
	Luas Panen (Ha)	8	-	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	150	-	-
	Produksi (Ton)	12	-	-
3	Cabe Rawit			
	Luas Tanam (Ha)	88	138	13
	Luas Panen (Ha)	103	373	144
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30	30
	Produksi (Ton)	30,9	11.190	432
4	Tomat			
	Luas Tanam (Ha)	58	72	6
	Luas Panen (Ha)	40	61	9
	Produktivitas (Ton/Ha)	100	100	150
	Produksi (Ton)	40	6.100	13,5
5	Terong			
	Luas Tanam (Ha)	52	44	8
	Luas Panen (Ha)	46	30	7
	Produktivitas (Ton/Ha)	100	100	150
	Produksi (Ton)	46	50	10,5
6	Buncis			
	Luas Tanam (Ha)	-	10	-
	Luas Panen (Ha)	-	1	-
	Produktivitas (Ton/Ha)	-	100	-
	Produksi (Ton)	-	100	-
7	Ketimun			
	Luas Tanam (Ha)	3	15	28
	Luas Panen (Ha)	3	7	2
	Produktivitas (Ton/Ha)	200	200	150



	Produksi (Ton)	6	1.400	3
8	Kangkung			
	Luas Tanam (Ha)	32	21	11
	Luas Panen (Ha)	19	20	15
	Produktivitas (Ton/Ha)	100	100	250
	Produksi (Ton)	19	200	37,5
9	Bayam			
	Luas Tanam (Ha)	32	21	22
	Luas Panen (Ha)	19	32	25
	Produktivitas (Ton/Ha)	10	10	150
	Produksi (Ton)	19	320	37,5
10	Kacang Panjang			
	Luas Tanam (Ha)	42	47	50
	Luas Panen (Ha)	14	69	57
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30	250
	Produksi (Ton)	42	2.070	142,5

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kab. Bone Bolango

Tabel 4.21
Data Perkembangan Tanaman Perkebunan
Tahun 2009 – 2011

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010	2011
1	Kelapa			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1.205	1.259	1.463
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	5.312,8	5.312,8	5.365,54
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	774,2	774,2	1.097,96
	Produksi (Ton)	7.438	7.438	91.912
2	Kakao			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	1.170	351	1.160,35
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	830	1,384	1.349,54
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	219,6	599,5	587,1
	Produksi (Ton)	166	276,8	47
3	Kemiri			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	369	363	1.086,45
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	660	666,1	3.250,2
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	785
	Produksi (Ton)	330	333	81,13
4	Jambu			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	198	198	52,21
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	542	542	520,10
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	180,65
	Produksi (Ton)	740	740,4	6,12



5	Kapuk			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	81	91	120
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	246	248	63
	Produksi (Ton)	165	124	0,1
6	Pala			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	27	67	25
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	29	39	14,75
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	13,8
	Produksi (Ton)	6	8	0,37
7	Cengkeh			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	313	119	887
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	892	1,191	647,06
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	270	226	1.840
	Produksi (Ton)	446	592	42,41
8	Kopi			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	76	82	124,56
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	315	333,88	351,68
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	65	70,05	73,15
	Produksi (Ton)	79	100	537
9	Aren			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	171	274,3	143,85
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	330	337	353,2
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	20,45
	Produksi (Ton)	165	169	54,09
10	Vanili			
	Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)	-	-	37,39
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	-	-	4,99
	Tanaman Rusak/Tua (Pohon)	-	-	-
	Produksi (Ton)	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.22
Data Perkembangan Tanaman Buah-buahan
Tahun 2009 – 2011

NO	JENIS KOMODITAS	2009	2010*	2011
1	Alpoket			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	428	428	428
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	266	266	55
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20	13
	Produksi (Ton)	53,2	53,2	7,15



2	Belimbing			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	464	464	464
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	451	451	60
	Produktivitas (Ton/Ha)	15	15	15
	Produksi (Ton)	67,65	67,65	9
3	Duku/Langsar			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	8.325	8.325	8325
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	3.505	3.505	3612
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20	20
	Produksi (Ton)	701	701	722,4
4	Durian			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	21.279	21.279	26.279
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	6.590	6.590	5336
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20	15
	Produksi (Ton)	1.318	1.318	800
5	Jambu Biji			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	1.456	1.456	1456
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	995	995	1731
	Produktivitas (Ton/Ha)	50	50	50
	Produksi (Ton)	497,5	497,5	173,1
6	Jambu Air			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	720	720	720
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	463	463	355
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30	6
	Produksi (Ton)	285	285	21,3
7	Jeruk Siam/Kepron			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	1.417	1.417	1417
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	531	531	728
	Produktivitas (Ton/Ha)	35	35	15
	Produksi (Ton)	185,85	185,85	159,2
8	Jeruk Besar			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	125	125	125
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	55	55	117
	Produktivitas (Ton/Ha)	35	35	17
	Produksi (Ton)	19,25	19,25	19,89
9	Mangga			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	42.272	42.272	42.272
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	22.100	22.100	23.120
	Produktivitas (Ton/Ha)	13	13	25
	Produksi (Ton)	2.873	2.873	5.780
10	Nangka			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	6.219	6.219	6.219
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	4.668	4.668	5.500
	Produktivitas (Ton/Ha)	45	45	17



	Produksi (Ton)	2.100,6	2.100,6	935
11	Nenas			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	7.780	7.780	7.780
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	4.950	4.950	4.382
	Produktivitas (Ton/Ha)	2	2	3
	Produksi (Ton)	99	99	131.46
12	Pepaya			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	4.953	4.953	4.953
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	3.550	3.550	3.618
	Produktivitas (Ton/Ha)	45	45	10
	Produksi (Ton)	1.597,5	1.597,5	36118
13	Pisang			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	68.078	68.078	75.258
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	35.513	35.513	38.084
	Produktivitas (Ton/Ha)	10	10	10
	Produksi (Ton)	3.553,1	3.553,1	3808.4
14	Rambutan			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	487	487	487
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	65	65	60
	Produktivitas (Ton/Ha)	60	60	10
	Produksi (Ton)	39	39	6
15	Sirsak			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	919	919	919
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	737	737	95
	Produktivitas (Ton/Ha)	20	20	10
	Produksi (Ton)	147,4	147,4	70
16	Sukun			
	Jumlah Tanaman (Pohon)	414	414	414
	Tanaman Menghasilkan (Pohon)	155	155	163
	Produktivitas (Ton/Ha)	30	30	15
	Produksi (Ton)	46,5	46,5	24.45

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan

Salah satu faktor pendukung dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian adalah ketersediaan sarana irigasi dan alat-alat pertanian.

Tabel 4.23
Potensi dan Fungsi (Teknis) Daerah Irigasi
Tahun 2009 –2011

No.	Daerah Irigasi	Potensi dan Fungsi Per-Tahun		
		2009	2010	2011
1	Daerah Irigasi Alale			
	a. Potensi (Ha)	674,1	674,1	674,1
	b. Fungsi/Teknis (H2)	674,1	674,1	674,1



2	Daerah Irigasi Lomaya			
	a. Potensi (Ha)	1.261,68	1.261,68	1.261,68
	b. Fungsi/Teknis (H2)	1.261,68	1.261,68	1.261,68

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Bone Bolango

Daerah Irigasi yang mengalir wilayah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari daerah irigasi alale dan daerah irigasi lomaya yang luas dan fungsi/teknisnya sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.23 sedangkan untuk ketersediaan alat-alat pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Data Jumlah Alat-Alat Pertanian
Tahun 2009 – 2011

No.	Jenis Alat	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Traktor Roda Dua	38	38	40
2.	Traktor Sedang	8	8	8
3.	Traktor Besar	2	2	2
4.	Pembersih Gabah	2	2	2
5.	Penggilingan Padi	40	40	46

Sumber Data: Dinas Pertanian, Perkebunan & Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.25
Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Besar
Tahun 2009 – 2011

Tahun	Jumlah (Ekor)		
	Sapi	Kuda	Kambing
2009	14.519	774	5509
2010	N/A	N/A	N/A
2011			

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kab. Bone Bolango *(Data 2011 masih dalam pengolahan)

Tabel 4.26
Jumlah Peternak Tahun 2009 S/D 2011

Tahun	Jumlah Peternak Berdasarkan Jenis Ternak				
	Peternak Sapi	Peternak Kambing	Peternak Ayam Petelur	Peternak Ayam Pedaging	Peternak Itik
1	2	3	4	5	6
2009	7.427	1.371	27	67	8
2010	7.656	1.360	28	68	18
2011	9.274	1.363	30	73	28



Tabel 4.27
Jumlah Ternak Unggas Tahun 2009 – 2011

Jumlah Ternak Besar	Tahun (ekor)		
	2009	2010	2011
1. Ayam Kampung			
• Jantan	67.461	26.290	14.800
• Betina	199.984	44.663	20.969
2. Ayam Ras			
• Jantan	-	50.115	37.000
• Betina	776.645	100.230	77.000
3. Itik			
• Jantan	5.992	8.212	7.200
• Betina	8.447	9.883	11.278

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.28
Konsumsi Ternak di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2009 – 2011

Tahun	Konsumsi Per-Tahun		
	Daging	Telur	Susu
2009	3.273.140	480.995	N/A
2010	6.178.330	614.340	N/A
2011	7.807.109	649.985	N/A

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.29
Jumlah Ternak Sapi yang dipotong
di RPH dan diluar RPH yang dilaporkan
Tahun Bolango 2009 – 2011

No	Tahun	Jumlah Ternak Sapi yang dipotong (ekor)
1	2009	982
2	2010	993
3	2011	967

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi:

1. Belum ada master plan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Belum ada perlindungan lahan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) secara berkelanjutan



3. Petani kekurangan modal untuk pengadaan sarana produksi
4. Kesadaran petani dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah masih kurang
5. Kurangnya kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan tidur secara optimal
6. Belum ada insentif kepada petugas Statistik Pertanian
7. Masih Kurangnya sarana jalan usaha tani ke sentra-sentra produksi.
8. Kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di tingkat usaha tani masih rendah
9. Belum optimalnya penggunaan lahan terutama penerapan diversifikasi pangan dan perkebunan
10. Diversifikasi pangan belum optimal
11. Kelembagaan petani masih lemah
12. Pemberian bantuan kepada petani tidak sesuai dengan musim tanam
13. SDM petani masih rendah
14. Tingkat Kematian Pedet dan induk sapi masih relatif tinggi
15. Tingkat pemotongan sapi betina produktif masih sangat besar
16. Rendahnya tingkat kelahiran Pedet
17. Kurangnya SDM dibidang kesehatan hewan

Solusi yang perlu dilakukan:

1. Pengusulkan kegiatan untuk menyusun master plant untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Merancang aturan/PERDA kepada DPRD tentang perlindungan lahan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) secara berkelanjutan
3. Mengusulkan alokasi kegiatan untuk pengadaan sarana produksi
4. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan Kesadaran petani dalam pengelolaan bantuan dari pemerintah
5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan tidur secara optimal
6. Mengusulkan alokasi kegiatan untuk memberikan insentif kepada petugas Statistik Pertanian



7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana jalan usaha tani ke sentra-sentra produksi.
8. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di tingkat usaha tani
9. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk mengoptimalkan penggunaan lahan terutama penerapan diversifikasi pangan dan perkebunan
10. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk melakukan Diversifikasi pangan
11. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan Kelembagaan petani
12. Menyusun strategi untuk Pemberian bantuan kepada petani tepat waktu dan sesuai dengan musim tanam
13. Mengusulkan kegiatan untuk studi banding ke daerah yang lebih maju
14. Menekan angka kematian pedet dan induk sapi dengan memberikan pelayanan secara optimal serta penyediaan pakan secara memadai
15. Mencegah pemotongan sapi betina produktif dengan cara membeli sapi betina produktif dan dikembangkan kembali pada peternak yang layak sebagai penerima bantuan.
18. Meningkatkan program Inseminasi Buatan (IB).
19. Rekrutmen tenaga Dokter Hewan

❖ **Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan**

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sebesar Rp. 3.915.119.000,00.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan adalah sebesar Rp. 3.450.737.220,00 atau 88,14%.



B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, dengan rincian kegiatan :
 - a. Pemanapan system penyuluhan pertanian
 - b. Penguatan system penyuluhan yang berorientasi pada kebutuhan petani
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan petugas penyuluhan
 - d. dukungan kebijakan penyuluhan dan manajemen proyek
 - e. Pembangunan BPP/Rehab
 - f. Pengadaan Peralatan/Meubelair

Dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan produktivitas pertanian, maka penyuluh pertanian memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program pertanian. Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, maka pada tahun 2011 ini dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi penyuluh serta pemberian insentif kepada penyuluh.

Penyuluh yang melekat pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian di lapangan, sangat memegang peranan penting dalam menyampaikan, menyelaraskan dan mensukseskan program dan kegiatan sektor pertanian sebagaimana digambarkan pada tabel 4.30 berikut :

Tabel 4.30
Jumlah BP3K, Tenaga Penyuluh dan Kelompok Petani
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 – 2011

TAHUN	Jumlah BP3K	Jumlah Tenaga Penyuluh	Jumlah Kelompok Petani
2009	6 Unit	109	549
2010	7 Unit	123	491
2011	10 Unit	131	495

Sumber Data : BP4K Kabupaten Bone Bolango



C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi Dan Informasi Pertanian (P3TIP) memiliki permasalahan yaitu Penyelenggaraan kegiatan UPFMA pada 10 Desa yang tidak mengusulkan proposal pembelajaran TA 2011 yang disebabkan oleh:

- a. Adanya pengurus UPFMA yang tidak aktif.
- b. Pendampingan TPL yang kurang intensif.

Solusi :

- a. Pembinaan dan pergantian pengurus UPFMA melalui rembuk tani.
- b. Pembinaan kepada TPL (Tenaga Penyuluh Lapangan) dalam pendampingan fasilitas UPFMA.

❖ Urusan Pilihan Kehutanan dan Pertambangan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sebesar Rp. 2.499.318.715,00. Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan pilihan kehutanan dan pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp. 2.465.488.300,00 atau 98.65%

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output dari pelaksanaan program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan:
 - a. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan sebanyak 21 orang.
 - b. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2. Program rehabilitasi hutan dan lahan



- a. Meningkatnya rehabilitasi terhadap lahan kritis 60 ha
 - b. Terbangunnya DAM pengendali sebanyak 1 unit
 - c. Tersedianya sarana prasarana pengawasan pelaksanaan GERHAN selama 1 tahun
 - d. Pembangunan pos jaga 1 unit
 - e. Pengadaan bibit 10.000 pohon
3. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
 - a. Presentase peningkatan pengawasan di bidang pertambangan sebanyak 51 %
 - b. Terlaksananya sosialisasi penambangan galian C di tujuh lokasi
 4. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
 - a. Presentase tertibnya pertambangan rakyat sebanyak 55 %
 5. Program pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan
 - a. Terlaksananya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan sebanyak 55 %
 - b. Tersedianya PLTS sebanyak 10 unit

Kondisi lahan kritis di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Tahun 2009 menurut luas dan penyebarannya sebesar 41,346 Ha, tahun 2010 bertambah menjadi 105,666 Ha, tahun 2011 tidak mengalami perubahan Tabel 4.31

Tabel 4.31
Luas Lahan Kritis, Reboisasi dan Penghijauan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009 s/d 2011

No.	Jenis Lahan	Luas lahan per tahun (Ha)		
		2009	2010	2011
1.	Lahan Kritis	41,346	105,666	105,606
2.	Lahan Reboisasi	100	-	-
3.	Lahan Penghijauan	-	287	347
4.	Kebakaran Hutan	19,8	2,40	-

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango

Adapun outcome yang dihasilkan :

1. Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan GERHAN selama 1 tahun



2. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
3. Meningkatnya pengawasan pertambangan yang berdampak pada pengrusakan lingkungan
4. Terciptanya pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikian

C. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan dalam urusan kehutanan saat ini khususnya dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan adalah keterbatasan SDM(POLHUT), dan anggaran pengawasan. Selain itu permasalahan lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah dalam pelestarian sumber daya hutan.

Solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah pelaksanaan operasi pengamanan pencurian kayu harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur POLRI dan TNI, sedangkan untuk masyarakat diperlukan sosialisasi atau pembinaan secara intensif terhadap masyarakat terhadap bahaya perusakan hutan dan lahan.

❖ Urusan Pilihan Pariwisata dan Kebudayaan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Program dan kegiatan untuk urusan pilihan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sebesar Rp 551.481.500.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 551.481.500. atau 99%.

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun output dari program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan Kegiatan :**
 - a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata :



- Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara baik dalam maupun luar negeri
- Terlaksananya pemantauan serta Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Pengembangan Destinasi pariwisata :
 - Terlaksananya Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Obyek Wisata
 - Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
- c. Pengembangan Kemitraan dengan Kegiatan :
 - Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan
 - Terselenggaranya kegiatan sosialisasi sadar wisata

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan Kegiatan :

- a. Terlaksananya Pengawasan, Monitoring Evaluasi serta Pelaporan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan Kegiatan

- a. Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada pengelolaan kekayaan budaya antara lain :

1. Tersedianya data serta lancarnya pengawasan serta pelaporan pada program pengendalian kekayaan budaya
2. Terciptanya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh daerah



Tabel 4.32
Jenis dan Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya
Tahun 2007 s/d 2011

No	Jenis Pagelaran Seni dan Budaya	Lokasi (Kecamatan & Desa)	Tahun Kunjungan				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Festival Tumbilatohe	Kabupaten Bone Bolango	1	1	1	1	1
2	Festival Nou dan Uti	Kabupaten Bone Bolango	1	1	1	1	1
3	Lainnya	Kabupaten Bone Bolango	2	2	2	2	2

3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata tahun 2011 pada obyek wisata yang di Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana dapat kita lihat pada table 4.32.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas kedalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Tabel 4.33
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Setiap Obyek Wisata
Tahun 2009 – 2011

No	Jenis Obyek Wisata	Lokasi (Kecamatan & Desa)	Jumlah Kunjungan Per-Tahun Kunjungan		
			2009	2010	2011
1.	Wisata Alam Lombongo	Kecamatan Suwawa Desa Lombongo	1.770	3562	
2.	Wisata Bahari Olele	Kecamatan Kabila Bone Desa Olele	N/A	N/A	
3.	Wisata Budaya Makam Raja Atinggola	Desa Dunggala Kecamatan Tapa	N/A	N/A	
4.	Kebun Binatang Mana Suka	Kecamatan Tilongkabila Desa Lonuo	N/A	N/A	

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Standar Kompetensi dan Profesionalisme aparatur masih rendah.
2. Masih kurangnya fasilitas sanggar Budaya daerah yang ada di kecamatan-kecamatan.



3. Belum adanya fasilitas Rumah Adat di tingkat Kabupaten Bone Bolango
4. Belum adanya Perda tentang penerbitan Izin Usaha Pariwisata (Rumah makan, Cafe dan Bar)
5. Kurangnya promosi Pariwisata dan Budaya kabupaten Bone Bolango ke tingkat nasional dan internasional
6. Masih kurangnya fasilitas pendukung yang terdapat di obyek-obyek wisata
7. Belum adanya Master Plan dan DED tentang pengembangan Obyek Wisata Bahari Olele/Botutonuo.
8. Kurangnya pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan
9. Belum optimalnya peran Kelompok sadar wisatadalam dalam mendukung upaya pengembangan kepariwisataan daerah.

Solusi :

1. Perlu adanya Bimtek dan Diklat tentang kepariwisataan serta keikutsertaan aparatur dalam pelatihan penyusunan RIPPDA.
2. Pembentukan sanggar-sanggar budaya ditiap kecamatan.
3. Perlu dibangun rumah adat/budaya ditingkat kabupaten.
4. Perlu adanya regulasi daerah yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata tentang penerbitan izin usaha/jasa pariwisata termasuk pengawasan dan pengendalian.
5. Perlu adanya penataan manajemen pemasaran pariwisata daerah dalam bentuk website atau sarana promosi lainnya, serta kerja sama dengan pengelola kepariwisataan lainnya.
6. Perlu adanya penambahan fasilitas pendukung di Obyek Wisata antara lain : Penambahan Cottage, Pembangunan Kolam Renang Anak, Tempat Ibadah, Restaurant dan Rumah Makan, Pengadaan Perahu kaca, perlengkapan Diving/Diving Centre, Akses jalan.
7. Segera dibuatkan Master Plan dan DED untuk pengembangan Obyek Wisata Bahari Olele/Botutonuo.
8. Perlu dilaksanakan sosialisasi sadar wisata.



9. Perlu adanya pemberian insentive kepada kelompok sadar wisata yang telah dibentuk.
10. Perlu penataan batas kawasan Obyek Wisata Lombongo.

❖ **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

D. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk urusan Kelautan dan perikanan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.062.938.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.833.385.201,- atau 94%.

E. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Kelautan dan perikanan antara lain :

- 1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**
 - a. Terlaksananya Lomba Inovasi Pengembangan Produk hasil Perikanan Tingkat Kabupaten 1 Kali.
 - b. Terlaksana pengadaan alat angkutan berpendingin roda 2 sebanyak 12 unit.
 - c. Terlaksananya pengadaan peralatan pemasaran ikan sederhana (cool box) sebanyak 20 unit.
 - d. Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan abon ikan sebanyak 2 unit.
- 2. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan**
 - a. Terlaksananya pemeliharaan kapal pengawas 1 unit.
 - b. Terlaksananya pemasangan muring bouy pada kawasan zonasi di 4 lokasi KKLD.
- 3. Program pengembangan Budidaya perikanan**
 - a. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Air Tawar bagi pembudidaya ikan 2 kali.



- b. Terlaksananya Pelatihan bagi petugas teknis budidaya air laut 1 kali (2 orang).
- c. Terlaksananya pengadaan Benih Ikan Kerapu 3.000 ekor.
- d. Terlaksananya pengadaan Benih Ikan Nila sebanyak 50.000 ekor.
- e. Terlaksananya pengadaan benih ikan kwee sebanyak 3.000 ekor.
- f. Terlaksananya Pengadaan pakan ikan air tawar sebanyak 6.500 Kg
- g. Terlaksananya percontohan Budidaya ikan Kakap 1 unit : pakan : 500 Kg dan benih : 1.000 ekor.
- h. Terlaksananya Percontohan Budidaya lele dikolam terpal sebanyak 3 unit.

4. Program pengembangan perikanan tangkap

- a. Terlaksananya Pembinaan Tehnis Managemen Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 2 kali.
- b. Terlaksananya Pengadaan mesin katinting 5.5 PK sebanyak 4 unit
- c. Terlaksananya Pengadaan Kapal Penangkapan ikan 12 GT 1 unit
- d. Terlaksananya Pengadaan alat tangkap mini purse seine 1 unit.
- e. Terlaksananya Pengadaan Genset (alat bantu penangkapan cumi-cumi) 12 unit.
- f. Terlaksananya pengadaan rumpon sebanyak 4 unit.
- g. Terlaksananya pengadaan jaring insang 30 unit.
- h. Terlaksananya pengadaan alat pancing sebanyak 50 unit.
- i. Terlaksananya pengadaan alat angkut bermotor roda 2 untuk petugas statistic perikanan sebanyak 4 unit.
- j. Terlaksananya pengadaan notebook untuk petugas statistic perikanan 1 unit.
- k. Terlaksananya pengadaan printer untuk petugas statistic perikanan sebanyak 3 unit.
- l. Terlaksananya pengadaan infocus bagi petugas perikanan 1 unit.
- m. Terlaksananya pengadaan almari bagi petugas statistic perikanan 1 buah.



5. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

- a. Terlaksananya pengadaan Induk ikan sebanyak 2.800 ekor.
- b. Terlaksananya pengadaan benih ikan lele sebanyak 15 ekor.
- c. Terlaksananya percontohan budidaya ikan lele sebanyak 2 unit.
- d. Terlaksananya Percontohan budiadaya rumput laut sebanyak 5 unit.
- e. Terlaksananya pengadaan alat pembuat pakan 1 unit.
- f. Terlaksananya pengadaan peralatan HSRT air laut 1 set.
- g. Terlaksananya sarana pembuatan unit Karamba jaring Apung 1 unit.
- h. Terlaksananya rahabilitasi kolam UPR 1 unit.
- i. Terlaksananya pembangunan kolam percontohan budidaya air tawar 1 unit.
- j. Terlaksananya pembanguna Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Air Laut 1 unit.
- k. Terlaksananya pembangunan pagar HSRT air laut sepanjang 115 meter.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kelautan dan perikanan antara lain :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 12.131 Ton dari target sebesar 11.969 Ton
2. Peningkatan produksi budidaya perikanan sebesar 507.41 Ton dari target 242 Ton
3. Meningkatnya konsumsi ikan per kapita per tahun menjadi 41 kg/kapita/thn dari target 34 Kg/kapita/thn

Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung, dan rumput laut. Perkembangan produksi perikanan tangkap pada tahun 2009 sebesar 11.250 ton dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 12.131 ton Tabel 4.34, sedangkan data produksi peralatan tangkap dapat dilihat pada Tabel 4.35.



Tabel 4.34
Data Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2009 – 2011

No	Tahun	Jumlah Produksi (ton)
1	2009	11.250
2	2010	11.830
3	2011	12.131

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.35
Data Produksi Peralatan Tangkap (dalam ton)
Tahun 2009- 2011

NO	Jenis Peralatan Tangkap	2009	2010	2011
1.	Pukat Cincin	3.356,2	3853,7	6.547,1
2.	Jaring Insang Tetap	47.4	50	56,4
3.	Sekor	-	-	508,8
4.	Pancing Ulur	4.547,8	4,883,2	3.655,5
5.	Pancing Tegak	1.134,2	1,090,7	1.363,2

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.36
Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI Menurut Jenis Ikan
Tahun 2010 – 2011

No	Jenis Ikan	Tahun 2010		Tahun 2011	
		Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)
1.	Layang	2,132,8	11,611,214	2.695,2	13.476,107
2.	Selar	1,888,6	10,286,474	2.215,4	12.562,235
3.	Tongkol	1.503,7	7,518,450	1.856,1	9.280,533
4.	Cakalang	1.503,2	10,522,675	1.857,7	13.004,172
5.	Tenggiri	244,2	1,709,157	182,8	1.279,421
6.	Ikan Terbang	16,1	48,109	22,6	67.671
7.	Julung-julung	16,9	50,876	16,9	50.753
8.	Ikan Kuwe	732,2	5,859,967	548,3	4.386,586
9.	Cumi-cumi	1.952,5	15,620,031	508,9	4.071,251
10.	Tuna	289,3	5,785,654	355,6	7.111,654
11.	Lainnya (Madidihang)	801,6	14,852,713	1.007,5	20.150,592

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

Untuk produksi perikanan laut yang dijual di TPI terdiri dari beberapa jenis ikan, antara lain ikan layang, bawal, kembung, selar, tembang dan lain-lain. Untuk ikan layang, pada tahun 2010 produksinya mencapai 2.132,8 kg



dan meningkat pada tahun 2011 mencapai 2.695,2 kg. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 4.36.

Salah satu faktor pendukung dalam peningkatan produksi perikanan tangkap adalah ketersediaan alat-alat tangkap, seperti pukat cincin, jaring insang hanyut, jaring lingkaran dan lain-lain. Ketersediaan alat-alat tangkap dari tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.37

Kabupaten Bone Bolango memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone, yang menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango.

Tabel 4.37
Data Sarana Alat Tangkap
Tahun 2009– 2011

NO	Produksi dan Jenis Alat Tangkap	2009	2010*	2011
1.	Pukat Pantai (Buah)	1	N/A	-
2.	Pukat Cincin (Buah)	18	N/A	21
3.	Jaring Insang Hanyut (Buah)	-	N/A	4
4.	Bagan Perahu/Rakit (Buah)	-	N/A	-
5.	Jaring Insang Tetap (Buah)	-	N/A	-
6.	Jaring Angkat Lainnya (Buah)	-	N/A	-
7.	Pancing lainnya (buah)	2005	N/A	1.396
8.	Pancing Tonda (Buah)	1685	N/A	-
9.	Sero (buah)	148	N/A	401
10.	Pancing Tegak	1.272	N/A	1.194

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

*Data 2010 masih dalam pengolahan

Tabel 4.38
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut
Berdasarkan Kepemilikan Sarana Penangkap Ikan
Tahun 2009 – 2011

NO	Jenis Rumah Tangga Perikanan Laut (RTP)	2009	2010	2011
1.	RTP Tanpa Perahu	-	-	-
2.	RTP Perahu Tanpa Motor	388	387	212
3.	RTP Perahu/Motor Tempel	1,278	1,285	1.193
4.	RTP Kapal Motor	7	8	13

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango



Oleh karena itu banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, tinggal dan hidup di sepanjang pesisir pantai tersebut. Kondisi jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan yang ada di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 4.38, dan Tabel 4.39

Tabel 4.39
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Darat
Berdasarkan Kepemilikan Sarana Penangkap Ikan
Tahun 2009 - 2011

Tahun	Rumah Tangga Perikanan (RTP)					
	RTP Tambak	RTP Kolam	RTP Keramba	RTP Mina Padi	RTP Rumput Laut	RTP Pembenihan
2009		517	65	35	-	-
2010		528	60	38	-	46
2011						

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango
• Data sementara Tahun 2010

Jika dilihat dari keberadaan Rumah Tangga Perikanan Darat yang ada di Kabupaten Bone Bolango, ternyata mengalami Kenaikan. Pada tahun 2009, masih ada 617 RTP untuk tahun 2010 menjadi 672 RTP.

C. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Kurangnya sarana dan prasarana system rantai dingin di TPI
2. Masyarakat belum begitu paham tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan
3. Tidak adanya Penyidik bidang Kelautan (PPNS)
4. Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan perikanan

Solusinya antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana system rantai dingin di TPI, sosialisasi tentang Retribusi jasa Usaha Perikanan, pelatihan bagi tenaga penyidik bidang Kelautan dan Perikanan (PPNS) dan peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan dan kelautan

❖ Urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

A. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.068.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.016.331.447,- atau 98,89%.



Jumlah Program dan Kegiatan Strategis Dinas Koperasi, UMKM Perindag :

Jumlah Program : 6 Program

Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan

Jumlah Keluaran : 22 Keluaran

Jumlah keluaran yang memenuhi target : 8 Keluaran

Jumlah keluaran yang tidak memenuhi target : 14 Keluaran

Adapun keluaran kegiatan yang tidak memenuhi target yakni :

N O	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	REALI SASI
1.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			
	a. Fasilitas Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	- Jumlah UKM Skala Mikro yang difasilitasi - Jumlah Koperasi Aktif yang difasilitasi - Jumlah Koperasi Berprestasi yang Difasilitasi - Jumlah Kegiatan Penunjang	20 UKM 8 Koperasi 4 Koperasi 1 Kegiatan	0 0 0 0
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
	a. Pelatihan Manajemen Penegelolaan Koperasi / KUD	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
3.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	- Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan/Dioptimalka n Fungsinya - Jumlah Kegiatan Penunjang	3 Koperasi 1 Kegiatan	0 0
	b. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0



4.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor			
	a. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
5.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan			
	a. Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan	- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
	b. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan	- Jumlah Kegiatan Pembangunan Tempat Usaha	1 Unit	0
		- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0
6.	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah			
	a. Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	- Jumlah Kegiatan Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah	1 Kegiatan	0
		- Jumlah Kegiatan Penunjang	1 Kegiatan	0

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, antara lain:

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

a) Fasilitasi bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

✓ Tersedianya Fasilitas Peralatan Produksi bagi 5 Kelompok Usaha Industri (IKM);

b) Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri.

✓ Terlaksananya Penerapan 4 Gugus Kendali Mutu (GKM) Model.

2) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

✚ Pengembangan Sentra Industri Potensial.

✓ Terselenggaranya bimtek Sentra Industri Potensial bagi 20 IKM.



3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

- ✓ Terselenggaranya bimtek bagi 25 UMKM yang terpilih yang memiliki jiwa wirausaha.

b) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

- ✓ Terselenggaranya bimtek bagi Pengelola Koperasi yang menguasai Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD melalui Pelatihan bagi 30 Orang.

4) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Reproduksi;

✚ Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

- ✓ Terselenggaranya bimtek Diversifikasi Produk Olahan Agro Industri Pangan bagi 25 Orang Peserta.

5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

✚ Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- ✓ Terikutsertanya Produk UMKM pada Pameran Dalam dan Luar Daerah sebanyak 3 kali yaitu 2 Kali di Dalam Daerah dan 1 Kali di Luar Daerah.

6) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

- ✓ Terawasinya 20 Jenis Bahan Pokok terhadap Peredaran Barang dan Jasa di Wilayah Kabupaten Bone Bolango.

b) Pengawasan Alat UTTP Metrologi Legal

- ✓ Terawasinya Proteksi Alat UTTP Metrologi Legal kepada Masyarakat Pengguna sebanyak 3 kali.

7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;

✚ Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan UKM

- ✓ Terbinanya UMKM dan Koperasi melalui Penguatan Modal Usaha terhadap 45 UMKM dan 12 Koperasi.

8) Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi;

a) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;



- ✓ Tercapainya Peningkatan Kualitas Koperasi bagi 3 Koperasi dengan Mengoptimalkan Fungsinya.
 - b) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - ✓ Terselenggaranya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian terhadap 75 KUKM.
 - c) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.
 - ✓ Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada 5 Koperasi Berprestasi.
- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;**
- ✚ Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan.
 - ✓ Tercapainya Promosi 4 Produk Unggulan Daerah melalui Pameran Dalam dan Luar Daerah sebanyak 3 kali.
- 10) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.**
- a) Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan;
 - ✓ Terselenggaranya Sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebanyak 10 Orang Peserta.
 - b) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
 - ✓ Tersedianya Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima sebanyak 2 Paket.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, antara lain:

- 1) Prosentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Industri oleh Masyarakat yang Menerima Bantuan (40% (dr 1.500 Sak menjadi 2.100 Sak setelah diberi bantuan Peralatan);
- 2) Peningkatan Kualitas bagi Sentra-Sentra Industri (3 Sentra Industri);
- 3) Jumlah KUKM yang telah memiliki Daya Saing dan keunggulan (40% dari 250 UKM dan 60% dari 75 Koperasi Aktif);
- 4) Prosentase jumlah sentra IKM yang menggunakan Iptek dalam sistem produksi dengan jumlah IKM yang belum menggunakan Iptek dalam sistem produksi (40% dari 35 sentra Industri yang ada);
- 5) Mempromosikan Produk Komoditas UMKM;



- 6) Penurunan Jumlah Kasus Kecurangan Pedagang / Penjual terhadap Konsumen (80% (dari 2 kasus turun menjadi 1 kasus);
- 7) Prosentase Pemanfaatan Fasilitas Sarana / Biaya yang diberikan sesuai dengan Pembentukannya/Pemanfaatannya;
- 8) Jumlah Koperasi Yang Ternilai Kesehatannya dan Terklarifikasi Kinerjanya (Tercapainya Prosentase Koperasi yang sehat & berkinerja baik sebesar 40% dr target yg harus dinilai (75 Kop. Aktif);
- 9) Jumlah Produk-produk Unggulan Kab. Bone Bolango yang diikuti di Pameran;
- 10) Penataan tempat berusaha bagi pedagang Kaki Lima dan Asongan

c. Permasalahan dan Solusi

Pertumbuhan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan masih belum menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, hal ini diakibatkan oleh;

1. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing;
2. Sarana dan prasarana perdagangan sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga perlu pengembangan di wilayah lainnya;
3. Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga;
4. Belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, cq. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya;
5. Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara professional sebagian besar koperasi dikelola paruh waktu atau sisa pekerjaan lainnya;



6. Pola kemitraan dan kerjasama antara Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Pengusaha Besar belum optimal;
7. Globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya saing produk UMKM;
8. Masih adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa dana bergulir dari Pemerintah merupakan hibah, sehingga menghambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan bagi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan skill kreativitas pelaku usaha;

Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya melalui pembinaan usaha-usaha yang tergabung dalam kelompok Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan penyediaan dan fasilitasi akses permodalan dan pasar serta peningkatan sarana dan prasarana, antara lain;

1. Pelatihan penerapan dan bantuan sarana prasarana teknologi;
2. Pengembangan kawasan perdagangan di wilayah yang belum tersentuh;
3. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi melalui pelatihan;
6. Meningkatkan pola kemitraan dengan BUMN/BUMD/BUMS secara berkesinambungan;
7. Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui keunggulan kompetitif;
8. Memberikan pemahaman tentang ketentuan dana bergulir melalui penyuluhan/sosialisasi maupun kunjungan langsung kepada Koperasi/UMKM.
9. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan/permodalan dan meningkatkan skill kreativitas pelaku usaha.



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan didelegasikan sekaligus kepada daerah

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau



desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas



pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian / lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan, Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan

Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas



pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum atau Peraturan yang digunakan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan Tugas Pembantuan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen teknis ke daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran



Kementerian/Lembaga. Adapun instansi pemberi Tugas Pembantuan yang melalui Departemen/Lembaga/Kementerian kepada daerah selang Tahun 2011 yang diterima oleh SKPD Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran dari Kementerian/lembaga
Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan)
Tahun Anggaran 2011

No.	Departemen/ Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	3.734.358.000
2.	Kementerian Pertanian RI	7.390.000.000
JUMLAH TOTAL		11.124.358.000

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan dari Departemen/ Lembaga/ Kementerian melalui program pada masing-masing SKPD di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan DIPA masing-masing kegiatan. Adapun SKPD Kabupaten Bone Bolango yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan dan hasil dari pelaksanaan berupa realisasi program/kegiatan yang diterima SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2011
Berdasarkan SKPD Penerima

No	SKPD Penerima	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Departemen/ Lembaga Pemberi
			Anggaran (Rp,00)	%	
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.734.358.000	1.652.385.000	66,37	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
2.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	7.390.000.000	6.405.845,550	86,67	Kementerian Pertanian RI:
J U M L A H		11.124.358.000	8.058.230.550	76,52	

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah :



➤ **Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi**

- a. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, kegiatannya yaitu Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan tenaga kerja sektor informal padat karya; dan kegiatan Peningkatan pengembangan pasar kerja.
- b. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trasmigrasi, kegiatannya yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat di kawasan transmigrasi, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, dukungan teknis dan manajemen lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trasmigrasi (Ditjen P2MKT); Program ini lokasinya berada di daerah pengembangan transmigrasi desa Owata Kecamatan Bulango Utara.
- c. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, yang kegiatannya yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan sarana dan pemberdayaan kelembagaan dimana salah satu item pekerjaannya adalah lanjutan pembangunan BLK
Lokasi lanjutan pembangunan BLK bertempat di Desa Ulantha Kecamatan Suwawa.

➤ **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan , kegiatannya meliputi:
 - 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal;ia;
 - 2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
 - 3) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan;
 - 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatannya meliputi:
 - 1) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian;



- 2) Perluasan Areal Pengolahan Lahan Pertanian;
 - 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
 - 4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, kegiatannya meliputi:
- 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;
 - 2) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan
- d. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, kegiatannya meliputi:
- 1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
 - 2) Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
 - 3) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan
- e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatannya meliputi:
- 1) Perluasan areal peternakan;
 - 2) Optimalisasilahkan mendukung peternakan
 - 3) Pengelolaan air irigasi
 - 4) Alat dan mesin pertanian

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 sebesar Rp. 11.124.358.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.058.230.550,00 atau 76,52% yang bersumber dari APBN (Tugas Pembantuan), sedangkan rincian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan serta realisasi masing-masing kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 5.3.**



Tabel 5.3
Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011

No	SKPD Penerima	Departemen/ Lembaga Pemberi	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	REALISASI			Sisa (Rp,-)
						FISIK (%)	KEUANGAN		
							(Rp,-)	%	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI	1 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1 Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan tenaga kerja sektor informal padat karya	369,201,000	100	355,222,000	96.21	13,979,000
				2 Peningkatan pengembangan pasar kerja	50,000,000	100	50,000,000	100.00	-
			2 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1 Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	446,367,000	100	445,498,000	99.81	869,000
				2 Pengembangan Bantuan Usaha Ekonomi di Kimstrans (KTM)	349,520,000	100	346,615,000	99.17	2,905,000
				3 Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Sosial Budaya dan Mental Spritual	72,660,000	100	72,660,000	100.00	-
				4 Kelambagaan Kimstrans/KTM dan masyarakat yang mandiri	98,110,000	100	98,110,000	100.00	-
				5 Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT	233,580,000	100	233,550,000	99.99	30,000
			3 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan sarana dan pemberdayaan kelembagaan - Sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja - Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (SAP)	2,075,790,000	0	36,220,000	1.74	2,039,570,000
					39,130,000	37	14,510,000	37.08	24,620,000
			J U M L A H					3,734,358,000	45.00
2	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian RI	1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1 Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	551,230,000	75	398,480,000	72.29	152,750,000
				2 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	6,500,000	100	6,000,000	92.31	500,000
				3 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	406,693,000	100	406,567,000	99.97	126,000
				4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	42,500,000	100	38,400,000	90.35	4,100,000
			2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1 Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	887,400,000	100	887,400,000	100.00	-
				2 Perluasan Areal Pengolahan Lahan Pertanian	250,000,000	100	250,000,000	100.00	-



			3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	6,250,000	80	5,000,000	80.00	1,250,000	
			4	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1,238,000,000	100	1,229,220,000	99.29	8,780,000	
		3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar	2,246,850,000	67	1,461,733,550	65.06	785,116,450
				2	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan	104,870,000	90	92,245,000	87.96	12,625,000
		4	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	295,000,000	95	279,000,000	94.58	16,000,000
				2	Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	487,700,000	100	487,700,000	100.00	-
				3	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	20,000,000	100	20,000,000	100.00	-
		5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Prasarana dan Sarana Pertanian	1	Perluasan areal peternakan	388,000,000	100	388,000,000	100.00	-
				2	Optimalisasi lahan mendukung peternakan	60,000,000	100	60,000,000	100.00	-
				3	Pengelolaan air irigasi	15,000,000	100	15,000,000	100.00	-
				4	Alat dan mesin pertanian	350,000,000	95	340,000,000	97.14	10,000,000
JUMLAH TOTAL					7,355,993,000	94.24	6,364,745,550	92.88	812,497,450	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program dan kegiatan sumber anggaran tugas pembantuan tahun 2011 adalah:

1. Terkadang muncul dalam Tugas Pembantuan kegiatan yang tidak diusulkan dan umumnya kegiatan tersebut dari pusat telah tercantum termasuk jumlah dananya.
2. Belum seragamnya Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan dari masing-masing Departemen yang berakibat kurangnya efisien dan sinerginya sehingga proses pencairannya masih mengalami keterlambatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan.



3. Adanya program-program yang tidak bersinergi dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
4. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Tugas Pembantuan, sehingga terkesan kegiatan ini tidak transparan.
5. Masih adanya SKPD yang tidak memiliki arsip dan laporan kegiatan yang mendapatkan bantuan dari pusat, sehingga mempersulit untuk monitoring dan evaluasi.
6. Lambatnya penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan petunjuk teknis operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sehingga dapat menunda penyelesaian Program/Kegiatan yang telah direncanakan.
7. Khusus untuk program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas yang realisasi keuangannya hanya 2,40%, dimana didalamnya terdapat kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung BLK Kabupaten Bone Bolango yang tidak terealisasi dikarenakan sampai berakhirnya batas waktu penawaran, tidak ada penyedia barang dan jasa yang berminat terhadap kegiatan ini, hal ini disebabkan ada beberapa aspek teknis yang menyalahi prosedur dan dapat berdampak sangsi hukum, sehingga menurunkan minat penyedia barang dan jasa.

Sedangkan solusi yang dapat diberikan adalah :

1. Perlunya adanya koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal dan sektoral utamanya dalam pengalokasian kegiatan yang bersumber dari dana tugas pembantuan.
2. Diharapkan kepada setiap Departemen/Lembaga/Kementerian diharapkan adanya keseragaman serta ketepatan waktu dalam memberikan petunjuk serta pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah sehingga kegiatan yang dilakukan oleh daerah dapat dikerjakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.
3. Koordinasi yang baik akan membantu pengalokasian kegiatan pembantuan bersinergi dengan kegiatan yang dibiayai melalui APBD



4. Perlunya melakukan pelaporan secara berjenjang baik kepada instansi pemberi dana maupun kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk bahan monitoring dan evaluasi
5. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang kegaitan-kegiatan pembantuan kepada instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun kepada masyarakat.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Untuk Tahun 2011 ini, tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Komitmen dan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi pra-syarat mutlak agar pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun skala regional menjadi mudah, cepat dan tepat sasaran. Olehnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap tahap pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan mengedepankan integrasi dan kerjasama seluruh elemen pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kebijakan dan Kegiatan

Arah kebijakan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi dan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki serta dalam rangka peningkatan daya saing wilayah. Kerjasama tersebut diarahkan pula dalam upaya percepatan pembangunan wilayah termasuk pembangunan daerah perbatasan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus berpartisipasi dan mengembangkan koordinasi antar daerah melalui



beberapa wadah kerja sama, antara lain Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI) dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).

Selain program kerjasama pembangunan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat pada beberapa program strategis, yang antara lain:

- a) Penanggulangan kemiskinan melalui program nasional PNPM, PKH, JAMKESMAS/JAMKESDA dan RASKIN.
- b) Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
- c) Program Pengembangan Ekonomi Lokal kegiatan Program Percepatan Kawasan Pembangunan Daerah tertinggal (P2KPDT) pada kementerian daerah tertinggal.
- d) Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) FEATI pada Kementerian Pertanian/Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Selain pengembangan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengembangkan pula kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan institusi lokal, nasional maupun lembaga donor internasional dalam upaya pengembangan infrastruktur wilayah dan sentra-sentra ekonomi produktif diwilayah pedesaan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Berikut pelaksanaan hubungan kerjasama yang di lakukan oleh prmerintah Daerah Bone Bolango dengan pihak ketiga:

1. 01/HKM-PK/BB-I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi Masyarakat Kabupaten Bone Bolango
2. 02/HKM-PK/BB-I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango



- tentang Penetapan Ranperda BPHTB menjadi Perda Kabupaten Bone Bolango
3. 03/HKM-PK/BB-I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan Di Lingkungan Kantor Bupati Bone Bolango
 4. 03.a/HKM-PK/BB-II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pemda Kabupaten Bone Bolango dengan Staf Khusus Pemda Kabupaten Bone Bolango
 5. 04/HKM-PK/BB-IV/2011 tentang Pengelolaan Pabrik Sabuk Kelapa
 6. 05/HKM-PK/BB-VI/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bone Bolango
 7. 05.a/HKM-PK/BB-VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Staf Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
 8. 07/HKM-PB/BB-VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Persetujuan Bersama RANPERDA Pertanggungjawaban APBD 2011
 9. 10/HKM-PB/BB-IX/2011 tentang Persetujuan Bersama APBDP
 10. 12/HKM-NK/BB-XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang KUA
 11. 13/HKM-NK/BB-XI/2011 tentang PPAS
 12. 14/HKM-PB/BB-XII/2011 tentang APBD 2011
 13. 15/HKM-PK/BB-XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pemerintah Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan PT. ASKES (PERSERO) Cabang Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA) bagi Masyarakat Kabupaten Bone Bolango
 14. Tentang Peliputan dan Pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan PT. Radio Gorontalo Maju Nomor : 16/MOU/GORAD-Kab.BB/I/2011
 15. Tentang Pelaksanaan Peliputan dan Pemberitahuan Keseluruhan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Gorontalo Post Nomor : 051/DIR/GP/I/2011
 16. Tentang Peliputan dan Pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Radar Gorontalo Nomor : 0150/DR-RG/GTLO/II/2011
-



17. Tentang Peliputan dan Pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan PT. Gorontalo Televisi Utama Nomor : 05/MOU/GOTV-Kab.BB/I/2011
18. Tentang Peliputan dan Pemberitahuan Kegiatan Bupati dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan CV. Media Cerdas Bangsa Nomor : 04/HP/MOU/I/2011

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat digambarkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam bidang desain dan konstruksi prasarana proyek-proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan kerjasama secara terus menerus dengan berbagai konsultan, perusahaan konstruksi dan perusahaan pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam bidang pengembangan sumber daya aparatur, kerjasama yang telah dilakukan dimana sejumlah aparatur pemerintah daerah yang diberikan kesempatan mengikuti pendidikan Strata Satu dengan sejumlah Perguruan Tinggi diantaranya UNG, UG, STIA BINA TARUNA, UNISAN di Provinsi Gorontalo.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* ada tiga pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dimana ketiga lembaga tersebut harus berjalan sinergi dan terkoordinir dengan Instansi Vertikal, guna sebagai penyeimbang *check and balance* dalam melahirkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Hubungan koordinasi dengan instansi Vertikal ini dibangun dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan yang ada, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpang tindih untuk mendorong pelaksanaan program agar bisa berjalan optimal dengan hasil maksimal untuk mencapai tujuan.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya:



1. 06/HKM-NK/BB-VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Nota Kesepahaman antara KANWILHAM dan Pemda Bone Bolango tentang Pelayanan Hukum – Hak Azasi Manusia
2. 11/HKM-KB/BB-X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemda dengan PANGDAM

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi vertikal di Kabupaten Bone Bolango diarahkan dalam rangka membangun dan mempermantap komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan serta menjamin sinergitas dan integritas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara konsisten dan terus menerus mengembangkan koordinasi program dan kegiatan bidang pembangunan, administrasi pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, yang dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah dan tidak tumpang tindih atau saling bertentangan dengan program Pemerintah Daerah atau antar instansi vertikal.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dengan instansi vertikal di Kabupaten Bone Bolango yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1). Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), yang diselenggarakan dalam rangka membahas dan mencari solusi atas beberapa agenda, isu dan kondisi yang berkenaan dengan upaya menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Instansi vertikal yang terlibat terdiri dari : Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Pengadilan Negeri Gorontalo, Kepolisian Resort Bone Bolango dan KODIM 1304 Gorontalo. Koordinasi forum MUSPIDA tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan hasil dan manfaat berupa terwujudnya kestabilan dan keamanan



penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga bertindak lanjut pada terwujudnya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

- 2). Forum Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA), yang diselenggarakan dalam rangka mempermantap dan memperkuat kondisi keamanan dan ketertiban wilayah. Instansi vertikal yang terlibat terdiri dari Kepolisian Daerah Gorontalo, Kepolisian Resort Bone Bolango dan KODIM 1304 Gorontalo. Yang menangani forum KOMINDA adalah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango. Pelaksanaan forum koordinasi tersebut dilaksanakan secara periodik ataupun bersifat insidental dengan hasil diperolehnya informasi tentang kondisi politik dan keamanan wilayah, serta ditetapkannya langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengancam kestabilan dan keamanan wilayah.
- 3). Dalam bidang pengembangan statistik daerah telah dilaksanakan kerjasama dengan Kantor Statistik kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan data makro daerah antara lain:
 - a). Dokumen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
 - b). Kabupaten Dalam Angka (KDA)
 - c). Kecamatan Dalam Angka (KcDA)
 - d). Indikator Sosial Budaya
- 4). Dalam bidang pendataan dan penataan aset/tanah milik daerah dilakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dengan penanggungjawab Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Bone Bolango.
- 5). Dalam rangka Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dikembangkan kerja sama dengan BPKP perwakilan Manado.
- 6). Dalam bidang pelestarian kawasan hutan telah dilaksanakan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan dalam rangka perlindungan Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone melalui program GERHAN.



- 7). Dibidang kehidupan keagamaan, kegiatan kerjasama dengan Kantor Departemen Agama yang telah dilaksanakan yakni difokuskan pada peningkatan pelayanan kehidupan beragama berupa pelayanan pendidikan, urusan ibadah dan haji serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dalam bentuk forum lintas agama (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama).
- 8). Dalam bidang penanggulangan bencana alam, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan koordinasi yang terus menerus dengan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai dasar hukum eksistensi wilayah, kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan timbulnya konflik antara daerah.

Sebagai dasar hukum eksistensi wilayah memberi makna bahwa suatu daerah yang telah berdiri sendiri harus memperoleh pengakuan publik yang harus didukung dengan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain wilayah yang telah berdiri sendiri perlu memiliki batas wilayah yang jelas dan pasti yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Tapal Batas.

Tidak jelasnya batas wilayah dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada wilayah perbatasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan lahan warga di wilayah perbatasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan/penataan batas wilayah perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pembinaan batas wilayah terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapal batas yang merupakan batas wilayah telah ditetapkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003.



2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan melalui koordinasi bersama antar pemerintahan baik antar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan, maupun melalui koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Pembinaan tapal batas tersebut dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam pembinaan batas wilayah adalah

- Adanya tapal batas yang terletak pada taman nasional yang sulit dijangkau dan jarak antar tapal batas terlalu jauh.
- Disinyalir adanya pemindahan patok tapal batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Solusi yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang berbatasan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta memprogramkan fasilitasi percepatan pembuatan dan peninjauan tapal batas.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya.

A. Kejadian bencana banjir bandang :

- Banjir Bandang di desa panggulo di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge pada Tanggal 12 Januari 2012.

Penanggulangannya :

- ❖ Normalisasi aliran sungai mati dilokasi Bencana Banjir Bandang Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge
- ❖ Pengobatan masal oleh Dinas terkait
- ❖ Memberikan bantuan makanan siap saji selama pemulihan



B. Kejadian bencana banjir bandang :

- Banjir Bandang diDesa Taludaa dan Sogitia, Kecamatan Bone

Penanggulangannya :

- ❖ Perbaikan saluran pipa air bersih
- ❖ Penimbunan jembatan taludaa
- ❖ Memberikan makanan siap saji selama pemulihan
- ❖ Memberikan bantuan alat dapur seadanya
- ❖ Melakukan Foging (pengasapan)

C. Kejadian Bencana Banjir Bandang :

- Banjir Bandang diDesa Alo, Inomata, moopiya, Mootayu, Kecamatan Bone raya

Penanggulangannya :

- ❖ Perbaikan saluran pipa alir bersih
- ❖ Penmbunan jembatan Bone Raya
- ❖ Memberikan makanan siap saji, selama pemulihan
- ❖ Memberikan Bantuan Alat dapur seadannya.
- ❖ Melakukan Foging (pengasapan)

D. Kejadian Bencana Longsor :

- Bencana longsor Desa Kopi Kecamatan Bulango Utara

Penanganannya :

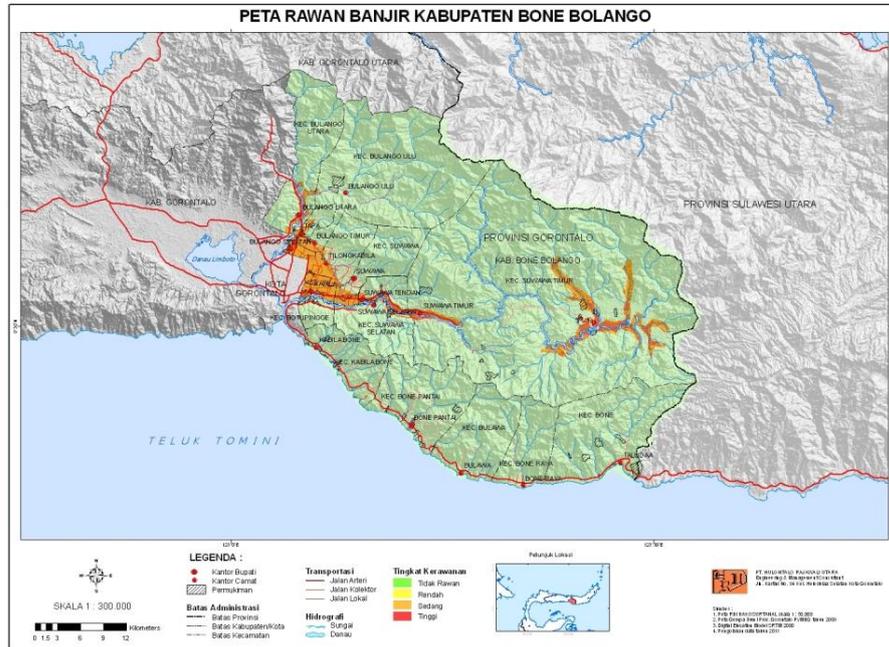
- ❖ Mengerukan timbunan tanah yang menutupi jalan akses ke Desa Kopi

2. STATUS BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO

Berdasarkan hasil Pemetaan Profil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Bolango kerja sama dengan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional (BAKORSULTANAL) Kabupaten Bone Bolango merupakan Daerah Rawan Bencana. Daerah Rawan Bencana meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.

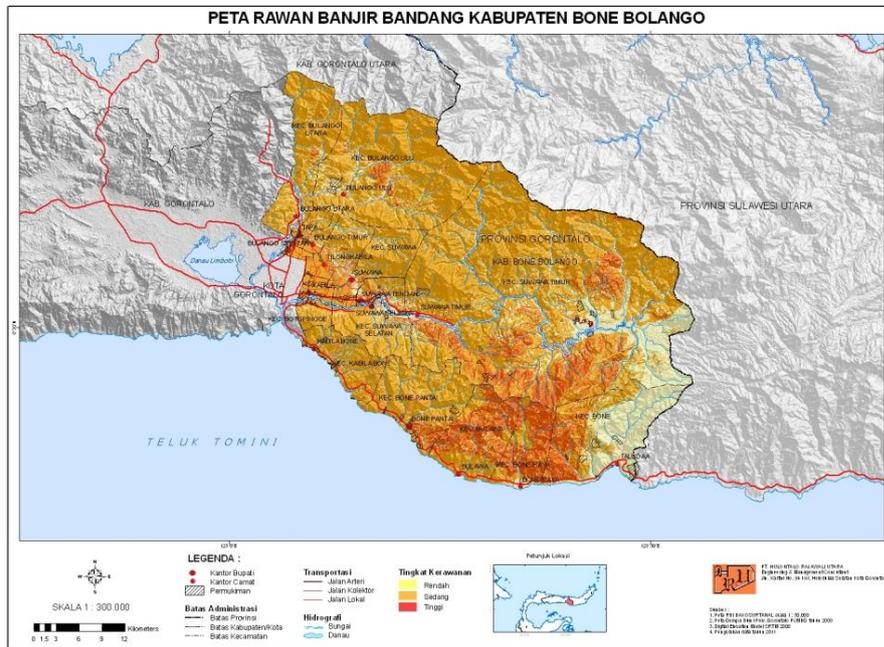


**Gambar:
Peta Rawan Banjir**



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011

**Gambar:
Peta Rawan Banjir Bandang**



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011



Tabel 6.1
Daerah – Daerah titik Rawan Bencana Meliputi :

NO	KECAMATAN	TITIK RAWAN BENCANA	KETERANGAN
1	SUWAWA	Desa Boludawa, Bube, Bube Baru, dan Tingkohubu	
2	SUWAWA TENGAH	Desa Lombongo, Alale, dan Tapadaa	
3	SUWAWA SELATAN	Desa Libungo, Bulonthala, dan Bulontala Timur	
4	SUWAWA TIMUR	Desa Panggulo, Dumbaya Bulan, dan Tulabolo	
5	KABILA	Kelurahan Oluhuta, Oluhuta Utara, Tumbihe, Pauwo, Padengo, Desa Poowo, Talango, dan Toto Selatan	
6	TILONGKBILA	Desa Moutong dan Bongopini	
7	BOTUPINGGE	Desa Panggulo dan Buata	
8	KABILA BONE	Desa Moodelomo, Huangobotu, Botutonuo, dan Botubarani	
9	BONE PANTAI	Desa Olele dan Tihu	
10	BULAWA	Desa Bunga Hijau, dan Kaidundu	
11	BONE RAYA	Desa Inomata, Moopiya, Mootayu dan Alo	
12	BONE	Desa Tumbuh Mekar, Monano, Sogitia, Molamahu, permata, Inogaluma, Taludaa, Masiaga, Ilohelumo, Muara Bone, dan Mooduliyo	
13	TAPA	Desa Langge, dan Donggala	
14	BULANGO UTARA	Desa Tupa, Suka Damai, Kopi dan Longalo.	
15	BULANGO ULU	Desa Mongiilo	
16	BULANGO TIMUR	Desa Bulotalangi	
17	BULANGO SELATAN	Desa Talulobutu	

3. SUMBER DANA DAN JUMLAH ANGGARAN

- Bencana yang terjadi di Kecamatan Botupingge pada bulan Februari Tahun 2011 Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000 Sumber Dana APBN
- Bencana yang terjadi di Kecamatan Bone pada Bulan Tahun 2011 Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000
- Bencana yang terjadi di Kecamatan Bone Raya pada Bulan Juni Tahun 2011 Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000
- Bencana yang terjadi di Kecamatan Bone pada Bulan September Tahun 2011 Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000
- Bencana yang terjadi di Kecamatan Bone Raya pada Bulan September Tahun 2011 Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000

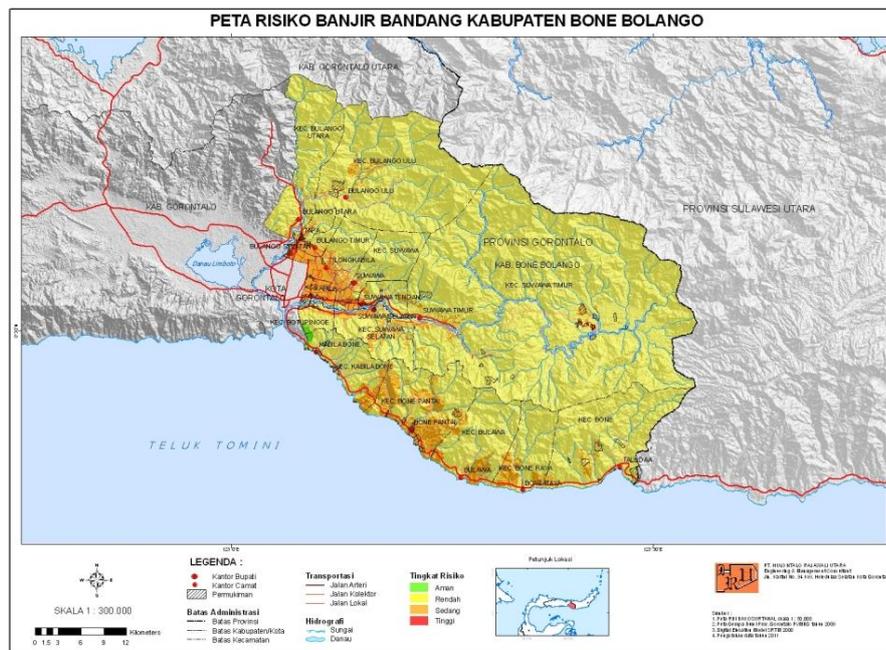
4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

- Melakukan sosialisasi penyebaran potensi bencana alam
- Melakukan pelatihan kader relawan siaga bencana
- Pemetaan jalur evakuasi bencana
- Melakukan simulasi bencana

5. POTENSI BENCANA YANG DI PERKIRAKAN TERJADI

- Tanah Longsor
- Banjir Bandang

Gambar:
Peta Resiko Banjir Bandang



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011



F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional.

Penetapan kawasan khusus di daerah otonom dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional seperti halnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan pengembangan industri strategis dan berteknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga permasyarakatan spesifik). Oleh karena itu, dalam penetapan kawasan khusus Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Ditinjau dari penjelasan diatas Kabupaten Bone Bolango belum memiliki kawasan khusus seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hanya memiliki kawasan lindung yakni Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selain bencana alam di negara kita juga ini sering timbul gangguan keamanan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti: SARA, anarkisme, separatis, terorisme, walau di wilayah Kabupaten Bone Bolango hal-hal semacam itu tidak terjadi namun perlu terus di waspadai karena hal-hal seperti ini dapat saja terjadi setiap saat.

1. Gangguan yang Terjadi

Secara bertahap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2007, masih menggunakan perangkat Hukum berupa Perda yang terdiri dari Perda Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, implementasi Perda tersebut



sudah menunjukkan dampak yang positif dalam rutinitas masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketetraman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, minum-minuman keras dan demonstrasi namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Ada beberapa instansi yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban.

a. Instansi diluar Pemerintah Daerah, adalah :

- Kepolisian
- Kejaksaan
- TNI.

b. Instansi lingkup Pemerintah Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tugas dan fungsi kewenangan Satuan kerja perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik yang memiliki sumber daya aparatur dalam rangka menjalankan tugas operasional tehknis sesuai dengan Tupoksi yang diuraikan diatas, menyangkut jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, serta pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 6.2 .

4. Penanggulangan.

Jika terjadi suatu kejadian diwilayah Kabupaten Bone Bolango, maka penanggulangannya telah diatur dalam PROTAP di masing-masing Institusi dan



Tabel 6.2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

JENJANG PENDIDIKAN	APARAT			
	PNS	TENAGA HONOR NON DATABASE	TENAGA KONTRAK	TENAGA ABDI
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	3	-	5	-
Diploma	-	-	4	-
SLTA	17	-	10	-
SMP	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
JUMLAH	20	0	19	0

Sumber Data : Satpol dan Linmas Bone Bolango 2011

Tabel 6.3
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

JENJANG PENDIDIKAN	APARAT			
	PNS	TENAGA HONOR NON DATABASE	TENAGA KONTRAK	TENAGA ABDI
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	12	-	5	-
Diploma	-	-	4	-
SLTA	11	-	10	-
SMP	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
JUMLAH	23	0	19	0

Sumber Data : Badan Kesbang Bone Bolango 2011

saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman sesama aparat di lapangan.

Disamping itu pula, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan secara penuh KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah) dengan maksud memberikan keamanan lingkungan yang kondusif, sehingga berdampak pada ketentraman masyarakat.



5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.

Setiap kejadian perkara baik itu sifatnya lingkungan maupun lokal dalam penanggulangannya selalu diikutsertakan aparat keamanan khususnya Polri, utamanya untuk menjaga agar kejadian perkara tidak melebar dan membesar dan selalu mencari pemecahan masalahnya dengan melakukan dialog dan melibatkan pihak-pihak yang merasa terlibat dalam suatu kejadian perkara.

Berbagai konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Dengan adanya KOMINDA merupakan wadah kerjasama antara TNI, POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait/vertikal, tujuannya untuk melakukan deteksi dini dan mengumpulkan informasi-informasi baik dari perorangan maupun sekelompok masyarakat dalam bentuk intelejen, serta lapor cepat/tindak cepat guna disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dalam pengambilan keputusan.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi substansi strategis Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango Tahun 2011 yakni sebagai berikut :

1. Dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun faktor pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi tercapainya visi Kabupaten Bone Bolango.
2. Secara umum indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan trend peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun diakui masih terdapat kekurangan yang tidak berimplikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Belum tercapainya target pendapatan dalam kurung waktu dua belas bulan selama tahun 2011, bukanlah pencerminan rendahnya kinerja aparatur dalam mengali sumber-sumber pendapatan PAD, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, misalnya; (a) regulasi pendukung yang mengatur retribusi belum sepenuhnya diatur; (b) masih ada regulasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; (c) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menaati regulasi tentang retribusi dan sejenisnya masih relatif rendah; (d) belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana publik yang menghasilkan sumber pendapatan retribusi daerah.



4. Untuk penyerapan (realisasi) belanja daerah kurang dari target yang ditetapkan merupakan suatu hal logis dan positif, sebagai akibat dari kinerja pemerintah yang mengutamakan adanya efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.
5. Setiap permasalahan yang muncul sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2011 telah ditempuh pemecahannya melalui pendekatan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah baik dengan Pemerintah Provinsi serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

B. Saran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, disamping merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance and Clean Governance* juga merupakan proses yang bersifat administratif sebagai wujud profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah, sehingga terbangun proses *Check and Balance* antara Eksekutif dan Legislatif.

Oleh karena itu melalui proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dari semua elemen pembangunan daerah guna tercapainya komitmen bersama yakni terwujudnya pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Disamping itu pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) janganlah hanya sebatas rutinitas belaka atau hanya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi yang lebih penting adalah kesungguhan bersama untuk menyatukan persepsi, komitmen seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.



Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2011 ini dibuat, untuk disampaikan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi bahan pembahasan bersama.